



Metodologi
Penelitian

HUKUM ISLAM

Edisi
Revisi

Metode penelitian hukum Islam menjadi kajian yang penting dalam disiplin Ilmu Hukum Islam. Perkembangan dan dinamika hukum Islam yang terus maju pesat tidak akan terlepas dari kontribusi metode penelitian. Muncul dan berkembangnya berbagai jenis metode penelitian akan memberikan pengayaan terhadap kajian hukum Islam itu sendiri.

Setidaknya, buku *Metodologi Penelitian Hukum Islam* yang berada di tangan pembaca ini memaparkan berbagai pola, teknik, dan metode penelitian dalam hukum Islam. Materi dalam buku ini menguraikan mulai dari materi yang bersifat teori hingga praktik dan contoh proposal penelitian.

Dengan kata lain, buku ini tidak hanya menghadirkan konsep dan teori, tetapi contoh praktis yang dapat dijadikan panduan. Semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen, peneliti hukum Islam, dan seluruh masyarakat.



Penerbit
PRENADAMEDIA GROUP
[DIVISI KENCANA]
Email: pmg@prenadamedia.com
http://www.prenadamedia.com



Harga P. Jawa Rp70.000,00

Edisi
Revisi

Metodologi Penelitian

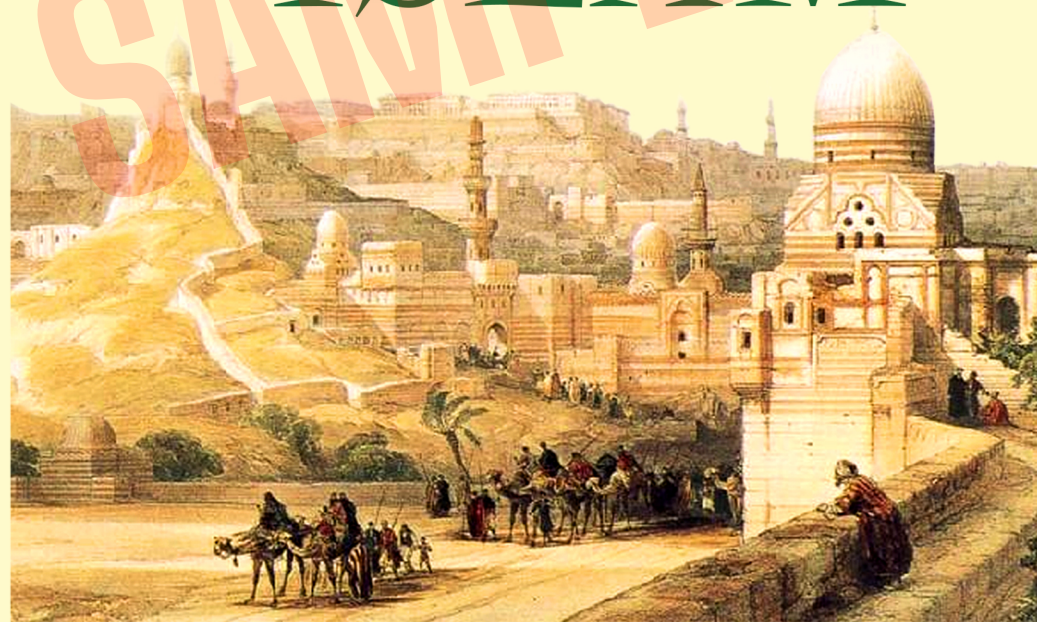
HUKUM
ISLAM

Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A.
Dr. Watni Marpaung, M.A.



Edisi Revisi

Metodologi Penelitian HUKUM ISLAM



Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A.
Dr. Watni Marpaung, M.A.

Edisi Revisi

Metodologi Penelitian

HUKUM ISLAM

SAMPLE

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Edisi Revisi

Metodologi Penelitian HUKUM ISLAM

Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A.
Dr. Watni Marpaung, M.A.



METODOLOGI PENELITIAN HUKUM ISLAM

Edisi Revisi

Copyright © 2016

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-0895-93-2

13.5 x 20.5 cm

x, 226 hlm

Cetakan ke-2, April 2018

Kencana. 2016.0641

Penulis

Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A.

Dr. Watni Marpaung, M.A.

Desain Sampul

tambra23

Penata Letak

Witnasari

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Penelitian dalam suatu ilmu pengetahuan merupakan suatu kemestian. Dapat dipastikan suatu ilmu pengetahuan yang tidak memiliki metode penelitian tidak akan berkembang secara berkesinambungan. Hal ini tentunya menuntut bagi setiap akademisi dapat mengetahui kerangka melakukan penelitian dalam masing-masing disiplin yang digelutinya. Bahkan, dengan penelitian bagian upaya untuk menajamkan analisis terhadap suatu ilmu pengetahuan tidak dapat dinafikan.

Setidaknya, secara historis penelitian dimulai sejak abad ke-19 yang berawal pada bidang ilmu pengetahuan alam dalam rangka mengembangkan teori-teori dan konsep ilmu tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah berpikir ilmiah. Gejala-gejala alam yang relatif tetap dilakukan dengan melakukan pengamatan dan verifikasi data untuk mengujinya. Namun belakangan penelitian ilmu pengetahuan alam merambah ke dalam ilmu sosial termasuk dalam bidang hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, penelitian tidak saja berfungsi untuk mengembangkan teori dan konsep tetapi lebih banyak berfungsi dalam memecahkan persoalan-persoalan sosial.

Kendati pun demikian, suatu penelitian tidak terlepas dari metode yang digunakan untuk melakukan langkah-langkah dalam penelitian tertentu. Sehingga diperlukan suatu metodologi yang dapat dijadikan panduan dalam melakukan penelitian tersebut. Dalam disiplin hukum, penelitian yang terkait dan bersentuhan dengan hukum harus menggunakan metodologi yang diakui dalam dunia hukum.

Buku metodologi penelitian hukum yang berada di tangan pembaca merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kontribusi dalam lapangan penelitian hukum yang dirasakan tidak begitu signifikan dalam pertumbuhannya. Buku ini terdiri dari tujuh bab yang perinciannya yaitu: *Bab Pertama*, dasar-dasar pengetahuan dan ilmu; *Bab Kedua*, penelitian dan jenis-jenisnya; *Bab Ketiga*, metode ilmiah; *Bab Keempat*, hukum dan metode bahasannya; *Bab Kelima*, penelitian hukum normatif; *Bab Keenam*, penelitian hukum empiris; *Bab Ketujuh*, teknik dan format penulisan penelitian. Paling tidak ketujuh bahasan yang terdapat dalam buku ini dapat mengantarkan kepada pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian hukum bagi seluruh pihak yang bergerak dalam bidang hukum terutama para peneliti di bidang hukum.

Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A.

Dr. Watni Marpaung, M.A.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 DASAR-DASAR PENGETAHUAN DAN ILMU PENGETAHUAN	1
A. PENDAHULUAN	1
B. POSISI ILMU DALAM ISLAM	2
C. DEFINISI PENGETAHUAN, ILMU, DAN FILSAFAT	4
1. Pengetahuan	4
2. Ilmu	4
3. Filsafat	6
D. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENGETAHUAN, ILMU, DAN FILSAFAT	7
BAB 2 PENELITIAN DAN JENIS-JENISNYA	11
A. PENDAHULUAN	11
B. PENGERTIAN PENELITIAN	12
C. ILMU, PENELITIAN, DAN KEBENARAN	13
1. Pendekatan Ilmiah	15
2. Pendekatan Non-Ilmiah	15
D. JENIS-JENIS PENELITIAN	16
BAB 3 METODE ILMIAH	19
A. PENGERTIAN KERANGKA BERPIKIR ILMIAH	19
B. KRITERIA METODE ILMIAH	22

C. BEBERAPA LANGKAH DALAM METODE ILMIAH	24
D. UNSUR-UNSUR DALAM PROSES KEILMUAN	26
BAB 4 HUKUM DAN METODE BAHASANNYA	31
A. METODE KAJIAN HUKUM YANG DIKONSEPSIKAN SEBAGAI ASAS MORAL	34
B. METODE KAJIAN HUKUM POSITIF	35
C. METODE KAJIAN HUKUM YANG DIKONSEPSIKAN SOSIOLOGIS	36
BAB 5 PENELITIAN HUKUM ISLAM NORMATIF	39
A. PENDAHULUAN	39
B. INVENTARISASI HUKUM POSITIF	45
C. PENELITIAN HUKUM ISLAM PADA RANAH SUMBER	47
D. PENELITIAN HUKUM ISLAM PADA RANAH DOKTRIN (PEMIKIRAN)	51
E. PENELITIAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM	53
F. PENELITIAN ISTINBĀṬ AHKĀM	59
G. PENELITIAN HUKUM ISLAM PERBANDINGAN	61
H. PENELITIAN SEJARAH HUKUM ISLAM (TĀRĪKH TASYRĪ)	63
I. METODOLOGI PENELITIAN SIYASAH	66
J. METODE PENELITIAN FIKIH	72
1. Pendahuluan	72
2. Pengertian dan Karakteristik Hukum Islam	72
3. Model-model Penelitian Hukum Islam (Fikih)	73
K. PENELITIAN QANUN DAN SYARIAT	78
1. Pendahuluan	78
2. Pengertian Qanun dan Syariat	79
3. Metodologi Penelitian Qanun dan Syariah	81
L. PENUTUP	85
BAB 6 PENELITIAN HUKUM ISLAM EMPIRIS	87
A. PENDAHULUAN	87



DAFTAR ISI

B. JUDUL PENELITIAN	89
C. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH	90
1. Identifikasi Masalah	90
2. Rumusan Masalah	95
D. TUJUAN PENELITIAN	101
E. HIPOTESIS	101
1. Teori dan Hipotesis	102
2. Perumusan Hipotesis	107
3. Menguji Hipotesis	108
4. Ciri-ciri Hipotesis	110
F. ASUMSI DASAR	111
G. RUANG LINGKUP PENELITIAN	111
H. STUDI KEPUSTAKAAN	112
I. VARIABEL	114
J. METODE PENARIKAN SAMPEL	115
1. Populasi Penelitian	117
2. Sampel Penelitian	119
3. Pembagian Teknik Sampling	122
4. Teknik Penarikan Sampel Non-Probabilitas	131
K. METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA	134
1. Pencatatan Hasil Pengumpulan Data Secara Kuantitatif	135
2. Analisis Data Secara Kuantitatif	144
BAB 7 TEKNIK DAN FORMAT PENULISAN PENELITIAN	149
A. PENDAHULUAN	149
B. FUNGSI DAN JENIS LAPORAN HASIL PENELITIAN	150
C. KERANGKA DAN ISI LAPORAN PENELITIAN	152
D. TEKNIK DAN STRATEGI PENULISAN LAPORAN	164
1. Langkah-langkah Penulisan Laporan	164
2. Teknik Penulisan Laporan	166
3. Petunjuk Penulisan Laporan	168
E. PENELAAHAN HASIL PENULISAN	170
F. KERTAS DAN MARGIN KETIKAN	172



G. PENOMORAN HALAMAN	174
H. SUMBER ACUAN DAN KUTIPAN	174
1. Dikutip Sesuai Aslinya	174
2. Tidak Dikutip Persis Hanya Pokok Pikirannya	176
3. Kutipan Langsung	177
4. Kutipan Bebas (Tidak Langsung)	177
5. Catatan Kaki	178
I. DAFTAR PUSTAKA	181
 REFERENSI	 219
PARA PENULIS	223



1

DASAR-DASAR PENGETAHUAN DAN ILMU PENGETAHUAN

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai salah satu agama *revealed religion* tidak hanya menuntun umatnya untuk semata-mata beribadah kepada tuhan; atau hanya menekankan pada satu aspek tertentu yang harus dicapai dalam kehidupan ini. Tetapi Islam merupakan agama yang komprehensif dan mempunyai konsep-konsep yang jelas di dalam berbagai dimensi kehidupan.

Di antaranya konsep tentang ilmu pengetahuan. Apabila dilakukan pelacakan terhadap kedua sumber *nash* autentik Al-Qur'an dari Hadis akan didapatkan berbagai tuntutan-tuntutan tersebut. Bahkan telah terbukti dalam perjalanan sejarah bahwa wahyu pertama sekali yang disampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW adalah tentang perintah untuk membaca dan menulis. (QS. *al-'Alaq* [96]: 1-5). Tidak diragukan lagi bahwa kepedulian Islam terhadap ilmu pengetahuan menempati peringkat yang paling utama, sebab menulis dan membaca merupakan keniscayaan dalam tradisi dunia.

Paling tidak ayat di atas merupakan motivasi untuk mendorong umat Islam untuk pandai membaca, berpikir, dan

berkreasi. Semakin banyak membaca, tentu akan semakin banyak manfaat yang diperoleh. Ilmu akan bertambah, bahasa makin baik, dan wawasan makin luas. Bacalah alam, bacalah Al-Qur'an, dan bacalah buku-buku ilmu pengetahuan (agama dan umum). Maka membaca merupakan kunci pembuka untuk mempelajari ilmu pengetahuan.

Di dalam organ tubuh manusia ada alat yang mampu membaca dari menganalisis suatu problem serta memberi solusi atas problem tersebut yakni akal. Karena dengan akal manusia dapat mencari jawaban-jawaban dari problem itu dengan melalui beberapa pendekatan. Dipertegas dengan firman Allah SWT dalam surah *at-Tiin* (95): 04, artinya: "...telah kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk."¹ Maksud ayat ini, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk Allah SWT disebabkan akal. Dengan akal dapat berpikir dan memberi solusi demi kemaslahatan manusia.

Perlu dicatat, bahwa awal penciptaannya, manusia tidak memiliki ilmu dan pengetahuan (*an-Nahl* [16]: 78). Dengan demikian, jelas sekali manusia meraih ilmu dengan meng-optimalisasikan telinga untuk menangkap informasi, mata untuk melihat permasalahan, akal menganalisis, hati menentukan dan menyeleksi permasalahan itu.

B. POSISI ILMU DALAM ISLAM

Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan sebagaimana yang tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di atas. Begitu besar perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan, sehingga setiap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menun-

¹ Al-Qur'an al-Karim.



tut ilmu. Sabda Nabi: “Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan” (HR. Ibnu Abdil Bar).

Di mana pun ilmu berada, Islam memerintahkan untuk mencarinya. Sabda Nabi: “Carilah ilmu meskipun di negeri Cina” (HR. Ibnu ‘Adi dari Baihaqi). Menuntut ilmu dalam Islam tidak berhenti pada batas usia tertentu, tetapi dilaksanakan seumur hidup. Tegasnya dalam menuntut ilmu tidak ada apologi dengan istilah “sudah tua”. Selama hayat masih dikandung badan, manusia wajib menuntut ilmu.

Tetapi terkait caranya hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masing-masing. Tuntutan untuk menuntut ilmu sampai akhir kehidupan ditegaskan dalam Hadis Nabi SAW. “Carilah ilmu sejak buaian sampai ke liang lahat.”

Dengan memiliki ilmu seseorang menjadi lebih tinggi derajatnya dibanding dengan yang tidak berilmu. Atau dengan kata lain, kedudukan mulia tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu (*al-Mujaddilah* [58]: 11) dan (*az-Zumar* [39]: 9).

Sementara itu, penghormatan terhadap penuntut ilmu dijelaskan pula dalam beberapa Hadis Nabi SAW. Di antaranya: “Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, sambil membaca Al-Qur’an dan mempelajarinya kecuali mereka dinaungi oleh para malaikat, mereka diberikan ketenangan, disirami rahmat, dan selalu diingat Allah”. Dan, “Sesungguhnya, malaikat akan meletakkan sayapnya (menaungi) pada pencari ilmu karena senang dengan apa yang sedang dituntutnya.”

Menurut Hadis di atas, tempat-tempat majelis ilmu itu dinaungi malaikat, diberikan ketenangan (*sakinah*), disirami rahmat dan dikenang Allah di singgasana-Nya. Demikian begitu jelasnya penghormatan yang diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan.



C. DEFINISI PENGETAHUAN, ILMU, DAN FILSAFAT

1. Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*)² adalah segala sesuatu apa yang kita ketahui (*the sum what is known*)³ yang mana dalam proses pengetahuan tersebut tidak memperhatikan objek, cara dan kegunaannya. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk kedalaman ilmu. Selanjutnya, pengetahuan juga merupakan khazanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung memperkaya kehidupan manusia.

Sumber-sumber pengetahuan adalah *rasio, empiris, intuisi dan wahyu*.⁴ Pengetahuan yang diperoleh dengan berbagai cara yang telah dilakukan akan bersumber dari keempat sumber tersebut.

Pengetahuan manusia akan berguna sebagai alat untuk memecahkan problematika manusia yang ada dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian, pengetahuan sangat penting untuk dimiliki manusia.

2. Ilmu

Ilmu merupakan salah satu bentuk pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Semua pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah dengan ciri-ciri tertentu akan menghasilkan ilmu (*science/scientific knowledge*).

² Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1037.

³ Judy Pearsall and Bill Trumble (ed.), *The Oxford English Reference Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 789.

⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 50-54.



Secara ontologis ilmu membatasi tentang pengkajian objek yang berada dalam lingkup pengalaman manusia. Ilmu akan mempelajari alam sebagaimana adanya dan terbatas pada lingkup pengetahuan manusia. Adapun epistemologi ilmu merupakan cara yang ditempuh dengan menggunakan metode ilmiah dalam menemukan kebenaran tertentu. Sementara aksiologi, di mana ilmu dilihat dalam perspektif manfaat dan kegunaan setelah ditemukannya suatu kebenaran.

Namun dalam proses penelitian untuk mencapai ilmu, seorang ilmuwan harus memiliki moral dan daya intelektual cukup baik dalam mendekati kebenaran dengan cara objektif. Perlu dicatat dalam perbincangan nilai bahwa ilmu seluruhnya diklaim bebas nilai, di mana kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia dalam perkembangan tertentu. Kriteria kebenaran menurut ilmu terdiri dari tiga teori, yaitu *teori kebenaran koherensi*, *teori kebenaran korespondensi*, dan *teori kebenaran pragmatis*.

Teori kebenaran koherensi dipahami bahwa suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Adapun teori korespondensi di mana suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dimaksud. Terakhir, teori kebenaran pragmatis yang menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan demikian, suatu pernyataan harus berfungsi dalam kehidupan manusia.⁵

⁵ *Ibid.*, hlm. 24-58. Permasalahan ilmu ini dapat dibaca pada buku-buku yang membahas filsafat ilmu, misalnya C.A. Van Duersen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, The Lian Gie, *Pengantar filsafat Ilmu* dari buku-buku yang lain.



Adapun ciri-ciri dari ilmu pengetahuan adalah *rasional, empiris, sistematis, objektif, dan tentatif*.

3. Filsafat

Filsafat berasal dari kata *filein*, artinya mencintai; dan *sophia*, artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah ilmu yang mencintai dan mencari kebijaksanaan. Adapun definisi yang umum dipakai adalah pengetahuan mengenai semua hal melalui sebab-sebab terakhir yang didapat melalui penalaran atau akal budi. Ia mencari dan menjelaskan hakikat dari segala sesuatu. Sementara menurut Plato filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang hakikat. Dalam aplikasinya filsafat menelaah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan manusia dan filsafat dimulai dari rasa ingin tahu yang besar dan keraguan. Perlu diketahui bahwa metodologi yang digunakan dalam berfilsafat, di antaranya:

1. Metode Kritis.
2. Metode Intuitif.
3. Metode Skolastik.
4. Metode Matematika.
5. Metode Empiris Eksperimental.
6. Metode Transendental.
7. Metode Dialektis.
8. Metode Fenomenologis.
9. Metode Eksistensialisme.
10. Metode Analitik Bahasa.

Untuk memahami filsafat dengan definisi serta metode yang beragam di atas, ada beberapa ciri yang menghubungkannya, yaitu filsafat bersifat *universal, radikal, sistematis, deskriptif, kritis analitis evaluatif, dan spekulatif*.

Di antara fungsi filsafat membentuk ilmuwan lebih arif



dan bijaksana dalam mengarungi kehidupan dan mereka akan bertindak berdasarkan keyakinan. Hal ini akan memperluas keinsyafan melalui filsafat, manusia akan sadar atas kemampuan, kekurangan, keunggulan, dan kelemahannya.⁶

Selanjutnya, yang termasuk dalam cabang filsafat di antaranya:

1. Epistemologi
2. Etika
3. Estetika
4. Metafisika
5. Politik
6. Filsafat Agama
7. Filsafat Ilmu
8. Filsafat Pendidikan
9. Filsafat Hukum
10. Filsafat Sejarah
11. Filsafat Matematika

D. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENGETAHUAN, ILMU, DAN FILSAFAT

Pada hakikatnya pengetahuan, ilmu, dan filsafat memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia. Ketiganya adalah pengetahuan untuk memecahkan problematika yang ada dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada manusia. Adapun perbedaannya adalah terletak pada metode, sifat, dan kegunaannya masing-masing.

⁶ Untuk memahami masalah filsafat lebih perinci bisa dibaca buku-buku yang membahas tentang filsafat umum atau pengantar filsafat, seperti Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Filsafat Umum, Ilmu, Filsafat, dan Agama* oleh Endang Saifuddin Anshan, Gerard Beekman dengan karyanya *Filsafat, para filsuf, berfilsafat*, dan buku-buku lain.



Namun cukup penting dicatat bahwa filsafat merupakan induk dari semua cabang ilmu. The Liang Gie mengutip Francis Bacon dalam bukunya *Pengantar Filsafat Ilmu*, mengatakan bahwa filsafat adalah *the great mother of sciences*.

Bahwa tidak jarang bahasa Indonesia menyamakan arti pengetahuan dan ilmu, bahkan dari kedua kata itu muncul kata majemuk 'ilmu pengetahuan'. Pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), ilmu disamakan saja artinya dengan pengetahuan dan pengetahuan adalah ilmu.⁷ Padahal, ilmu dan pengetahuan berbeda. Hal ini dijelaskan dalam kamus Inggris-Indonesia oleh Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, bahwa *knowledge* artinya pengetahuan, misalnya *his knowledge as tounds me* (pengetahuannya mengagumkan saya). Adapun *science* artinya ilmu (pengetahuan), misalnya *science of language* (ilmu pengetahuan bahasa).⁸

Demikian halnya dalam bahasa Arab disebutkan dalam kamus *A Dictionery of Modern Written Arabic* oleh Hans Wehr (edited by J. Milton Cowan) kata *arf* diberi makna *fragrance, perfume, scent*, aroma, (artinya bau wangi atau harum). Adapun *ulum* jamak daripada *ilm*; *science* (ilmu).⁹

Pengetahuan (*knowledge*) adalah sesuatu yang diketahui, yang mana diketahui bisa apa saja tanpa syarat tertentu. Bisa sesuatu yang didapat dengan kebetulan atau metode ilmiah. Ilmu bisa dimasukkan salah satu pengetahuan namun pengetahuan belum tentu ilmu.¹⁰ Ilmu (*science*, '*ilm*') adalah

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 579.

⁸ John M. Echols dari Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1994), hlm. 674.

⁹ Hans Wehr, *A Dictionery of Modern Written Arabic*, ed. By J. Millton Cowan, (Beirut: Libran Du liban, 1980), hlm. 356.

¹⁰ Djohansjah Marzoeqi, *Budaya Ilmiah dan Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Grafindo, 2000), hlm. 9.



suatu bidang studi atau pengetahuan yang sistematis untuk menerangkan suatu fenomena dengan acuan materi dan fisiknya melalui metode ilmiah. Ilmu bukanlah mistik, kepercayaan atau dongeng, tetapi didapat dengan metode ilmiah yang baku.¹¹

Ada juga berpendapat ilmu sebagai “*a means of solving problems*” (suatu cara yang bisa digunakan menyelesaikan masalah).¹² The Liang Gie membedakan ilmu menjadi dua pengertian: *Pertama*, ilmu sebagai proses yang merupakan penelitian ilmiah. *Kedua*, ilmu sebagai prosedur yang mewujudkan metode ilmiah. Dari proses dan prosedur itu pada akhirnya keluar produk berupa pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*). Maka perpaduan antara proses dan prosedur ini dikatakan The Liang Gie sebagai pengertian ilmu yang ketiga.¹³

Merujuk pada beberapa definisi di atas tentang pengetahuan, ilmu, penulis mengambil kesimpulan bahwa pertama-tama manusia mengetahui dengan modal intelek dan pancaindra yang dimilikinya. Ketika pengetahuannya diperdalam dan disistematisasi, maka pengetahuan menjadi ilmu. Namun selanjutnya ilmu juga pengetahuan yang kualitasnya sudah berbeda dengan yang pertama. Secara manual dapat diilustrasikan sebagai berikut:

“Manusia \Rightarrow Pengetahuan \Rightarrow Ilmu \Rightarrow Pengetahuan.”

¹¹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

¹² Jhon Ziman FRS, *An Introduction to Science Studies, The Philosophical and Social Aspects of Science and Technology*, (New York: Cambridge University Press, 1984), hlm. 1.

¹³ The liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Cet. II, (Yogyakarta: Penerbit liberty, 1996), hlm. 119.



SAMPLE

2

PENELITIAN DAN JENIS-JENISNYA

A. PENDAHULUAN

Penelitian merupakan bagian yang cukup menentukan dan memegang peranan penting dalam kerangka kerja ilmiah. Institusi penelitian apa pun yang tidak memprioritaskan penelitian dapat dipastikan bahwa institusi tersebut akan mengalami stagnasi dan kemandekan dalam penemuan-penemuan baru dalam dunia ilmiah, bahkan diindikasikan akan ketinggalan dengan perkembangan penemuan-penemuan baru ilmu pengetahuan.

Selain manfaat dalam perkembangan ilmu, penelitian juga berfungsi sebagai alat instrumental dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik itu politik, sosial, ekonomi, keagamaan, dan sebagainya. Melalui pendekatan tersebut setidaknya akan teridentifikasi faktor-faktor, latar belakang berbagai persoalan yang berkembang sampai berujung pada mencari jalan solusinya.

Suatu hal yang menarik untuk dicermati bahwa belakangan ini perkembangan dalam bidang penelitian mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan bermunculannya

lembaga-lembaga penelitian yang objek penelitiannya bervariasi khususnya pada negara-negara berkembang sehingga mengalokasikan dana untuk penelitian yang tidak sedikit.

Terlebih lagi pada negara-negara maju Amerika Serikat misalnya menggunakan 0,27 persen dari total pendapatan negara untuk kepentingan penelitian antara tahun 1940-1944, dan meningkat menjadi 1 persen antara di tahun 1953 dan naik lagi menjadi 1,3 persen di tahun 1955. Di tahun 1953, Amerika Serikat telah menggunakan 3,5 miliar dollar untuk penelitian. Kira-kira 60 persen dibiayai oleh pemerintah dari 35 persen oleh industri swasta dan selebihnya oleh instansi dan lembaga lainnya.¹⁴

B. PENGERTIAN PENELITIAN

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. Ada juga ahli yang menerjemahkan *research* sebagai *riset*. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti "kembali"; dan *to search* yang berarti "mencari kembali" menurut kamus *Webster's New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.

Banyak para ilmuwan terkemuka yang memberikan tanggapan tentang definisi penelitian, di antaranya:

- a. Hillway (1956)¹⁵ dalam bukunya yang berjudul *Introduc-*

¹⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998), hlm. 28.

¹⁵ T. Hillway, *Introduction to Research*, (Houghton Iniffin Co., 1956), hlm. 56.



tion to Research mengatakan, bahwa penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap permasalahan tersebut.

- b. Whitney (1960) dalam bukunya *The Element of Research* menyatakan, di samping untuk memperoleh kebenaran, kerja menyelidik harus dilakukan secara sungguh-sungguh dalam waktu yang lama. Sehingga penelitian itu adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian dilakukan terhadap masalah-masalah yang dipecahkan.
- c. John (1949), penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.
- d. Dewey (1936) penelitian adalah transformasi yang terkontrol atau terarah dari situasi yang dikenal dalam kenyataan-kenyataan dan hubungannya, seperti mengubah unsur dari situasi orisinal menjadi suatu keseluruhan yang bersatu padu.

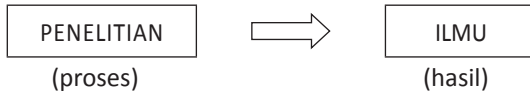
C. ILMU, PENELITIAN, DAN KEBENARAN

Tidak dapat diragukan, bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisasi. Dapat dipahami pengertian penelitian yaitu suatu penyelidikan yang hati-hati dan teratur serta terus-menerus untuk memecahkan suatu permasalahan, dari berpikir reflektif sebagai suatu proses dalam memecahkan suatu persoalan. Selanjutnya, muncul pertanyaan bagaimanakah hubungan antara ilmu, peneliti-

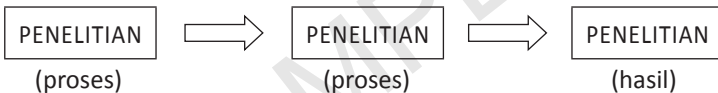


an, dan berpikir reflektif?

Ilmu dan penelitian mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut Almack (1930), hubungan antara ilmu dan penelitian adalah seperti hasil dan proses. Penelitian adalah proses, sedangkan hasilnya adalah ilmu.



Adapun Whitney (1960), berpendapat bahwa ilmu dan penelitian adalah sama-sama proses, sehingga ilmu dan penelitian adalah proses yang sama. Hasil dan proses tersebut adalah kebenaran (*truth*).¹⁶



Selanjutnya, bagaimana pula hubungan antara berpikir, penelitian, dan ilmu? Konsep berpikir, ilmu, dan penelitian adalah sama. Berpikir sama halnya dengan ilmu, juga merupakan suatu proses untuk mencari kebenaran. Proses berpikir adalah suatu refleksi yang hati-hati dan teratur. Di dalam sejarah perkembangan berpikir manusia ternyata yang dikejar itu adalah esensinya, yaitu pengetahuan yang benar, atau secara singkat disebut kebenaran.

Pengetahuan yang benar atau kebenaran dapat diperoleh dari dua pendekatan, yaitu pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah.

¹⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 16.



1. Pendekatan Ilmiah

Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun di atas teori tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan data empiris. Teori dapat diuji dalam hal kemantapan internalnya. Artinya, jika penelitian ulang dilakukan orang lain menurut langkah-langkah yang serupa pada kondisi yang sama akan diperoleh hasil yang konsisten, yaitu hasil yang sama atau hampir sama dengan hasil yang terdahulu.

Langkah-langkah penelitian yang teratur, terkontrol, dan terpolakan sampai batas tertentu, diakui secara umum. Pendekatan ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang serupa bagi hampir setiap orang, karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi, pengaruh dari perasaan. Cara penyimpulannya bukan subjektif melainkan objektif.

Dengan pendekatan ilmiah peneliti berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa yang menghendaki untuk mengujinya.

2. Pendekatan Non-Ilmiah

Ada beberapa pendekatan non-ilmiah yang banyak digunakan, yaitu akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan dari coba-coba, pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis.¹⁷

¹⁷ Sumardi Suryasubrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 3.



D. JENIS-JENIS PENELITIAN

Dalam suatu penelitian penggolongan jenis dan bentuk suatu penelitian ditentukan pada klasifikasi pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan penelitian tersebut. Tetapi setidaknya, secara umum dapat dicatat jenis-jenis penggolongannya sebagai berikut:¹⁸

1. Dari sudut sifatnya:
 - a. Penelitian yang bersifat *eksploratif* (penjajakan atau penjelajahan).

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala tertentu. Penelitian eksploratif umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti, atau bahkan belum ada sama sekali. Kadang-kadang penelitian eksploratif oleh sebagian orang diabaikan, karena tidak mempunyai nilai ilmiah. Pendapat yang demikian sebenarnya tidak beralasan, sebab penelitian eksploratif merupakan tahap awal dari penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Penelitian yang bersifat *deskriptif*

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini terkadang berawal dari hipotesis,

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 25.



tetapi juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif.

- c. Penelitian yang bersifat eksplanatif (menerangkan).

Penelitian eksplanatif bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Dengan demikian, penelitian eksplanatif baru dapat dilakukan apabila informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu.

2. Dari sudut bentuknya:

- a. Penelitian diagnostik, merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu.
- b. Penelitian perspektif, dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
- c. Penelitian *evaluatif*, pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

3. Dari sudut tujuannya:

- a. Penelitian *fact finding*.
- b. Penelitian *problem identification*.
- c. Penelitian *problem solution*.

Ketiga penelitian di atas, pada dasarnya merupakan penelitian yang berkelanjutan, di mana penelitian *fact*



finding merupakan langkah awal untuk menemukan faktanya, kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah (*problem finding*), untuk selanjutnya menuju kepada mengidentifikasi masalah (*problem identification*), dan akhirnya penelitian untuk mengatasi masalah (*problem solution*).

4. Dari sudut penerapannya:
 - a. Penelitian dasar/murni atau penelitian untuk pengembangan ilmu adalah pencarian terhadap hasil sesuatu karena ada perhatian dan ketidaktahuan terhadap hasil suatu aktivitas.
 - b. Penelitian yang berfokuskan masalah.
 - c. Penelitian terapan (*aplicated research, praktikal research*) adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematis, dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu.
5. Dari sudut bidangnya meliputi penelitian pendidikan, sejarah, bahasa, ilmu teknik, biologi, dan ekonomi.
6. Dari sudut tempatnya meliputi penelitian laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya.¹⁹

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1973), hlm. 3.



3

METODE ILMIAH

A. PENGERTIAN KERANGKA BERPIKIR ILMIAH

Dalam bingkai ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari proses cara mendapatkan ilmu itu sendiri. Upaya yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentunya dilakukan secara ilmiah dan rasional. Kajian yang cukup mendalam mengenai ilmu pengetahuan pada prinsipnya telah dibahas dalam disiplin filsafat ilmu yang membahas ilmu secara luas. Paling tidak ada tiga komponen yang harus muncul dalam filsafat ilmu, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi yang mana ketiganya mempunyai peran penting dalam melihat eksistensi suatu ilmu.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang akurat dan terukur dibutuhkan metode yang ilmiah pula dalam menjelajahi ilmu tertentu. Dengan kata lain, metode ilmiah tidak dapat terlepas dari suatu proses penjelajahan dari pencarian ilmu.

Metode menurut Senn merupakan suatu prosedur atau

cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²⁰ Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode itu.²¹ Jadi, metodologi ilmiah merupakan pengkajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah.

Seperti diketahui, berpikir adalah kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran.²² Dengan cara bekerja ini, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah, yaitu sifat rasional dan teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan.

Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat diuraikan dalam beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah yang berintikan proses *logico-hypothetico-verifikasi* ini pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Perumusan masalah* yang merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya.
2. *Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis* yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun secara

²⁰ Peter R. Senn, *Social Science and Its Methods*, (Boston: Holbrook, 1971), hlm. 4.

²¹ *Ibid.*, hlm. 6.

²² T.H. Huxle. "The Method of Scientific Investigation", *Science: Method and Meaning*, ed. Samuel Rapport dan Helen Wright, (New York: Washington Square Press, 1964), hlm. 2.



rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan.

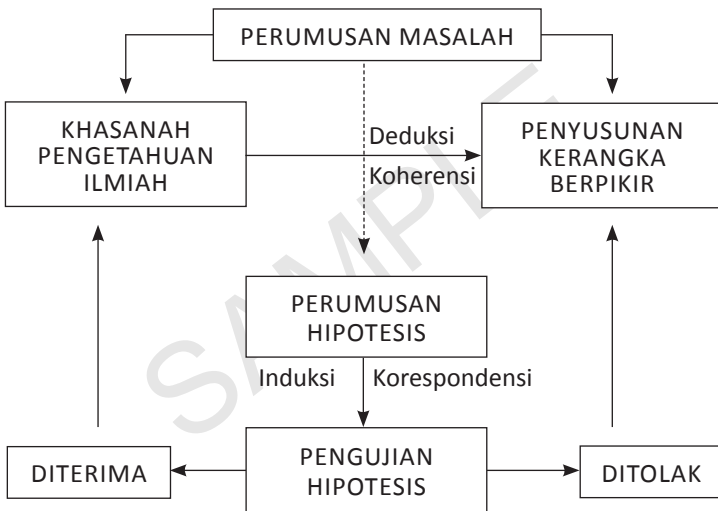
3. *Perumusan hipotesis* yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan.
4. *Pengujian hipotesis* yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak.
5. *Penarikan kesimpulan* yang merupakan penilaian apakah suatu hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima sekiranya dalam proses pengujian pendapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya, sekiranya dalam proses pengujian tidak terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah sebab telah memenuhi persyaratan keilmuan, yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya serta telah teruji kebenarannya. Pengertian kebenaran di sini harus ditafsirkan secara pragmatis, artinya bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya.

Keseluruhan langkah ini harus ditempuh agar suatu penelitian dapat disebut ilmiah. Meskipun langkah-langkah ini secara konseptual tersusun dalam urutan yang teratur, di mana langkah yang satu merupakan landasan bagi langkah-langkah berikutnya, namun dalam praktiknya sering terjadi lompatan-lompatan. Hubungan antara langkah yang



satu dengan langkah yang lainnya tidak terikat secara statis melainkan bersifat dinamis dengan proses pengkajian ilmiah yang tidak semata mengandalkan penalaran, tetapi juga imajinasi dan kreativitas. Sering terjadi langkah yang satu dengan langkah berikutnya bukan saja merupakan landasan melainkan sekaligus juga merupakan landasan koreksi bagi langkah yang lain.

Adapun kerangka metode ilmiah dapat dilihat pada skema di bawah ini:



SKEMA METODE ILMIAH

B. KRITERIA METODE ILMIAH

Supaya suatu metode yang digunakan dalam suatu penelitian dinamakan dengan metode ilmiah, maka ia harus memiliki sejumlah kriteria, yaitu: ²³

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 43.



1. Berdasarkan fakta

Keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang akan dikumpulkan dan yang akan dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta dan bukan merupakan penemuan atau pembuktian yang didasarkan pada daya khayal, kira-kira, legenda, atau kegiatan sejenis.

2. Bebas dari prasangka

Metode ilmiah harus memiliki sifat bebas dari prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan-pertimbangan subjektif. Menggunakan suatu fakta harus dengan alasan atau bukti lengkap dan pembuktian yang objektif.

3. Menggunakan prinsip analisis

Dalam memahami serta memberi terhadap fenomena yang kompleks harus menggunakan prinsip analisis. Semua masalah harus dicari dan ditemukan sebab musabab serta pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis. Fakta yang mendukung tidak dibiarkan sebagaimana adanya atau hanya dibuat deskripsinya. Akan tetapi, semua kejadian harus dicari sebab akibat dengan menggunakan analisis yang tajam.

4. Menggunakan hipotesis

Dalam metode ilmiah, peneliti harus dituntut dalam proses berpikir dengan menggunakan analisis. Hipotesis harus mengakumulasi permasalahan serta memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat. Hipotesis merupakan pegangan yang khas dalam menuntun jalan pikiran peneliti dengan tolok ukur sebagai berikut.

5. Menggunakan ukuran objektif

Kerja penelitian dan analisis harus dinyatakan dengan ukuran yang objektif. Ukuran tidak boleh dengan merasa



atau mengikut hati nurani. Pertimbangan-pertimbangan harus dibuat secara objektif dari dengan menggunakan pikiran yang sehat.

6. Menggunakan teknik kualifikasi

Dalam memperlakukan data ukuran kuantitatif yang lazim harus digunakan, kecuali untuk atribut-atribut yang tidak dapat dikuantifikasi. Ukuran-ukuran seperti ton, kilogram, milimeter per detik, ohm, dan sebagainya harus selalu digunakan. Oleh karena itu, harus dihindari ukuran-ukuran misalnya: sejauh mata memandang; sehitam aspal; dan sejauh sebatang rokok. Kualifikasi yang termudah adalah dengan menggunakan ukuran nominal, *ranking*, dan *rating*.

C. BEBERAPA LANGKAH DALAM METODE ILMIAH

Dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah sekurang-kurangnya dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:²⁴

1. Merumuskan serta mendefinisikan masalah.

Langkah pertama dalam meneliti yaitu dengan menetapkan masalah yang akan dipecahkan, untuk menghilangkan keragu-raguan masalah itu harus didefinisikan secara jelas, termasuk cakupan atau lingkup masalah yang dipecahkan. Dalam hal ini, seyogianya disebutkan beberapa kata kunci (*key words*) yang terdapat dalam masalah, misalnya sejauh mana pengaruh narkoba terhadap pemuda-pemudi di kota Medan?

2. Mengadakan studi kepustakaan.

Setelah masalah dirumuskan, langkah kedua yang dila-

²⁴ *Ibid.*, hlm. 47-50.



kukan dalam mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya di mana ada kaitannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.

3. Memformulasikan hipotesis.

Setelah diperoleh informasi mengenai penelitian ahli lain yang terkait dengan masalah yang ingin dipecahkan, maka selanjutnya peneliti memformulasikan hipotesis-hipotesis untuk penelitian.

4. Menentukan modal untuk menguji hipotesis.

Setelah hipotesis ditetapkan (dirumuskan), maka selanjutnya merumuskan cara-cara untuk menguji hipotesis. Pada bidang ilmu-ilmu sosial yang telah lebih berkembang, misalnya ilmu ekonomi, pengujian hipotesis didasarkan pada kerangka analisis (*analytical framework*) yang telah ditetapkan.

5. Mengumpulkan data.

Peneliti memerlukan data untuk menguji hipotesis. Data yang merupakan fakta tersebut digunakan untuk menguji hipotesis. Adapun teknik pengumpulan data dikenal bermacam-macam, tergantung pada masalah yang dipilih serta metode penelitian yang akan digunakan.

6. Menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi.

Setelah data terkumpul, peneliti menyusun data untuk mengadakan analisis. Sebelum analisis dilakukan, data tersebut disusun terlebih dahulu untuk mempermudah analisis. Penyusunan data dapat dalam bentuk tabel ataupun dengan membuat *coding* untuk analisis dengan menggunakan komputer. Kemudian dilakukan interpretasi terhadap data (yang tersaji).



7. Membuat generalisasi dan kesimpulan.

Setelah tafsiran diberikan, maka peneliti membuat generalisasi dari temuan-temuannya dan selanjutnya memberikan beberapa kesimpulan. Generalisasi dari kesimpulan ini harus berhubungan dengan hipotesis yang ada. Dalam arti, apakah hipotesis benar dapat untuk diterima atau ditolak.

8. Membuat laporan ilmiah.

Langkah akhir dari suatu penelitian ilmiah yaitu membuat laporan ilmiah tentang hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian tersebut. Secara teknis, penulisan laporan ilmiah ini juga mengikuti aturan ataupun teknik yang ada.

D. UNSUR-UNSUR DALAM PROSES KEILMUAN

Proses keilmuan secara ringkas sebagai suatu proses yang melibatkan lima komponen informasi utama yang di-transformasi dari satu komponen ke komponen yang lain dan dikendalikan oleh enam perangkat metode. Namun secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

Pada tahap awal orang (peneliti) bekerja untuk melakukan pengamatan-pengamatan dengan memperoleh hasil yang disebut dengan hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini bersifat individual, sangat spesifik, bersifat khusus dan tentu saja berwujud sejumlah butir-butir informasi yang bernilai istimewa. Hasil pengamatan ini haruslah disintesis ke dalam suatu format yang bersifat lebih umum, dan disebutkan dengan *generalisasi empiris*. Generalisasi yang demikian dicapai melalui pengukuran-pengukuran, peringkasan sampel, dan memperkirakan parameter.

Pada tahap berikutnya, generalisasi empiris ini juga me-



rupakan butir-butir informasi yang dapat disintesis lebih lanjut ke dalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi-proposisi. Suatu teori, atau penyusunan suatu tipe informasi yang paling bernilai umum dan abstrak dapat ditransformasi lebih lanjut ke dalam sejumlah hipotesis baru melalui metode logika yang disebut deduksi. Hipotesis-hipotesis ini agar dapat dimanfaatkan lebih lanjut harus terlebih dahulu dibenahi menjadi *hipotesis empiris*.

Adapun yang disebut dengan hipotesis empiris adalah suatu butir informasi yang dapat ditransformasi ke dalam sejumlah hasil informasi melalui penafsiran ke dalam sejumlah hasil informasi melalui penafsiran ke dalam konsep-konsep yang bersifat operasional (merujuk ke gejala-gejala yang akan diamati), pembuatan instrumen-instrumen pengamatan, pembuatan skala, dan penetapan sampel.

Apabila setelah semua langkah ini dikerjakan, dan seorang (peneliti) memperoleh hasil-hasil observasi baru, maka ia dapat mentransformasi lagi hasil-hasil observasi ini ke dalam generalisasi-generalisasi empiris yang baru (yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan sampel, dan perkiraan parameter). Pada tahap ini hipotesis yang semula menjadi bidang penyebab dikerjakannya penemuan generalisasi-generalisasi empirik tersebut. Dapat dikaji kembali untuk menjawab pertanyaan apakah sudah sesuai dengan generalisasi empiris yang ditemukan itu.

Kesesuaian hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar atau tidaknya hipotesis. Artinya, didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi (yang telah disintesis). Pengujian yang demikian kemungkinan untuk menghasilkan suatu informasi baru, yaitu suatu ke-



putusan untuk menerima atau menolak kebenaran hipotesis yang sedang diuji itu. Pada akhirnya keputusan ini yang akan menentukan apakah suatu teori akan dikukuhkan (memperoleh informasi), diubah, atau dibenarkan kembali (termodifikasi), atau bahkan tidak.

Dengan demikian, proses yang dipaparkan ditandai dengan:²⁵

1. Terkadang berlangsung dengan cepat dan dapat selesai dalam jangka waktu pendek, akan tetapi kadang-kadang tidak demikian juga.
2. Terkadang terkesan dikerjakan sangat formal dengan menaati segala macam ketentuan prosedural secara formal, akan tetapi terkadang pula berlangsung secara sangat informal, tidak disadari, bahkan secara intuitif.
3. Terkadang dikerjakan melalui interaksi sekian banyak ilmuwan yang masing-masing mengambil peranan yang berbeda-beda, sebagai teoretisi direktur penelitian, wawancara, ahli penyampelan, ahli analisis data, dan sebagainya. Akan tetapi, terkadang pula dikerjakan seorang diri oleh seorang ilmuwan peneliti tanpa bantuan rekan/teman.
4. Terkadang dikerjakan semata-mata dalam khayalan si ilmuwan, akan tetapi terkadang juga dikerjakan secara faktual dalam kenyataan.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa sekalipun proses-proses keilmuan itu digambarkan sebagai suatu proses yang berlangsung secara prosedural, beraturan, dan tampak selalu sistematis, namun dalam pelaksanaannya tidak dimaksudkan untuk selalu dikerjakan dengan terlalu ketat dengan tan-

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 60.



pa mempertimbangkan fleksibilitas.

Selanjutnya dalam proses pendekatan ilmiah tersebut berlaku beberapa asumsi dan batasan-batasan sebagai berikut:²⁶

1. Terdapatnya keteraturan (*regulanty*) dari urutan (*order*) dalam proses kejadian dalam kenyataan. Seorang ilmuwan pemikirannya tidak berpola pada kejadian-kejadian yang tidak teratur, baik mengenai bentuk susunan maupun sifat-sifatnya, karena kejadian-kejadian seperti itu akan sulit dipelajari.
2. Terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan tergantung dari kejadian lain yang mendahuluinya (*antecedent event*). Tidak ada kejadian tanpa sebab. Asumsi ini disebut dengan *determinism*. Untuk menjelaskan *determinism* tersebut diperlukan keterangan-keterangan yang rasional. Lazimnya bersifat probabilistik atau stokastik (*stochastic*), yaitu berlaku atas dasar teori perhitungan kemungkinan. Menurut pemikiran ini, suatu kejadian tidak mutlak terjadi atau tidak mungkin tidak terjadi. Biasanya kejadian itu kemungkinan terjadinya dapat dinyatakan di antara: 0-100%, yaitu di antara kemustahilan dan kepastian. Demikian pula hubungan antara dua atau lebih kejadian, selalu dinyatakan berada dalam batas-batas kemungkinannya.
3. Adanya kontinuitas dalam proses penelitian. Hal-hal yang terjadi yang menjadi masalah dan belum terpecahkan sekarang tentu akan dapat diselesaikan atau dijelaskan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan perlunya pengertian tentatif terhadap fenomena alam dan sosial,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 64.



karena akan mungkin koreksi dari penyempurnaan di kemudian hari secara kronologis melalui kejadian-kejadian empiris. Kejadian itu disebut sebagai *discoverability* dan *vanability* dalam penelitian dari pengembangan ilmu pengetahuan.

4. Pengetahuan yang didapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan. Untuk itu perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a. Hasil-hasil pengamatan harus dapat dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan yang jelas dari objektif, menggambarkan sedapat mungkin kejadian yang senyatanya.
 - b. Peneliti harus menunjukkan kejujuran dari sportivitasnya, tidak mengakui hak karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya tanpa sepengetahuan atau seizin yang bersangkutan dalam penulisan-penulisan.
 - c. Seorang ilmuwan harus berpartisipasi aktif dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan menurut tata laksana dari kode etik yang ada.



4

HUKUM DAN METODE BAHASANNYA

Perang Dunia Kedua yang menyejarah dalam catatan peperangan dunia tidak saja berimplikasi hanya kepada dimensi kekuasaan, tetapi juga memberikan dampak pengaruh kepada dimensi-dimensi kehidupan lainnya. Satu bagian dari dimensi tersebut adalah hukum, yang setidaknya mengalami perkembangan dalam berbagai bagiannya sebagai berikut:²⁷

1. Profesi hukum yang ruang lingkup kerjanya kini semakin meluas dibandingkan dengan waktu sebelumnya, terutama karena pihak-pihak yang memerlukan pelayanan hukum semakin membesar jumlah dan lingkup masalahnya, serta meliputi semua lapisan masyarakat.
2. Hukum yang bagi kebanyakan orang semula dipandang tidak lebih dari sekumpulan undang-undang dan hanya merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang undang-undang atau peraturan-peraturan, sekarang telah menjadi suatu (disiplin) ilmu yang dirasakan

²⁷ Adam Podgorecki dan Chnstopher j. Whelan, (ed.), *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 6, dalam Bambang Sunggono, *Metodologi ...*, hlm. 67.

“baru”, karena ilmu hukum sekarang telah dikembangkan menjadi lebih sistematis serta memiliki kelengkapan metode penelitian, dari pemahaman yang lebih luas dan rumit.

Sebagai akibat dari perkembangan tersebut, maka kini para ahli hukum akan bertemu dan bergelut dengan sejumlah permasalahan yang menuntut suatu cara analisis yang berbeda dengan cara-cara pendekatan yang masih bercorak tradisional.

Hingga kini masih terlihat adanya perbedaan dari keragaman dalam hal “kaca penglihatan” dari “gambar tampilan” orang mengenai hukum, dan metode-metode kajian yang dipakai. Dalam kenyataannya, adanya keragaman dalam metode pengkajian serta penelitian hukum justru merupakan potensi modal yang besar untuk turut serta menumbuhkan kembangkan khazanah ilmu hukum itu sendiri.

Pilihan mengenai metode kajian ini tidak dapat dipisahkan dari penglihatan (pengkaji) mengenai hakikat hukum. Dengan kata lain, adanya keragaman seperti ini tentu tidak terlepas dari adanya keragaman dalam konsep-konsep pemahaman hukum,²⁸ sementara itu, hukum dikonsepsi dalam beberapa ragam makna. Dengan demikian, sebenarnya terlibat adanya suatu kaitan yang erat antara pandangan filsafat seseorang dengan metode yang dipilih dan digunakan. Hal demikian cara objektif berkonsekuensi. Terdapat kebebasan untuk memilih bagi seseorang untuk menggunakan suatu metode kajian yang paling sesuai dengan pilihannya, asalkan pilihannya itu kemudian diterapkan dengan konsisten. Dengan permasalahan yang demikian, sebenarnya membawa perlibatan ke dalam permasalahan metodologi.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 4-6.



Dalam kaitan ini, Satjipto Raharjo menguraikan beberapa metode kajian hukum, yaitu:²⁹

1. Apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat idealis. Metode ini akan senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Salah satu pemikiran utama dalam hukum yang sudah berjalan berabad-abad lalu adalah yang berusaha untuk memahami arti dari keadilan. Pemikiran ini membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai tersebut dari apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum untuk mewujudkan nilai tertentu. Inilah salah satu contoh dari *metode ideologis* tersebut.
2. Apabila seseorang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subjek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut. Pemusatan perhatian yang demikian ini akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normatif dalam menggarap hukum. Sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitis, maka metode ini disebut sebagai *normatif analitis*.
3. Apabila seseorang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Berbeda dengan metode-metode sebelumnya, maka metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan

²⁹ *Ibid.*



serta memahami kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas hukum.

Sejalan dengan itu, menurut Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan perkembangan kajian hukum dalam lintasan sejarah dapat dibagi kepada tiga bagian.³⁰

A. METODE KAJIAN HUKUM YANG DIKONSEPSIKAN SEBAGAI ASAS MORAL

Konsep ini menekankan pada dimensi moral dari filosofis, yang melahirkan cabang-cabang kajian hukum yang sangat moralistik. Apabila hukum dikonsepkan sebagai asas-asas belaka; pedoman-pedoman untuk situasi konkret guna mengatur perilaku-perilaku dalam masyarakat masih harus dicari dan ditetapkan, dari kasus ke kasus, dan segala prosesnya yang tak terelakkan lagi akan berlangsung melalui si-logisme deduksi.

Proses penalaran induksi bukannya sama sekali tidak dikenal, melainkan, seperti hanya modul bernalar mencari kebenaran pada masa-masa prasaintifik (sebelum abad berkembangnya logika), deduksi itu yang paling banyak diterapkan. Dengan asumsi bahwa premis-premis yang digunakan selalu sudah *self evident*. Sementara itu, proses induksi yang digunakan untuk menemukan kebenaran-kebenaran material proposisi dalam premis hanya merupakan tambahan atas sekadar pelengkap apabila diperlukan saja, misalnya dalam usaha bantuan mencari dari menegaskan manakah

³⁰ Soetndyo Wignjosoebroto, "Hukum dan Metode-metode Kajiannya", (Jakarta: BPHN), hlm. 41, dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 71.



asas moral yang berlaku secara umum dan sesungguhnya dapat diperlakukan sebagai hukum.

B. METODE KAJIAN HUKUM POSITIF

Dalam konsep ini, pada prinsipnya tidak saja Agustian yang mempunyai otoritas untuk dirujuk dalam kajian hukum positif. Tetapi bagi aliran *pragmatik-realis* dan yang *neo-kantian* atau kantian atau *kelsenian* yang melahirkan kajian-kajian ilmu hukum positif.

Metode kajian hukum positif ini meliputi usaha-usaha sebagai berikut:

1. Metode survei, yaitu usaha koleksi data dalam jumlah besar. Usaha koleksi yang demikian ini sejajar benar dengan usaha atau kerja sensus atau usaha inventarisasi, yang menyeluruh atas data yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di dalam suatu masyarakat, tidak hanya peraturan perundangan akan tetapi juga yang berupa keputusan-keputusan lembaga peradilan dalam setiap penyelesaian perkara *in concreto*.
2. Usaha untuk melengkapi isi sistem, tidak hanya dengan kaidah-kaidah positif, tetapi juga dengan asas-asasnya. Berkaitan dengan kegiatan ini, kajian hukum secara positivistik ini mengenal juga metode induksi, yang digunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui usaha koleksi dari inventarisasi. Hal ini disebabkan karena peraturan dari perundang-undangan tidak selalu lengkap tersusun secara sistematis.
3. Metode induksi, dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan



suatu permasalahan tertentu. Penalaran yang benar-benar konform dengan silogisme-silogisme logika formal (deduktif) yang telah dikenal dan banyak dikembangkan sejak zaman peradaban Yunani Kuno. Dalam proses penalaran deduktif ini, kaidah-kaidah positif akan berfungsi sebagai premis mayor dalam struktur silogisme dengan catatan bahwa kebenaran materiel dari premis-premis ini tidak perlu dipermasalahkan. Dari konklusi yang ditarik untuk menangani atau menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Dengan kata lain, bahwa dalam kasus peraturan perundangan, putusan pengadilan, dan asas-asas hukum pernah dilakukan penarikan secara induktif.

C. METODE KAJIAN HUKUM YANG DIKONSEPSIKAN SOSIOLOGIS

Dalam kaitan hukum dan sosiologi merupakan perkembangan ilmu yang tidak dapat dihindarkan dengan terjadinya persentuhan kedua disiplin dalam realitasnya di lapangan. Hubungan antara teori hukum dan teori sosiologis dapat menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda. Akan tetapi, suatu penelitian terhadap teori sosiologi yang dilakukan seorang ahli ilmu hukum memerlukan suatu perhatian khusus.

Banyak permasalahan yang berkaitan dengan masalah hukum dapat dijawab secara positif dengan cara mempelajari hukum sebagai suatu *social phenomena*. Selain itu, eksplorasi merupakan sesuatu yang cukup penting dalam disiplin hukum yang salah satu tugas utama studi sosial baik itu sosiologis maupun antropologi dalam bidang hukum. Teori-teori



umum tentang hukum mengarah pada deskripsi, pengertian penjelasan, dan mengarah kepada prediksi mengenai variasi-variasi dalam bidang hukum. Melalui perbandingan secara *diakronis* maupun sinkronis tentang pentingnya ilmu sosial dalam bidang hukum, maka studi-studi yang demikian pada dasarnya merupakan suatu usaha ilmiah.

Dengan jalan demikian, maka nantinya akan semakin terlihat kajian-kajian ilmu hukum untuk kepentingan teoretik maupun praktik cenderung untuk mengungkap matramatranya yang struktural, institusional, dan *behavioral*.

Sementara itu, perubahan hukum (teori konsep positivistik ke konsep empiris sosiologis) ini tidak tepat lagi akan berkonsekuensi metodologis yang cukup jauh juga, yaitu tidak terhindarkannya penerapan *metode saintifik* untuk pengkajian dan penelitiannya. Di mana metode ini tampak jelas pertama pada penerapan metode induksi yang sangat mengedepankan untuk menemukan asas-asas umum (*empirical uniformities*) dari teori-teori baik yang miniatur (*inid-dle range*) maupun yang *grand theory*. Kedua ciri ini terlihat pula pada premis-premis itu selalu berupa hasil pengamatan dan verifikasi.³¹

Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perubahan sosial. Teori-teori ini yang kemudian lebih terkenal dengan “*the social theories of law*” dan seluruh kajiannya disistematisasi ke dalam cabang kajian “hukum dan masyarakat” (*law and society*). Penelitian-penelitian empirisnya lazim disebut “*socio legal research*” yang pada hakikatnya merupa-

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 80.



kan bagian dari penelitian sosial atau penelitian sosiologis.

Dengan adanya pendekatan untuk saling berhubungan dan berinteraksi antara ilmu hukum dari ilmu sosial dari waktu ke waktu dalam wujud lintasan dua arah akan memberikan arah yang baik terhadap penelitian dalam kedua disiplin tersebut.

SAMPLE



5

PENELITIAN HUKUM ISLAM NORMATIF

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana ilmu-ilmu lain, ilmu hukum juga menyumbangkan penemuannya yang berdampak luar biasa dalam peradaban manusia, yaitu membantu meletakkan dasar-dasar pemahaman untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Tanpa ketertiban dan keteraturan, manusia akan saling memangsa satu dan lainnya. Peradaban manusia bahkan telah punah jika tidak ada payung hukum yang menaungi eksistensi manusia di muka bumi ini.

Ilmu hukum pada dasarnya termasuk ilmu praktis yang merupakan medan tempat berbagai ilmu bertemu dan berinteraksi (berkonvergensi) yang produk akhirnya berupa penyelesaian masalah secara ilmiah (rasional) dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu praktis terdiri atas ilmu praktis nomologis dan ilmu praktis normologis, sedangkan ilmu hukum termasuk ilmu praktis normologis.³² Ilmu praktis nomologis berusaha memperoleh pengetahuan faktual em-

³² Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 2, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 159-160.

piris, yakni tentang hubungan ajeg yang *carteris paribus* nis-caya berlaku antara dua hal atau lebih berdasarkan asas kau-salitas deterministik. Produknya dapat diungkapkan seperti pada ilmu empiris. Adapun ilmu praktis normologis disebut juga ilmu normatif yang berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imutasi (menaut-kan tanggung jawabn dan kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subjek tertentu dalam situasi konkret.³³ Karya ilmu hukum normatif dimaksudkan untuk mengubah keadaan (*ex ante*), dan melalui analisis terhadap bahan hukum positif ia menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang konkret.³⁴

Pada sisi lain ilmu hukum juga menunjukkan ciri-ciri sebagai ilmu empiris. Sisi empiris ini telah berkembang sedemikian rupa dengan menggunakan metode penelitian sosial, sehingga tanpa ragu orang memasukkannya dalam kerabat ilmu sosial. Konsekuensinya yakni penggunaan format ilmu sosial sebagai ilmu empiris dalam penelitan hukum. Ilmu hu-kum empiris melalui pengolahan terhadap data-data empiris (*ex post*), memiliki kemampuan untuk meramalkan berbagai kemungkinan yang bakal terjadi. Dengan kemampuan ter-sebut, memberikan umpan balik bagaimana mengendalikan proses sosial sesuai semboyan *savoir pour prevoir*. Dengan demikian, ilmu hukum empiris sangat berbeda dari ilmu hu-kum normatif dalam karakter ilmiahnya yang seyogianya da-pat memberikan sinergi yang positif untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat. Meski demikian, sinergi tersebut baru akan memberikan hasil nyata, jika orientasi dan karakter

³³ Yesnil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, t.t.), hlm. 15.

³⁴ Johni, *Teori....*, hlm. 132.



masing-masing ilmu tersebut dipahami secara benar, dalam satu hubungan kesetaraan yang saling menyapa dan saling memberikan umpan balik.³⁵

Penelitian ilmiah merupakan salah satu cara manusia mencari kebenaran. Penelitian secara ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.³⁶ Telaah ilmu hukum tugasnya lebih terarah pada penemuan hukum baru yang diperlukan untuk mengakomodasi timbulnya berbagai hubungan karena adanya dinamika kemasyarakatan yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam posisi tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum adalah metode normatif, yakni metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk menemukan kaidah hukum secara hermeneutis. Oleh karena itu, metode ini merupakan ciri khas tipe penelitian di Fakultas Hukum, untuk membedakan beberapa tipe penelitian hukum yang diajarkan pada fakultas lain yang juga menjadikan hukum sebagai objek penelitiannya, misalnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun demikian, Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip Johni mengingatkan untuk tidak mengabaikan peran ilmu-ilmu sosial sebagai ilmu bantu terhadap analisis hukum positif guna menciptakan keadilan yang menjadi tujuan utama hukum itu.³⁷

³⁵ Johni, *Teori....*, hlm. 132-133.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm. 2-3.

³⁷ Johni, *Teori....*, hlm. 160-164. 7 Manzūr, Lisān, jilid VII. hlm. 86.



Dalam Al-Qur'an disebutkan dua hal berbeda tetapi saling berkaitan yang menjadi tujuan penciptaan manusia oleh Allah, masing-masing mewakili sudut pandang berbeda. Yang pertama dalam Surah *adz-Dzaariyaat* (51):56, tujuan penciptaan manusia menurut sudut pandang hubungannya dengan Allah, Sang Khalik, yaitu mengabdikan atau mengambakan diri kepada-Nya. Kedua dalam Surah *al-Baqarah* (2): 30 dari sudut pandang hubungannya dengan bumi dan makhluk lain yang mendiaminya, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kedua tujuan tersebut terhubung oleh kewajiban hamba untuk patuh memedomani syariat sebagai norma-norma yang dikehendaki-Nya dalam menjalani kehidupan di atas bumi ini, baik sebagai individu maupun kelompok sosial, sebagai salah satu bentuk pengabdian tertinggi kepada Allah. Syariat secara kebahasaan berarti tepian telaga tempat hewan maupun manusia meminum air, yaitu telaga yang memiliki sumber mata air yang jernih, bersih, dan tidak pernah kekeringan.³⁸ Adapun secara terminologi adalah sistem dan hukum-hukum yang disyariatkan Allah atau kaidah-kaidah pokoknya, dan Dia bebaskan kepada seluruh Muslim untuk mereka membawakan diri mereka mematuhi sistem dan hukum-hukum tersebut dalam hubungan mereka dengan Allah dan dalam hubungan mereka dengan manusia.³⁹

Sumber utama syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ﷺ yang berfungsi sebagai dalil-dalil hukum yang harus dikaji dan ditelaah secara kritis, metodologis, dan sistematis untuk menghasilkan istinbat hukum yang bersifat

³⁸ ???.

³⁹ Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*, cet. 17 (Kairo: Dār asy-Syurūq, 1421H/ 2001M), hlm. 73.



amaliah. Ilmu yang menjadikan hukum syariat amaliah sebagai objek kajiannya disebut fikih, sedangkan orang yang ahli di bidangnya ialah fakih. Istibat hukum syariah amaliah dari sumber-sumbernya dilakukan mengikuti metode-metode tertentu yang dikaji dalam ilmu usul fikih. Hukum syariat amaliah yang dihasilkan oleh fikih dengan mengikuti usul fikih belum bersifat mengikat dan memaksa hingga diratifikasi oleh negara dengan konsep undang-undang atau *qanūn*. Namun demikian, nilai-nilai ubudiah uluhiah yang terkandung di dalamnya menumbuhkan kesadaran yang tinggi dalam diri orang-orang yang beriman untuk mengikat diri dengan norma-norma hukum syariat meskipun belum terundang-undangkan, dengan mencari sendiri atau meminta fatwa kepada para *mufti*, yaitu orang-orang yang dipandang ahli dan berkompeten untuk memberi fatwa. Dalam konteks Indonesia, menurut Faisar Ananda, semua itu disebut Hukum Islam, dan dimaknai sebagai hukum-hukum yang bersifat islami atau hukum-hukum yang dipahami oleh para ahli hukum Indonesia yang bersumberkan dari ajaran-ajaran Islam. Hukum Islam ini kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber hukum nasional.⁴⁰

Islam adalah agama universal, syariatnya ditujukan untuk seluruh umat manusia lintas zaman dan kawasan semenjak periode kenabian hingga akhir zaman, sebagaimana dipahami dari berbagai nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah serta pendekatan dalam pembinaan hukum-hukum syariat. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam secara umum—dengan beberapa pengecualian—hanya menyam-

⁴⁰ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hlm. 47.



paikan pokok-pokok ajaran Islam dan prinsip-prinsip dasar yang universal. Penjelasan detail teknis ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah ﷺ umumnya adalah tata cara ibadah ritual yang secara umum bersifat baku yang tidak berbeda dari waktu ke waktu. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah dan perikehidupan bermasyarakat yang dinamis dan terus berkembang, Hadis-hadis yang menjelaskannya secara terperinci lebih bersifat kasuistik yang tidak hanya dapat dipahami sebagai fatwa yang berlaku umum, tetapi juga mengandung kemungkinan untuk ditafsirkan sebagai vonis terbatas untuk kasus dan individu tertentu.⁴¹ Ini berarti, bahwa kebutuhan terhadap penelitian hukum Islam selalu ada.

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut menurut Soerjono dan Sri mencakup; penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁴² Inventarisasi hukum positif dan penelitian hukum klinis menurut Faisar dan Watni juga termasuk kategori ini.⁴³ Ruang penelitian hukum Islam normatif kurang lebih sama hukum normatif konvensional dengan beberapa penyesuaian istilah, kecuali bahwa karena kekhasan hukum Islam yang bersumber dari wahyu maka dalam penelitian hukum Islam normatif juga terdapat penelitian hukum Islam pada ranah sumber, dan penelitian hukum Islam pada ranah doktrin⁴⁴ sebelum menjadi

⁴¹ Indra, *Maqāshid asy-Syari'ah* Menurut Muhammad at-Tāhir Bin 'Āsyūr, tesis (Medan: UIN-SU, 2016) hlm. 89-92.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 3, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hlm. 15.

⁴³ Faisar, *Metodologi...*, hlm. 39, 43.

⁴⁴ Faisar, *Metodologi...*, hlm. 49.



hukum positif. Dalam buku ini dipaparkan masing-masing ruang lingkup penelitian hukum Islam normatif tersebut.

B. INVENTARISASI HUKUM POSITIF

Inventarisasi secara kebahasaan yakni pencatatan atau pengumpulan data tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persuratkabaran, kebudayaan, dan sebagainya. Dengan inventarisasi hukum positif, dalam konteks ini yaitu pengumpulan data tentang hukum-hukum Islam yang telah diratifikasi menjadi hukum positif. Meskipun aktivitas inventarisasi hukum terlihat tidak lebih dari mengumpulkan belaka, sekadar kerja kumpul-mengumpul saja, tetapi hal tersebut pada kenyataannya dilakukan melalui proses identifikasi yang kritis dan analitis juga, dan selanjutnya melalui proses klasifikasi yang logis-sistematis.⁴⁵ Proses yang kritis, analitis, logis, dan sistematis tersebut terbentuk dari keharusan untuk:

1. Terlebih dahulu menemukan dan menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut dan dibedakan sebagai norma hukum positif dari norma-norma sosial lainnya yang non-hukum.
2. Menemukan dan menetapkan kriteria identifikasi norma-norma yang harus disebut sebagai norma-norma hukum Islam.
3. Menguji dan melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif yang berasal dari norma hukum Islam.
4. Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 40.



diidentifikasi dan teruji itu dalam suatu sistematik yang komprehensif.

Aktivitas inventarisasi hukum positif ini analog dengan aktivitas-aktivitas serupa di bidang studi-studi lain yang lazim diakui sebagai proses penelitian atau bagian penting dari suatu proses penelitian, misalnya kegiatan biolog yang melakukan aktivitas ekspedisi untuk mencari dan menemukan *varietas spesies* untuk kemudian didaftar dan diklasifikasi di dalam koleksi.⁴⁶ Oleh karena itu, keberatan terhadap identifikasi inventarisasi hukum positif—dalam hal ini hukum Islam positif—tidak dapat dipertahankan, tentu dengan tidak mengenyampingkan bahwa inventarisasi semacam ini tidak lebih dari salah satu fase saja dalam rangkaian proses suatu penelitian yang tuntas, yang bersifat awal tetapi bernilai penting dan berpengaruh besar terhadap fase-fase berikut dalam rangkaian tersebut.

Sebagai contoh, penelitian hukum Islam normatif berupa inventarisasi hukum Islam yang telah "dipositifkan" serta hukum positif lain yang terkait, oleh Pagar, misalnya telah menghasilkan himpunan peraturan perundang-undangan peradilan agama di Indonesia yang memuat berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan Mahkamah Agung, menteri agama, keputusan menteri agama dengan lembaga negara lainnya serta penjelasan-penjelasan terkait yang diperlukan.⁴⁷

⁴⁶ Faisar, *Metodologi*, hlm. 40.

⁴⁷ Lihat: Pagar, *Himpunan Peraturan-Undang Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010).



C. PENELITIAN HUKUM ISLAM PADA RANAH SUMBER

Berbeda dengan hukum konvensional, hukum Islam sebagai ajaran agama meletakkan sumber hukum primernya pada dua sumber yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Al-Qur'an dipahami sebagai wahyu yang langsung berasal dari kalam Allah sehingga ia menjadi sumber utama,⁴⁸ sedangkan Sunnah yang berupa ucapan, tindakan, atau persetujuan Nabi berfungsi sebagai penegas, bayan atau penjelas, serta pelengkap hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an.⁴⁹

Penelitian hukum Islam pada tataran sumber terhadap Al-Qur'an tidak lagi untuk mengkaji apakah ayat-ayat Al-Qur'an tersebut benar-benar berasal dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ, karena hal tersebut dipandang telah selesai.

Betulkah ayat-ayat Al-Qur'an adalah kalam Allah, meskipun berada pada wilayah yang tidak dapat diteliti dan diuji oleh akal manusia, tetapi pertanyaan ini—jika berangkat dari keraguan—sejatinya telah terpatahkan oleh mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah serta integritas seorang Muhammad ﷺ yang tanpa cela diakui bahkan dikagumi oleh musuh apalagi sahabat-sahabat beliau. Berikutnya ayat demi ayatnya yang dituturkan secara mutawatir dari generasi ke generasi memberi nilai qat'iy as-Subūt bagi Al-Qur'an, tidak ada keraguan bahwa demikianlah disampaikan oleh Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, penelitian hukum terhadap Al-Qur'an sebagai sumber hukum adalah untuk melakukan identifikasi

⁴⁸ Faisar, *Metodologi*, hlm. 47.

⁴⁹ Abdullāh Yūsuf al-Juay', *Taysīr 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh*, (Leeds: Islamic Research Centre, 1997), hlm. 158.



ayat-ayat mana saja yang dapat dianggap memiliki muatan hukum. Kerja tersebut pun telah nyaris sempurna dilakukan oleh para ulama ahli hukum terdahulu dengan menulis buku-buku tafsir dengan pendekatan fikih yang dikenal dengan sebutan tafsir ayat-ayat *ahkām*, semisal yang ditulis oleh al-Jaṣṣāṣ, Ibn al-‘Arabiy, al-Qurṭubiy, aṣ-Ṣābūniy dan lainnya, yang umumnya memadukan tafsir *bilma’sur* dengan *tafsir bir-ra’yi* dengan metode *tahlili*. Sebagaimana namanya objek kajian tafsir *ahkām* terbatas pada ayat-ayat yang dinilai mengandung muatan hukum dengan pembahasan yang juga terbatas pada aspek-aspek fikihnya saja dengan segala pernik yang mewarnai fikih itu sendiri. Meskipun demikian, kaidah-kaidah tafsir tetap menjadi perangkat yang digunakan untuk mendedah interpretasi ayat demi ayat yang dikaji. Dengan demikian, itu tafsir *ahkām* sesungguhnya lebih dari sekadar penelitian hukum Islam pada ranah sumber tetapi telah masuk pada penelitian pada ranah doktrin.⁵⁰ Jika penelitian hukum Islam pada ranah sumber terbatas pada inventarisasi ayat-ayat *ahkām* semata, maka kitab *Al-Itmām bijam’i āyātil Ahkām* oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-‘Āshimi⁵¹ tampaknya adalah contoh yang tepat untuk itu.

Sunnah Nabi ﷺ yang menjadi sumber hukum primer hukum Islam, dari segi keautentikannya tidak memiliki kualifikasi yang sama dengan Al-Qur’an, sebagian besar Hadis yang memuat Sunnah Nabi ﷺ diriwayatkan secara āḥād bukan mutawātir. Oleh karena itu, keabsahan suatu Hadis benar-benar bersumber dari Rasulullah ﷺ terlebih dahulu

⁵⁰ Lihat Faisar, *Metodologi*, hlm. 47-48.

⁵¹ Lihat: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-‘Āshimi, *Al-Itmām bijam’i āyātil Ahkām*, Riyadh: Alma’ārif Al-qur’āniyyah, 2009.



harus diteliti di samping inventarisasi Hadis-hadis yang bernilai hukum atau Hadis-hadis *aḥkām*. Penelitian terhadap autentisitas Hadis dilakukan melalui proses *takhrij*, *dirāsah al-asānīd* atau kritik sanad, dan kritik matan yang telah lama dikenal. *Takhrij* Hadis dalam konteks ini adalah identifikasi lokasi suatu Hadis dalam kitab-kitab induk. Kitab induk Hadis yaitu kitab-kitab yang meriwayatkan Hadis secara bersanad kepada Nabi ﷺ.⁵² *Dirāsah al-Asānīd* adalah penelitian terhadap kualitas sanad atau sanad-sanad Hadis yang tidak mutawatir, untuk menentukan apakah sanad Hadis tersebut sahih atau hasan sehingga dapat dipercaya, ataukah daif sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam *dirāsah al-asānīd* atau kritik sanad yaitu:

1. Apakah setiap perawi dalam rangkaian sanad tersebut memiliki integritas yang baik sehingga layak dipercaya? (*adālah ar-rāwiy*);
2. Apakah setiap tersebut memiliki kompetensi untuk menerima suatu berita dan menyampaikannya kembali dengan baik? (*dabt ar-raāwi*);
3. Betulkah telah terjadi pertemuan antara seorang perawi dengan perawi sebelumnya dalam rantai sanad tersebut? (*ittiṣāl as-sanad*).⁵³

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut didapatkan melalui ilmu *rijāl* dan *jarḥ wa ta'dīl*. Sampai di sini, jika jawaban untuk ketiga pertanyaan tersebut positif, maka Hadis tersebut baru menyandang predikat *ṣaḥīḥ al-isnād* yang dengan kata lain belum *ṣaḥīḥ* sepenuhnya. Untuk itu penelitian dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu kritik ma-

⁵² Maḥmūd Taḥḥān, *Uṣūl at-Takh wa Dirāsah al-Asānīd*, cet. 2, (Riyāḍ: Maktabah alMa'ārif, 1991), hlm. 10.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 140-141.



tan, yakni meneliti kualifikasi Hadis berdasarkan matannya. Dalam kritik matan terdapat dua pertanyaan yang hendak dijawab: *Pertama* sudahkah Hadis tersebut sunyi dari *syuḏūḏ* yaitu bertentangan dengan Al-Qur'an atau riwayat yang lebih kuat? *Kedua*, sudahkah Hadis tersebut bersih dari unsur-unsur tersembunyi yang menciderai kesahihannya. Jika kedua unsur tersebut diyakini tidak terdapat dalam Hadis yang telah dibuktikan kesahihan sanadnya, barulah ia dapat disebut sebagai Hadis sahih. Penelitian terhadap keautentikan Hadis ini telah dimulai dan berlangsung sejak lama. Berbagai karya tulis telah dihasilkan dan dijadikan rujukan dalam masalah ini, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* merupakan contoh jadi dari penelitian tersebut. Namun demikian, tidak dapat dikatakan penelitian terhadap keautentikan Hadis telah tuntas tidak menyisakan sama sekali untuk peneliti berikutnya, mengingat masih terdapat sejumlah naskah-naskah kitab-kitab Hadis yang belum terverifikasi keabsahan Hadis-hadisnya. Selain itu, penelitian lain terhadap objek yang sama kerap menghasilkan penemuan yang tidak ditemukan sebelumnya.

Inventarisasi Hadis-hadis *aḥkām* juga telah dilakukan sejak lama, bahkan awal tadwin Hadis adalah lebih kepada menghimpun Hadis-hadis hukum, seperti *Muwāṭa` Imam Malik*. Sistematis penyusunan kitab-kitab induk Hadis pada umumnya telah dengan sendirinya menginventarisir Hadis-hadis *aḥkam* meskipun tidak dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Hadis-hadis disusun dan diorganisasikan berdasarkan kesatuan tema dan kandungannya, baik hukum maupun hukum, sebagaimana halnya *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, *Muslim*, dan *Sunan at-Turmuḏiy*. Pada perkembangan selanjutnya ada upaya meringkas kitab-kitab Hadis *aḥkam* berupa pe-



nyederhanaan sanad dengan mencukupkan menyebutkan nama akhir sanad yang biasanya adalah sahabat. Misalnya, kitab *Bulūg al-Marām* dan *‘Umdah al-Aḥkām*. Selain itu juga terdapat inventarisir Hadis *aḥkām* pada hukum parsial tertentu yang disebut dengan kitab *ajzā`* semisal *Ajzā` Raf` al-Yadayn* *‘inda ad-Du‘ā`* yang ditulis Imam Bukhāriy, demikian juga *Ṣifah Ṣalāti an-Nabiy* ﷺ oleh Nāṣiruddīn al-Albāniy.

D. PENELITIAN HUKUM ISLAM PADA RANAH DOKTRIN (PEMIKIRAN)

Para fukaha (ahli hukum Islam) dalam melakukan perumusan hukum Islam tidak terlepas dari dua sumber hukum Islam yang pokok, yaitu Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW. Pemikiran mereka dalam mengambil dan menetapkan hukum suatu perbuatan manusia tidak mungkin terlepas dari dua sumber hukum ini.

Hal ini berbeda kaitannya dengan hukum umum, ahli hukum umum yang mengeluarkan pernyataan hukum tidak merujuk pernyataan mereka melalui kitab suci atau dengan kata lain, mereka tidak merujuk pendapat mereka dalam Al-Qur’an maupun Hadis, karena dalam hukum umum Al-Qur’an dan Hadis bukan bagian dari sumber hukum. Ahli hukum umum biasanya merujuk pendapat hukum mereka pada undang-undang, kebiasaan atau hukum tak tertulis, yurisprudensi, traktat, doktrin.

Sebagai contoh dalam ranah pemikiran hukum umum adalah disertasi Azizah di Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum yang mengkaji tentang Perspektif Gender dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam disertasi ini, penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang



Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Sumber Hukum yang Legal di Indonesia.

Penelitian hukum Islam dalam ranah doktrin (pemikiran) telah lama dilakukan oleh para ulama mazhab empat yang masyhur. Contohnya, Imam Abu Hanifah yang telah melakukan penelitian hukum Islam dalam ranah doktrin dalam karyanya yang berjudul *Masā'ilul Uḥl*, kedua Imam Malik dalam karya monumentalnya *alMudawwanah al-Kubrā*, kemudian dilanjutkan dengan Imam Syafi'i yang memiliki ratusan karya dalam penelitian ini di antaranya *al-impla'*, *al-Umm*, dan terakhir Imam Ahmad bin Hanbal dalam karyanya *al-Manāsik al-Kabīr*.

Penelitian ini terus berlanjut pada abad berikutnya, yaitu para murid Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad begitu juga para ulama yang mendedikasikan dirinya terhadap satu mazhab tertentu, terus melakukan penelitian hukum Islam dalam ranah pemikiran guru mereka atau pendiri mazhab mereka di antaranya yaitu: Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah menulis pemikiran gurunya dalam karyanya *al-Kharāj*. Kemudian Abu Muhammad Abdul Wahab al-Baghdadi al-Maliki menulis karya pemikiran hukum Islam Mazhab Maliki yang berjudul *al-Talqīn Fī Fiqhil Maliki*. Selanjutnya Imam Nawawi menulis buku *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* yaitu kitab pemikiran hukum Islam dalam mazhab Syafi'i, dan kitab *al-Mugni* dalam pemikiran hukum Mazhab Hanbali karangan Ibnu Qudamah.

Penelitian dalam bidang ini terus berlanjut dan banyak sekali karya-karya para dosen dari civitas akademis yang melakukan penelitian dalam bidang pemikiran, di antaranya Lahmuddin Nasution yang mengkaji pemikiran Imam Syafi'i dalam karyanya pembaruan dalam Hukum Islam dari *qaul*



qadim ke qaul jadid. Kemudian Muhammad Syahnas Nasution, yang meneliti pembaruan hukum Islam dalam kontrak dalam karyanya *Modernization of Islamic Law of Contract A study of Abdul Razzaq al-Sanhuri Majma' al-Fiqh al-Islami*.

E. PENELITIAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

Para fukaha—sebutan untuk ahli hukum Islam—melakukan penelitian ini sebagai landasan terhadap pemikiran hukum yang mereka kemukakan hasil penelitian terhadap asas-asas hukum Islam ini, terkristalisasi di dalam kitab-kitab *Usul Fikih* dan *Qawaid Fiqhiyyah* yang pembahasannya mencakup kaidah usul dan kaidah fikih.

Dalam hukum Islam terdapat dua kaidah, yaitu kaidah fikih dan kaidah usul fikih. Salah seorang ulama yang pertama sekali membedakan secara perinci antara kaidah fikih dan kaidah usul fikih, adalah Syihabuddin Ahmad bin Idris atau lebih dikenal Imam al-Qarafi (W. 684 H/1285 M), beliau menyebutkan bahwa kaidah usul fikih adalah:⁵⁴

القاعدة الأصولية بمعناها الخاص لها، فكثيراً ما يرد الأمر مقتزناً بما يدل عليه من حكم شرعي، فأوامر الوجوب تقتزن بالوعد على الفعل، والوعيد على الترك، فيما إذا قيل: (أوجب عليكم كذا)، وأنتم معاقبون على تركه، فكل ذلك يدل على الوجوب

“Kaidah usuliyah pada umumnya adalah kaidah-kaidah hukum yang digali dari lafal-lafalnya yang berbahasa Arab secara khusus, dan sesuatu yang ditunjukkan dari lafal-lafal bahasa Arab tersebut berupa nasakh, tarjih, selain itu lafal perintah menunjukkan kewajiban dan lafal larangan menunjukkan keharaman, dan bentuk yang khusus menunjukkan keumuman dan sebagainya”.

⁵⁴ Imam al-Qarafi, *al-Furq*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2003), jil 1, hlm. 2.



Adapun kaidah fikih adalah:

قواعد فقهية لكية كثيرة ولا عدد عظيمة مش لماد مت لة اعشر
أسروحه من لكل قاعدة رعوفا في لا ارشعة لا حصم

"Qawaid Fiqhiyyah adalah kaidah yang bersifat universal/general, jumlahnya banyak, manfaatnya besar, mencakup rahasia-rahasia syara' dan hikmah-hikmahnya, pada setiap kaidah terdapat fur' (bagian-bagiannya) dalam syariat yang jumlahnya tidak terbatas".

Agar dapat lebih memahami kaidah usul fikih, penulis memaparkan contoh kaidah usul fikih:⁵⁵

الأصل في الأمر هو بلا وجب، ما لم يكن اقتراح يشير إلى واجبها

"Dasar perintah adalah menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil yang menunjukkan ketidakwajibannya".

الأصل في الحظر ما غير شرعي لم يكن هناك اقتراح يبين عدم المشروعية

"Dasar larangan adalah keharaman kecuali ada dalil yang menunjukkan ketidakharaman".

Kaidah-kaidah yang bersifat umum di atas dan kaidah lain yang dihasilkan oleh ahli usul fikih digunakan oleh ahli ilmu fikih untuk diterapkan ke dalam dalil-dalil detail sehingga menghasilkan hukum *syara'* yang berhubungan dengan perbuatan manusia secara detail pula. Misalnya: Kaidah perintah menunjukkan kewajiban, diterapkan pada firman Allah, Surah *al-Maa'idah* (5): 1, *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"*. Keluarlah hukum memenuhi akad adalah wajib.

Kaidah larangan menunjukkan keharaman, diterapkan pada firman Allah: *"Wahai orang-orang yang beriman, ja-*

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşûl al-Fiqh*, (al-Azhar : Maktabah Dakwah, t.t.), hlm. 13.



nganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain,” (Surah *al-Hujuraat* [49]: 11). Ditetapkan hukum: *penghinaan suatu kaum kepada kaum yang lain adalah haram.*

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan mendasar antara kaidah fikih dan usul fikih menurut Djazuli adalah: *Pertama*, kaidah-kaidah usul fikih, yang kita temukan di dalam kitab-kitab usul fikih, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum (*takhrij al-ahkam*) dari sumbernya, Al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak disebutkan secara langsung hukumnya di dalam nas.⁵⁶

Oleh karena itu, baik kaidah-kaidah usul fikih maupun kaidah-kaidah fikih, bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah usul fikih sering digunakan di dalam *takhrij al-ahkam*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya (Al-Qur'an dan Sunnah). Adapun kaidah-kaidah fikih sering digunakan di dalam *ta'bīq al-ahkam*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia. Dari sisi ini tidaklah heran apabila kekhalifahan Turki Usmani antar tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang yang disebut *Majalah alAhkam al-Adliyah*, yang merupakan penerapan hukum Islam dengan menggunakan 99 kaidah di bidang muamalah, dengan 1851 pasal.⁵⁷

Adapun contoh penelitian dalam asas-asas hukum Islam ini; Pertama asas hukum Islam dalam usul fikih dalam karya Zulakarnain Disertasi Pascasarjana UIN SU tahun 2011,

⁵⁶ Djazuli, *Kaidah-kaidah*, hlm. 4.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 4.



yang berjudul *Konsep Azimah dan Rukhsah* dalam Hadis-hadis Nabi SAW (studi tentang pemahaman kontekstualisasi Hadis hukum). Selain itu, konsep *alNadbu wal Karahah* dalam usul fikih.

Adapun penelitian asas-asas hukum Islam dalam kaidah fikih adalah penelitian perbandingan terhadap kitab *al-Asybah wan Nazā'ir* karangan Ibnu Nujaim dan Imam Suyuti yang ditulis oleh Azizah. Kemudian Kaidah Fikih terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal di Indonesia.

Dalam hukum umum, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum. Sebab, tidak setiap pasal dalam suatu perundang-undangan, misalnya, mengandung kaidah hukum; ada pasal-pasal yang hanya merupakan batasan saja sebagaimana lazimnya ditemukan pada Bab Ketentuan-ketentuan Umum dari perundang-undangan tersebut. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.⁵⁸

Asas hukum dapat dibedakan menjadi asas hukum konstitutif dan asas hukum regulatif. Asas-asas hukum konstitutif merupakan asas-asas yang harus ada bagi kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas-asas hukum regulatif perlu bagi berprosesnya sistem hukum tersebut. Asas-asas hukum tersebut ada yang berlaku umum; artinya, harus ada pada

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 62.



setiap sistem hukum. Asas-asas hukum khusus merupakan perwujudan dari kekhususan masyarakat dan kebudayaan yang tercermin dalam sistem hukumnya. Asas-asas hukum khusus tersebut, baik yang konstitutif maupun regulatif, dapat dibahas menurut bidang-bidang tata hukum, misalnya, hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pembentukan kaidah-kaidah hukum yang tidak didasarkan pada asas-asas hukum konstitutif menghasilkan kaidah-kaidah yang secara material bukan merupakan kaidah hukum. Kalau asas-asas hukum regulatif tidak diperhatikan, maka yang dihasilkan adalah kaidah-kaidah hukum yang tidak adil.⁵⁹

Untuk mempermudah pengertian terhadap penjelasan tersebut di atas, akan dikemukakan beberapa contoh asas-asas hukum konstitutif yang khusus sifatnya, yang dikaitkan dengan bidang-bidang tata hukum. Oleh karena asas-asas hukum tersebut bersifat khusus, maka akan diberikan suatu contoh dari negeri Belanda yang kekhususan masyarakat dan kebudayaannya tercermin dalam asas-asas hukum konstitutif khususnya. Contohnya sebagai berikut:⁶⁰

1. Hukum Tata Negara:
 - a. Asas representasi;
 - b. Asas pemisahan dan perimbangan kekuasaan-kekuasaan negara (*trias politica* menurut Kant);
 - c. Asas *rule of law*;
 - d. Asas kemandirian kekuasaan kehakiman;
 - e. Asas desentralisasi fungsional dan teritorial;
 - f. Asas hak-hak asasi modern (asas hukum regulatif khususnya adalah *respublica*).

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 65-66.



2. Hukum Administrasi Negara:
 - a. Asas tanggung jawab negara terhadap sikap tindak petugas negara atau pejabat negara.
 - b. Asas bahwa perjanjian antara lembaga administrasi dan pihak lain tidak boleh menghalangi penegakan aturan-aturan umum.
 - c. Asas pemerintahan yang pantas (asas hukum regulatif khususnya adalah *salus public asuprema lex est*).
3. Hukum Pidana:
 - a. Asas *nulla poena sine previa lege peonali*;
 - b. Asas sifat pidana penyertaan;
 - c. Asas sifat pidana *vitlokking*;
 - d. Asas sifat pidana percobaan;
 - e. Asas *nebis ini dem*.

Suatu contoh yang dapat dikemukakan adalah apabila seorang peneliti ingin menelaah asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas tersebut memang telah tercantum di dalam penjelasannya, perundangannya mencakup enam asas. Misalnya, mengenai asas bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Asas tersebut dapat dijumpai dalam pasal undang-undang tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit.⁶¹

Apabila ruang lingkup penelitiannya adalah undang-undang masalah perkawinan. Dengan demikian, maka kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan klasifikasi dalam penelitian hukum normatif tersebut yaitu.^{62 63}

⁶¹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 53.

⁶² *Ibid*.

⁶³ Al-Jurjani, *al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1983), hlm. 22.



1. Memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang mengatur masalah pengertian yang akan diteliti;
2. Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut, sehingga menghasilkan klasifikasi- klasifikasi tertentu;
3. Menganalisis pasal-pasal tersebut dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada;
4. Menyusun suatu konstruksi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mencakup semua bahan hukum yang diteliti;
 - b. Konsisten;
 - c. Memenuhi syarat-syarat estetis;
 - d. Sederhana dalam merumuskan.

F. PENELITIAN ISTINBĀṬ AHKĀM

Secara bahasa istinbāṭ merupakan masdar dari kalimat يستنبط – استنبط yang berarti mengeluarkan, menciptakan, dan menetapkan. Secara istilah menurut al-Jurjani dalam al-Ta'rifāt:

الجهود لإزالة الماعني (القانون) من النصوص القرآنية والحديثية
 باستخدام جهود العقل وقوة الذكاء

Upaya mengeluarkan Ma'āni (Hukum) dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadis dengan menggunakan upaya akal dan kekuatan kecerdasan.

Adapun menurut Satria Efendi Zein, Istinbāṭ adalah daya usaha yang harus diupayakan untuk merumuskan hukum syara' berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.⁶⁴ Adapun yang dimaksud hukum dalam usul fikih adalah titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan seorang

⁶⁴ Satria Efendi, *Usul Fikih*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2009), hlm. 177.



mukalaf berupa tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan, pilihan dan/atau *wadh'i* (hukum berkaitan dengan syarat, rukhsah, dan *māni'*). Dengan demikian, *istinbāt* ahkam itu adalah pedoman dalam merumuskan hukum Islam (*syara'*).

Dalam metodologi penelitian hukum Islam, *istinbāt* ahkam merupakan suatu penelitian dalam hukum Islam, yang merupakan kelanjutan dalam penelitian asas-asas hukum Islam. Dalam penelitian ini melihat bagaimana seorang Fakih atau ahli hukum Islam dalam mencapai suatu produk hukum atau kesimpulan hukum, tentunya dalam hal itu ada proses hukum, sehingga seorang fakih atau ahli hukum dapat mencapai satu doktrin (pendapat hukum) terhadap satu kasus hukum.

Penelitian ini juga mempunyai wilayah cakupan yang cukup luas termasuk di dalam meneliti tentang pendapat seorang ahli hukum, pendapat mazhab, fatwa ulama, dan keputusan pengadilan (qada Para ahli hukum konvensional menamakan yang terakhir dengan penelitian klinis hukum, yakni proses menjadi hukum *in abstracto* menjadi hukum *in concreto*. Termasuk juga dalam wilayah penelitian ini adalah penelitian tentang proses lahirnya suatu qanun di dalam paradigma hukum Islam. Contoh dekat dengan ini yaitu penelitian mengenai KHI (Kompilasi Hukum Islam) terutama menyangkut materi hukum yang tercantum dalam pasal demi pasal atau mengenai materi Perda Syariah di NAD. Termasuk juga ke dalamnya penelitian mengenai Peradilan Agama.⁶⁵

Contoh penelitian ini dalam bentuk pendapat seorang ahli hukum dan pendapat mazhab telah penulis kemukakan pada subpenelitian hukum Islam dalam ranah doktri, dalam

⁶⁵ Arfa, *Hukum Islam*, hlm. 55.



bentuk fatwa ulama yaitu tulisan Prof Dr. K.H. Ali Mustafa Ya'qub dalam karyanya *Arah Kiblat* menurut Al-Qur'an dan Sunnah kritik terhadap Fatwa MUI tentang arah kiblat, dalam bentuk putusan pengadilan yaitu Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer karya Prof. Dr. Satria Efendi Zein, M.A.

G. PENELITIAN HUKUM ISLAM PERBANDINGAN

Dalam kajian fikih, istilah Hukum Islam Perbandingan lazim disebut dengan *Muqāranah Mazāhib*, yaitu perbandingan mazhab. Secara terminologis pengertian mazhab menurut Huzaemah Tahido Yanggo, adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum Islam.

Pada awalnya, penelitian hukum Islam perbandingan hanya sebatas kajian perbandingan antarmazhab fikih, yaitu sejak lahirnya empat Imam Mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad, kemudian dilakukan kajian perbandingan hukum dengan cara mencari perbedaan suatu status hukum dari masing-masing mazhab, kemudian setelah itu dilakukan *mun±qasyah adillah* yaitu mendiskusikan dalil-dalil hukum yang digunakan masing-masing mazhab dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dalil, bahkan sampai melakukan takhrij Hadis yang dijadikan dalil dalam satu mazhab. Kemudian dilakukan cara mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan dengan cara:

Jika terjadi pertentangan antara dua dalil (nas) maka wajib berjihad dengan jama' wat taufiq (mengumpulkan dan mengompromikan) dengan jalan yang benar berdasarkan jalan jama' wat taufiq, Apabila tidak memungkinkan dengan jama' wat taufiq maka wajib



berijtihad dengan cara mentarjih salah satu nas yang ada dengan cara di antara cara-cara mentarjih, jika tidak mungkin untuk jama' wat taufiq kemudian juga tidak dapat mentarjih salah satu, namun diketahui Tārīkh keberadaan keduanya, maka yang datang kemudian dapat menasakh yang lalu, apabila tidak diketahui juga tārīkh salah satunya maka lebih baik tidak mengamalkan keduanya.⁶⁶

Penelitian ini semakin berkembang dan berlanjut, penelitian ini tidak dalam ranah perbandingan mazhab antarfikih saja tetapi dalam wilayah yang sangat luas yaitu perbandingan hukum Islam antara negara, baik itu membandingkan hukum maupun sistem hukumnya. Penelitian ini dapat dilakukan di Indonesia dengan membandingkan hukum Islam di Malaysia, Brunei Darussalam, Mesir, Syiria, dan sebagainya.

Sebagai contoh perbandingan hukum Islam perbandingan antarmazhab yaitu penetapan penanggalan ibadah berdasarkan rukyat hilal menurut Imam Abu Ishâq al-Syirâzi dan Ibnu Abidin, serta Relevansinya dengan perkembangan kajian ilmu falak di Indonesia.

Adapun contoh perbandingan hukum Islam antarnegara yaitu perbandingan hukum poligami negara Islam Indonesia dengan Tunisia, di mana Tunisia melarang poligami bagi warganya dengan alasan hukum bahwa dalam Al-Qur'an yang dituntut bukan hanya adil dalam bentuk batin melainkan dalam bentuk zahir.

Dalam perkembangan selanjutnya perbandingan hukum ini diperkaya dengan pendekatan-pendekatan yang tidak saja berkuat pada dalil hukum yang digunakan tetapi juga diperkaya dengan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis. Keguna-

⁶⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, (Al-Azhar: Maktabah Dakwah, 1375), hlm. 229.



an dari penerapan perbandingan hukum antara lain, bahwa penelitian tersebut memberikan pengetahuan tentang persamaan dari perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum. Dengan pengetahuan tersebut, maka lebih mudah untuk mengadakan unifikasi, kepastian hukum, maupun penyederhanaan hukum. Hasil-hasil perbandingan hukum sangat bermanfaat bagi penerapan hukum di suatu masyarakat majemuk.⁶⁷

H. PENELITIAN SEJARAH HUKUM ISLAM (TĀRĪKH TASYRĪ')

Tārīkh Tasyr'ī, menurut Muhammad Ali al-sayis adalah: Ilmu yang membahas keadaan hukum Islam pada masa kerasulan (Rasulullah ﷺ masih hidup) dan sesudahnya dengan periodisasi munculnya hukum serta hal-hal yang berkaitan dengannya, (membahas) ciri-ciri spesifikasi keadaan fukaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum tersebut.⁶⁸

Menurut Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *tasyri'* adalah pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang mukalaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Jika pembentukan undang-undang ini sumbernya dari Allah dengan perantaraan Rasul dan kitab-kitabnya, maka hal itu dinamakan perundang-undangan *Alla (at-Tasyri'ul Ilahiyah)*. Adapun jika sumbernya datang dari manusia baik secara individual maupun kolektif, maka hal itu dinamakan perundang-undangan buatan manusia (*at-Tasyri'ul Wadh'iyah*). Secara sederhana, tarikh *tasyri'*

⁶⁷ Arfa, *Hukum Islam*, hlm. 59.

⁶⁸ Muhammad Ali Sayis, *Tarikh al-Fiqh Islamy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 23.



adalah sejarah penetapan hukum Islam yang dimulai dari zaman Nabi sampai sekarang.

Dalam menyusun sejarah pembentukan dan pembinaan hukum Islam di kalangan ulama fikih kontemporer, ada beberapa macam cara, di antaranya yang terkenal adalah cara menurut Syaikh Muhammad Khudari Bek (mantan dosen Universitas al-Azhar, Kairo) dan cara Mustafa Ahmad az-Zarqa (guru besar fikih Silam Universitas Amman Yordania).

Cara pertama, periodisasi pembentukan hukum (fikih) Islam oleh Syaikh Muhammad Khudari Bek dalam bukunya *Tārīkh Tasyr'ī al-Islami* (sejarah pembentukan hukum Islam). Ia membagi masa pembentukan hukum Islam dalam enam periode, yaitu : (1) Periode awal sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul; (2) Periode para sahabat besar; (3) Periode sahabat kecil tabi'in; (4) Periode awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H; (5) Periode berkembangnya mazhab dan munculnya taklid mazhab; (+6) Periode jatuhnya Baghdad (pertengahan abad ke-7 H oleh Hulagu Khan [1217–1265]) sampai sekarang.

Cara kedua pembentukan hukum (fikih) Islam oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa' dalam bukunya *al-Madkhal al-Fiqhul al-Islām (Pengantar Umum Fikih Islam)*. Ia membagi periode pembentukan dan pembinaan hukum Islam dalam tujuh periode. Ia setuju dengan pembagian Syaikh Khudari Bek sampai periode kelima, tetapi ia membagi periode keenam menjadi dua bagian, yaitu periode sejak pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya *majallah al-ahkam al-adliyyah* (hukum perdata kerajaan Turki Usmani) pada tahun 1286 H dan periode sejak munculnya *majallah alahkam al-adliyyah* sampai sekarang.

Para sarjana Islam terdahulu telah secara tekun melaku-



kan kajian sejarah, atau yang populer dalam istilah Arab adalah tarikh. Salah satu bidang kajian yang dilakukan yaitu dengan melakukan penelitian bidang *tasyri'* (*legal process*). Para penulis sejarah Islam yang menulis tentang sejarah hukum Islam cenderung bersifat deskriptif, yakni hanya melakukan paparan sejarah tanpa melakukan *critical histories* yang mendalam. Sesuai dengan perkembangan penelitian sejarah itu sendiri, pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian sejarah menjadikan peneliti ini menjadi lebih *complicated*. Paling tidak penelitian sejarah ini mencakup lima w + h; *Who, what, when, where, why, dan how*.⁶⁹

Peneliti yang menggunakan metode sejarah di dalam tinjauannya terhadap hukum, mempunyai kewajiban utama untuk menelaah hubungan antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya dari sudut sejarah. Dari hubungan-hubungan itu, seorang peneliti harus dapat menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang ditelitinya. Memang salah satu kegunaan dari penggunaan metode sejarah adalah untuk dapat mengungkapkan fakta hukum pada masa lampau dalam hubungannya dengan fakta hukum pada masa kini. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi peneliti, oleh karena hukum senantiasa dipengaruhi dari memengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dan salah satu aspek kehidupan manusia pada masa lampau, dari hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum pada masa mendatang.⁷⁰ Salah satu contoh tulisan dalam penelitian ini adalah karya Muhammad Abu Zahrah yang berjudul *Tarikh Mazahib al-Islamiyah*.

⁶⁹ Arfa, *Hukum Islam*, hlm. 59.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 60.



I. METODOLOGI PENELITIAN SIYASAH

Istilah metodologi berasal dari kata metode, yang berarti jalan ke. Akan tetapi, pada lazimnya metode diformulasikan dengan kemungkinan arti sebagai berikut: (1) suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁷¹

Adapun istilah metodologi sendiri, menurut Robert Bagdan, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto berarti: *The Proces, principles, and procedures by which we approach problem and seek answers*⁷² (proses, prinsip, dan prosedur yang biasa digunakan dalam mendekati suatu masalah guna mencari jawaban/solusinya). Adapun menurut Soerjono Soekanto metodologi biasanya diberikan arti-arti sebagai berikut: (1) logika dari penelitian ilmiah, (2) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (3) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Jujun S. Suriasumantri menyatakan, bahwa secara harfiah metodologi berarti pengetahuan tentang metode-metode. Dalam kegiatan penelitian, lanjut Jujun, terminologi metodologi digunakan sebagai kategori yang mencakup segenap metode yang digunakan dalam penelitian.⁷³ Sementara yang dimaksud dengan metode berarti cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang sedang dikaji.⁷⁴ Objeklah yang menentukan metode, bukan sebaliknya.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 5.

⁷² *Ibid*, hlm. 6.

⁷³ Jujun S. Suriasumantri, *Penelitian Ilmiah Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan, dalam tradisi baru penelitian agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, (T.Tp. : Nuansa, 1998), hlm. 49.

⁷⁴ *Ibid*.



Oleh karena itu, untuk mengetahui penerapan metodologi yang tepat untuk suatu disiplin ilmu pengetahuan tertentu, biasanya ditentukan terlebih dahulu mengenai karakteristik dari suatu disiplin ilmu tersebut.

Metodologi dapat dipandang sebagai suatu bagian, sekaligus bentuk terapan dari epistemologi. Metodologi suatu disiplin ilmu memuat tatacara yang teratur dan sistematis untuk menemukan proposisi-proposisi penting di dalamnya. Mengingat muatan ilmu pengetahuan terdiri atas; materi dan metodologi, maka materi merupakan himpunan proposisi yang dihasilkan oleh metodologi, sementara metodologi berkenaan dengan tatacara menemukan sekaligus membentuk materi tadi.⁷⁵

Khusus mengenai jenis dan bentuk metode penelitian, para ahli berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Ditinjau dari sudut sifat-sifat masalahnya, metode penelitian itu, menurut Sumardi Suryabrata, dapat digolongkan menjadi sembilan macam kategori, yaitu; (1) metode historis adalah metode penelitian yang bertujuan merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan menyintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang kuat,⁷⁶ (2) metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat dari fakta atau karakteristik populasi atau daerah tertentu, (3) metode perkembangan adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan dan/atau perubahan satu atau lebih variabel tertentu dalam kurun wak-

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ S. Isaac dan W.B. Michael, *Handbook In Research And Evaluation*, (Sandiego: Edits Publisher, 1972), hlm. 17.



tu tertentu, (4) metode kasus dan lapangan adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, (5) metode korelasional adalah kelanjutan metode deskriptif. Dengan metode ini dicari hubungan di antara variabel yang diteliti, (6) metode kausal komparatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat melalui data tertentu, (7) metode eksperimental sungguhan adalah metode penelitian yang memungkinkan peneliti mengubah secara sistematis sifat-sifat variabel dan meneliti akibat-akibatnya. Pada metode ini, variabel-variabel dikontrol sedemikian rupa, sehingga variabel luar yang mungkin memengaruhi dapat disingkirkan, (8) metode eksperimental semu (kuasi eksperimental) adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendekati kondisi eksperimental pada suatu situasi yang tidak memungkinkan mengubah variabel yang relevan, (9) metode tindakan adalah metode penelitian yang bertujuan mengembangkan keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain.⁷⁷

Selain, sembilan macam metode penelitian tersebut di atas, masih ada beberapa macam metode ilmiah modern lain, semisal metode deduktif, metode induktif, metode observasi, metode fungsionalisme, dan metode analisis isi.

Dari uraian ini, tampaknya fikih siyasah berarti pengetahuan tentang metode-metode apa saja yang dapat digunakan untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu fikih siyasah.

⁷⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 15-28.



Dari uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa fikih siyasah merupakan bagian atau termasuk dalam kategori fikih. Berpijak pada kenyataan seperti ini maka tidak boleh tidak, dalam mengkaji dan mengembangkan fikih siyasah antara lain harus menggunakan metode yang biasa digunakan dalam ilmu fikih.⁷⁸ Metode yang dimaksud adalah metode ijtihad yang biasa dibahas dalam ilmu usul fikih yang terdiri dari metode kias (analogi), *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah*, *urf* dan lain-lain yang oleh Abdul Wahab Khallaf disebut dengan tiga istilah yaitu *adillah al-Ahkam*, *ushul al-Ahkam*, dan *al-Mas-hadir al-tasyri'iyah li al-ahkam*,⁷⁹ atau dalil-dalil, prinsip-prinsip, dan sumber-sumber penetapan hukum Islam.

Karena siyasah termasuk dalam bidang pranata sosial,⁸⁰ maka fikih siyasah dapat dikelompokkan ke dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengkajian dan pengembangan fikih siyasah seseorang dapat meminjam metodologi yang biasa digunakan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu sosial.

Dari kelima belas metode yang telah disebutkan di atas, paling tidak, menurut penelitian Ahmad Sukarja,⁸¹ ada lima metode ilmu sosial modern yang dapat digunakan untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu fikih siyasah. Kelima metode dimaksud adalah metode historis, metode komparatif, metode analisis isi, metode deskriptif, dan metode kasus.

Salah satu objek kajian fikih siyasah adalah mengeta-

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Abd. Wahhab Khalaf, *Ulm Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1978), hlm. 20.

⁸⁰ Harun Nasution, "Klasifikasi Ilmu dan Tradisi Penelitian Islam: Sebuah Perspektif", dalam *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa, 1998), hlm. 8.

⁸¹ Ahmad Sukarja, *Metodologi dan Pendekatan Kajian Politik Islam (Fiqh Siyasah)*, *ibid*, hlm. 5.



hui berbagai data, fakta, dan fenomena ketatanegaraan yang pernah berkembang dalam pentas sejarah Islam sejak zaman Nabi, Khulafa al-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya hingga zaman kita sekarang ini. Penggunaan metode histori dalam bidang fikih siyasah ini dimaksudkan untuk mengetahui fakta sejarah sosial politik Islam dari masa ke masa. Dengan begitu, akan dapat diperoleh informasi yang utuh tentang segala sesuatu yang pernah terjadi di panggung sejarah politik Islam ketatanegaraan Islam. Belajar dari pengalaman sejarah masa lalu, kita dapat memilah dan memilih hal-hal apa saja yang kiranya masih relevan untuk dipraktikkan di zaman sekarang. Selain itu, juga untuk dapat memperbaiki kekeliruan penyelenggaraan negara di masa lalu agar tak terulang kembali di masa kini dan mendatang. Dengan demikian, seperti diungkapkan Louis Gottschalk,⁸² kita dapat menguji dan menganalisis rekaman sejarah masa lalu secara kritis.

Selain itu, dengan mempelajari praktik kenegaraan Islam dari zaman ke zaman, serta dengan mengkaji berbagai pemikiran kenegaraan yang pernah dikemukakan oleh para pakar ketatanegaraan Islam sejak zaman klasik, pertengahan, dan kontemporer akan dapat mengadakan analisis perbandingan mengenai ciri-ciri spesifik yang membedakan praktik penyelenggaraan dan pemikiran politik yang muncul dalam pentas sejarah kenegaraan Islam antara satu zaman dan zaman lainnya atau antara satu pemikir dengan pemikir lainnya. Untuk itu, maka metode yang paling tepat digunakan adalah metode komparatif.

Hal lain yang juga menjadi objek kajian fikih siyasah

⁸² Louis Gottschalk, *Understanding History: a Primary of Historical Method*, (New York: Alfred and Knoph, 1956), hlm. 48-49.



adalah masalah konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam menilai apakah konstitusi suatu negara tertentu sesuai atau tidak dengan ajaran Islam, maka seseorang perlu melakukan pengkajian secara cermat dan hati-hati kandungan isi yang termaktub dalam undang-undnag tersebut. Untuk menangani hal ini, maka menggunakan metode analisis isi merupakan suatu pilihan yang tepat. Setelah diperoleh kesimpulan bahwa konstitusi suatu negara terbukti islami mengingat tak ada satu pasal pun dari konstitusi tersebut yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, seorang peneliti tentu tidak hanya berhenti sampai di situ, bila mau, ia dapat melanjutkan pengamatan dan penelitiannya mengenai bagaimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan konstitusi tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam kegiatan ini, seorang peneliti dapat mendeskripsikan mengenai ada atau tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi tersebut. Sehubungan dengan hal ini, maka metode yang paling relevan untuk digunakan adalah metode deskriptif.

Dalam fikih siyasah juga dibahas kasus-kasus tertentu yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan negara beserta hal-hal utama yang melatarbelakangi timbulnya kasus-kasus tersebut. Contohnya antara lain diubahnya sistem khilafah menjadi monarki pada masa Dinasti Abbasiyah. Pada masa khulafa al-Rasyidin, kendati dengan cara yang bervariasi, kepala negara dipilih secara demokratis melalui prosedur musyawarah. Akan tetapi, pada masa Dinasti Umayyah dan diikuti Dinasti Abbasiyah, kepala negara ditunjuk berdasarkan pertalian darah atau berdasar garis keturunan. Ini merupakan kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan negara di suatu tempat dan pada suatu masa tertentu, maka metode yang tepat untuk digunakan adalah metode kasus.



J. METODE PENELITIAN FIKIH

1. Pendahuluan

Fikih atau hukum Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Hal ini antara lain karena fikih terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Ilmu fikih dikategorikan sebagai ilmu *al-hal*, yaitu ilmu yang wajib di pelajari, karena dengan ilmu itu pula seseorang baru dapat melaksanakan kewajibannya mengabdikan kepada Allah melalui ibadah seperti shalat, puasa, haji. Ilmu fikih menyangkut banyak kehidupan manusia. Tidak hanya pada masalah ibadah saja tetapi juga mencakup fikih muamalah, tindak pidana, peperangan, dan pemerintahan. Demikian besar fungsi fikih, maka tampak menyatu dengan misi agama Islam yang kehadirannya untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai ketertiban dan keteraturannya.

Berdasarkan pada pengamatan terhadap fungsi hukum Islam atau fikih tersebut, maka munculah serangkaian penelitian dan pengembangan hukum Islam, yaitu penelitian yang ingin melihat seberapa jauh produk-produk hukum Islam tersebut masih sejalan dengan tuntutan zaman, dan bagaimana seharusnya hukum Islam itu dikembangkan dalam rangka merespons dan menjawab secara konkret berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, maka pada bagian ini akan dikemukakan tentang model-model penelitian fikih atau hukum Islam dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian fikih atau hukum Islam serta karakteristiknya.

2. Pengertian dan Karakteristik Hukum Islam

Pengertian hukum Islam di sini dimaksudkan di dalamnya pengertian syariat. Dalam kaitan ini dijumpai penda-



pat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau fikih adalah sekelompok dengan syariat yang maknanya ilmu berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari *nash* Al-Qur'an atau *al-sunnah*. Dengan demikian, yang disebut ilmu fikih adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁸³ Yang dimaksud amal perbuatan manusia adalah segala amal perbuatan orang mukalaf yang berhubungan dengan bidang ibadah, muamalat, kepidanaan, bukan yang berhubungan dengan akidah (kepercayaan). Adapun yang dimaksud dengan dalil terperinci adalah satuan-satuan dalil yang masing-masing menunjuk kepada suatu hukum tertentu.⁸⁴ Berdasarkan batasan tersebut, maka dapat dibedakan antara syariat dan hukum Islam atau fikih. Perbedaan tersebut terlihat pada dasar atau dalil yang digunakannya. Jika syariat pada *nash* Al-Qur'an atau *al-sunnah* secara langsung tanpa memerlukan penalaran, sedangkan hukum Islam didasarkan pada dalil-dalil yang dibangun oleh para ulama melalui penataran atau ijtihad dengan tetap berpegang pada semangat yang terdapat dalam syariat yang bersifat permanen, kekal, dan abadi. Maka fikih atau hukum Islam bersifat temporer dan dapat berubah.

3. Model-model Penelitian Hukum Islam (Fikih)

Pada uraian berikut ini akan disajikan beberapa model penelitian yang dilakukan oleh Harun Nasution, Noel J. Coulson, dan Mohamad Atho Mudzhar.⁸⁵

⁸³ Muhtar Yahya dan Fathurrohman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1986), hlm. 15.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Stugi Islam*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 30.



a. Model Harun Nasution

Harun Nasution sebagai guru besar dalam bidang teologi dan filsafat Islam, Harun Nasution juga mempunyai perhatian terhadap hukum Islam. Melalui penelitiannya, secara ringkas namun mendalam terhadap berbagai literatur tentang hukum Islam dengan menggunakan metode pendekatan sejarah. Harun Nasution mendeskripsikan struktur hukum Islam secara komprehensif, yaitu mulai dari kajian terhadap ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Qur'an, latar belakang, dan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari sejak zaman Nabi sampai dengan sekarang, lengkap dengan beberapa mazhab yang ada di dalamnya.

Melalui pendekatan sejarah, Harun Nasution membagi perkembangan hukum Islam ke dalam 4 periode, yaitu periode nabi, periode sahabat, periode ijtihad serta kemajuan, dan periode taklid serta kemunduran. *Periode Nabi*, pada period Nabi segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk menyelesaikannya, maka Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Secara langsung pembuat hukum adalah Nabi, tetapi secara tidak langsung Tuhanlah pembuat hukum, karena hukum yang dikeluarkan Nabi bersumber pada wahyu dari Tuhan. Nabi bertugas menyampaikan dan melaksanakan hukum yang ditentukan Tuhan. Sumber hukum yang ditinggalkan Nabi untuk zaman- zaman sesudahnya yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. *Periode sahabat*, karena daerah yang dikuasai Islam bertambah luas dan termasuk ke dalamnya daerah di luar Semenanjung Arab yang telah mempunyai kebudayaan tinggi dan susunan masyarakat yang bukan sederhana dibandingkan dengan masyarakat arabia ketika itu, maka sering dijumpai berbagai persoalan hukum. Untuk ini para sahabat di samping berpegang kepa-



da Al-Qur'an dan *al-sunnah* juga kepada Sunnah para sahabat. *Periode ijtihad*, problema hukum yang dihadapi semakin beragam, sebagai akibat dari semakin bertambahnya daerah Islam dengan berbagai macam bangsa masuk Islam dengan membawa berbagai macam adat istiadat, tradisi, dan sistem kemasyarakatan.

Dalam kaitan ini, maka muncul ahli-ahli hukum mujtahid yang disebut imam atau fikih dalam Islam. Pada masa inilah timbulnya mazhab dan hukum Islam, yaitu Abu Hanifah, Imam malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad ibn Hambal. Dari uraian tersebut terlihat bahwa model penelitian hukum Islam yang digunakan Harun Nsution adalah penelitian eksplorasi, deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kesejarahan. Interpretasi yang dilakukan atas data-data historis tersebut selalu dikaitkan dengan konteks sejarahnya.

b. Model Noel J. Coulson

Model Neol J. Coulson menyajikan hasil penelitian di bidang hukum Islam dalam karyanya berjudul *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Penelitiannya yang bersifat deskriptif analitis ini menggunakan pendekatan sejarah. Seluruh informasi tentang perkembangan hukum pada setiap periode selalu dilihat dari faktor-faktor sosiokultural yang memengaruhinya, sehingga tidak ada satu pun produk hukum yang dibuat dari ruang yang hampa sejarah. Hasil penelitiannya dituangkan dalam 3 bagian: (1) Menjelaskan tentang terbentuknya hukum syariat, yang di dalamnya dibahas tentang legalisasi Al-Qur'an, praktik hukum di abad pertama Islam, akar yurisprudensi sebagai mazhab pertama, Imam al-Syafi'i; (2) Berbicara tentang dan praktik hukum Islam di abad pertengahan. Di dalamnya membahas tentang teori hukum klasik, antara kesatuan dan keragaman, dampak aliran dalam



sistem hukum, pemerintahan dan hukum syariat masyarakat Islam dalam hukum syariat; (3) Berbicara tentang hukum Islam di masa Modern yang di dalamnya dibahas tentang penerapan hukum Eropa, hukum syariat kontemporer, taklid dan pembaharuan hukum serta neo ijtihad.⁸⁶

Dari hasil penelitian Coulson, tampak bahwa dengan menggunakan pendekatan historis, Coulson lebih berhasil menggambarkan perjalanan hukum Islam dari sejak berdirinya hingga sekarang secara utuh. Melalui penelitian itu, Coulson telah berhasil menempatkan hukum Islam sebagai perangkat norma dari perilaku teratur dan merupakan suatu lembaga sosial. Di dalam prosesnya, hukum sebagai lembaga sosial memenuhi kebutuhan pokok manusia akan kedamaian dalam masyarakat.

Dalam hukum Islam sebagaimana diketahui, misalnya, memperhatikan sekali masalah keluarga, karena dari keluarga yang baik, makmur, dan bahagia tersusun masyarakat yang baik, makmur, dan bahagia. Oleh karena itu, keteguhan ikatan kekeluargaan perlu dipelihara. Dengan melihat fungsi hukum demikian, maka pengamatan terhadap perubahan sosial harus dijadikan pertimbangan dalam rangka reformasi hukum Islam.

c. Model Mohammad Atho Mudzhar

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Atho Mudzhar adalah untuk mengetahui materi fatwa yang dikemukakan Majelis Ulama Indonesia serta latar belakang sosial-politik yang melatarbelakangi timbulnya fatwa tersebut. Penelitian ini bertolak dari suatu asumsi bahwa produk fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia selalu di-

⁸⁶ *Ibid.*



pengaruhi oleh *setting* sosiokultural dan sosiopolitik, serta fungsi dan status yang harus dimainkan oleh lembaga tersebut. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam empat bab: (1) Mengemukakan tentang latar belakang dan karakteristik Islam di Indonesia serta pengaruhnya terhadap corak hukum Islam. Karakteristik tersebut dilihat dalam empat aspek, yaitu latar belakang kultur, doktrin teologi, stuktur sosial, dan ideologi politik; (2) Dalam bab ini mengemukakan tentang Majelis Ulama Indonesia dari segi latar belakang didirikannya, sosiopolitik yang mengitarinya, hubungan Majelis Ulama dengan pemerintahan dan organisasi Islam serta organisasi non-Islam lainnya dan berbagai fatwa yang dikeluarkannya; (3) Penelitian dalam disertai mengemukakan tentang isi produk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI serta metode yang digunakannya. Fatwa tersebut antara lain meliputi bidang ibadah ritual, masalah keluarga dan perkawinan, kebudayaan, masalah kedokteran, keluarga berencana, dan aliran minoritas dalam Islam; (4) Berisi kesimpulan yang dihasilkan dari studi tersebut. Dalam kesimpulan tersebut dinyatakan, bahwa fatwa MUI dalam kenyataannya tidak selalu konsisten mengikuti pola metodologi dalam penetapan fatwa sebagaimana dijumpai dalam ilmu fikih. Ketidakkonsistenan MUI dalam mematuhi metodologi penetapan hukum tersebut, menurut peneliti disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti faktor politik. Di antara fatwa MUI yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah antara lain mengenai fatwa penyembelihan binatang, keluarga berencana, ibadah ritual, serta pe labuhan udara Jeddah atau Bandara King Abdul Aziz sebagai tempat melakukan *miqot* bagi jemaah haji Indonesia yang menggunakan pesawat terbang.

Produk-produk hukum yang sangat dipengaruhi oleh



berbagai faktor lingkungan sosial banyak terjadi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, kriminalitas, masalah perkawinan. Penelitian tersebut bermanfaat dalam upaya membuka pikiran dan pandangan para ulama fikih di Indonesia yang cenderung kurang berani mengeluarkan fatwa, atau kurang produktif dalam menjawab berbagai masalah aktual yang muncul di masyarakat sebagai akibat dari kekurangpahaman dalam memahami situasi yang berkembang, dan bagaimana memanfaatkan situasi tersebut dalam rangka melahirkan produk hukum.

Penelitian tersebut pada intinya sejalan dengan penelitian yang dilakukan Coulson yang menggunakan pendekatan historis dalam penelitiannya. Dengan demikian, hukum Islam baik langsung maupun tidak langsung masuk dalam kategori sosial. Hal ini sama sekali tidak mengganggu kesucian dan kesakralan Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum Islam tersebut. Sebab yang dipersoalkan di sini bukan mempertanyakan relevan dan tidaknya Al-Qur'an tersebut tetapi yang dipersoalkan adalah apakah hasil pemahanan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya mengenai ayat-ayat ahkam tersebut masih sejalan dengan tuntutan zaman atau tidak. Karena dengan cara inilah makna kehadiran Al-Qur'an secara fungsional dapat dirasakan oleh masyarakat.

K. PENELITIAN QANUN DAN SYARIAT

1. Pendahuluan

Setiap negara memerlukan aturan-aturan hukum yang mengatur, membatasi, dan melindungi hak asasi warganya serta menjamin kelangsungan keseimbangan anggota masyarakat yang diadakan atas kehendak dan keinsafan tiap-



tiap warganya itu sendiri. Salah satu tolok ukur kemajuan suatu negara adalah ketaatan warga dan penyelenggara negara terhadap hukum.[1] Di antara hukum yang berkembang di dunia adalah hukum yang berdasarkan norma agama. Sejak dahulu norma agama selalu memengaruhi hukum suatu negara, sehingga Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa agama berjalani erat dengan negara. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya; dan tanpa agama, negara menjadi sebuah organisasi tirani.⁸⁷

Salah satu hukum yang didasarkan atas norma agama adalah hukum Islam. Hukum Islam sebagai hukum Allah diturunkan di muka bumi dengan tujuan untuk menegakkan kemaslahatan, kedamaian, dan kebahagiaan umat manusia.⁸⁸ Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menjelaskan metodologi penelitian qanun dan syariat dengan kata lain metodologi penelitian hukum Islam.

2. Pengertian Qanun dan Syariat

a. Qanun

Qanun merupakan bentuk hukum nasional yang telah menjadi legal-formal. Artinya, hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif.⁸⁹ Dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang me-

⁸⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Studi Agama: Normativis atau Historis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 168.

⁸⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 7.

⁸⁹ *Ibid.*



langgarnya.⁹⁰

Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk:

1. Mendatangkan kemakmuran;
2. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai;
3. Mencapai dan menegakkan keadilan;
4. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.⁹¹

Qanun atau peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia bersumber pada tiga hukum: hukum kolonial, hukum Islam, dan hukum adat, yang dinamai "trikotomi" sebagai simbol dari persaingan tiga hukum tersebut.⁹²

b. Syariat

Syariat secara etimologis (bahasa) berarti jalan keluarnya air untuk minum.⁹³ Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Secara terminologis (istilah), syariat menurut Syaikh Mahmud Syaltut mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hamba-hambanya untuk diikuti.⁹⁴ Adapun menurut Manna al-Qaṭṭān, syariat berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.⁹⁵

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan,

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 13.

⁹² Jaih Mubarak, *Peradilan Agama: Setelah UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 11 Tahun 2006*, (Bandung: Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati. 2007), hlm. 3.

⁹³ Muhammad Faruq Nabhan, *al-Madhal li al-Tasri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Shadir. t.t.), jilid ke-8, hlm. 10. Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1993), cet. ke-5, hlm. 31.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*



bahwa syariat itu identik dengan agama. Dengan kata lain, syariat adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam yang meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. *al-Maa'idah* (5):48, *asy-Syuraa* (42):13, dan *al-Jaatsiyah* (45):18. Namun pada perkembangan selanjutnya, syariat ini tertuju atau digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).

3. Metodologi Penelitian Qanun dan Syariah

Hukum sebagai kaidah memiliki tiga asas, yaitu: yuridis, filosofis, dan sosiologis.⁹⁶ Ada empat pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum Islam, yaitu: (1) pendekatan teologi, (2) pendekatan filsafat, (3) pendekatan sejarah, (4) pendekatan ilmu-ilmu sosial. Di samping itu, pendekatan bahasa pun merupakan alat untuk pelengkap pendekatan-pendekatan tersebut.⁹⁷

Pertama, pendekatan teologi. Pendekatan ini penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, karena teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan tentang Tuhan semata melainkan teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang; suatu refleksi ketuhanan menentukan secara jelas dan koheren mengenai arti dan implikasi makna-mak-

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Ilmu: Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam*, (Bandung: Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati. 2007), hlm. 32-50.



na yang terkandung dalam hukum-Nya.⁹⁸

Kedua, pendekatan filsafat. Filsafat hukum Islam seperti filsafat pada umumnya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Filsafat Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat hukum Islam, hakikat keadilan, hakikat pembuat hukum, tujuan hukum, sebab orang harus taat terhadap hukum, dan lain sebagainya.⁹⁹ Senada dengan pendapat tersebut, menurut Abu Zahrah yang didukung oleh muridnya Abd. Wahhab Khalaf mengatakan, bahwa aturan hidup yang terdapat dalam Al-Qur'an hanya dapat dilacak melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan semantik (*al-qawâ'id al-usûliyyat al-lugawiyat*) dan pendekatan filosofis (*al-qawâ'id al-usûliyyat al-tasrî'iyyat asrâr al-tasrî'iyyat wa maqâsidihh*).¹⁰⁰

Kedua pendekatan di atas (bahasa dan filosofis) diakui Fazlur Rahman sebagai mekanisme hukum yang sistematis. Menurutny, mekanisme hukum tertumpu pada dua: Usul Fikih (prinsip-prinsip hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits melalui pendekatan bahasa) dan *Maqasid al-Sari'at* (mekanisme hukum yang didasarkan pada tujuan-tujuan hukum dan filsafat hukum yang membahas dan memerinci dasar-dasar moral keagamaan dari hukum).¹⁰¹

Ketiga, pendekatan sejarah atau metode sejarah. Pendekatan sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, pada akhirnya, sejarah harus berbicara fakta; dengan sendirinya nilai-nilai

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 33.

⁹⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Ilmu: Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam*, (t.tp.: t.p), hlm. 37.

¹⁰⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung:Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati. 2000), hlm. 15.

¹⁰¹ *Ibid*.



terabaikan. Meskipun demikian, dapat diakui bahwa pendekatan sejarah penting dilakukan dalam rangka mengetahui latar belakang hukum tersebut dikeluarkan.¹⁰²

Sejarah memang penting digunakan untuk mengetahui *setting* sosiohistoris suatu hukum dalam realitas masyarakat, tetapi persoalannya adalah sejarah mengandung masa lampau yang bisa jadi data-datanya masih mengandung kerelatifan meskipun ia memiliki makna.¹⁰³

Keempat, pendekatan ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial yang dapat dijadikan pendekatan dalam penelitian hukum Islam adalah psikologi, sosiologi, dan antropologi. Berikut ini akan penulis sampaikan penjelasan dari masing-masing ilmu tersebut.

1. Psikologi Agama. Hubungan psikologi dan agama dapat dijelaskan sebagai berikut. Psikologi menyangkut manusia dan lingkungannya, dan agama menyangkut alam metafisika, Allah, dan dewa-dewa. Dengan demikian, psikologi tidak dapat menyatakan sesuatu tentang agama tetapi ia berusaha memahami tingkah laku manusia yang beragama. Ia ingin memahami perilaku manusia atau sekelompok manusia yang mendefinisikan dirinya pada suatu agama tertentu. Selanjutnya perlu dinyatakan, bahwa perbuatan "beriman" adalah suatu "tindakan manusia" (*human act*) yang terbuka untuk penyelidikan psikologi. Adapun benar dan salahnya suatu agama atau hukum tidak dapat dijawab oleh psikologi atau pengetahuan empiris lainnya. Psikologi tidak mengejar kebenaran teologis atau metafisis, tetapi kebenaran psikologis.

¹⁰² Abu Zahrar, *Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr. t.t), hlm. 117-364 dan lihat juga, Abd. Wahhab Khalaf, 'Ilm Ushul Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr. 1978), hlm. 140-197.

¹⁰³ *Ibid.*



Sebagai contoh, psikologi dapat membuktikan secara empiris bahwa orang beragama atau melaksanakan ajaran agama untuk mengatasi frustrasi, untuk menjaga tata moral atau akhlak dan kemasyarakatan.¹⁰⁴

2. Sosiologi Agama. Secara fungsional, agama bertindak sebagai alat untuk memperkuat norma-norma dalam konteks sosial dan mengurangi atau meredakan kegelisahan dan ketegangan. Jelaslah bahwa pendekatan sosial dalam memahami agama memandang agama sebagai fenomena sosial, fakta sosial, dan agama dilihat dari dimensi sosiologisnya dengan mempelajari segi-segi empiris sosiologis.¹⁰⁵
3. Antropologi Agama. Studi agama dengan pendekatan antropologi menganggap agama atau hukum sebagai sistem kebudayaan yang lebih meresap dan menyebar luas yang berkedudukan untuk menciptakan serta mengembangkan keteraturan hidup.¹⁰⁶

Metode sosiologi hukum sebagai metode keempat yang digunakan dalam menggali hukum Islam memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dalam realitas masyarakat. Rahardjo menjelaskan, bahwa sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, dan tidak melakukan penilaian terhadap hukum.[23]

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Sutjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 310.

¹⁰⁶ *Ibid.*



L. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan di atas dapat diketahui bahwa:

1. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.
2. Penelitian hukum normatif Islam dapat dibedakan menjadi: Inventarisasi hukum positif, penelitian hukum Islam pada ranah sumber, penelitian hukum Islam pada ranah doktrin (pemikiran), penelitian asas-asas hukum Islam, penelitian istinbat ahkam, penelitian hukum Islam perbandingan, penelitian sejarah hukum Islam (*Tarikh Tasyri'*), penelitian siyasah, penelitian fikih, penelitian qanun dan syariat.



SAMPLE

6

PENELITIAN HUKUM ISLAM EMPIRIS

A. PENDAHULUAN

Analog dengan pencabangan dalam disiplin biologi yang mengenal “*the skin in biology*” dari “*the skin out biology*”, maka dalam ilmu hukum pun dapat dibedakan ke dalam dua cabang spesialisasi ini. Di satu sisi, hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu “*skin in sistem*” (studi mengenai *law in book*), sedang di sisi lain, hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai “*skin out sistem*” (studi mengenai *law in action*).

Studi terhadap hukum sebagai suatu “*skin out*” sistem ini karena menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain. Karenanya, jelas hal ini merupakan studi sosial yang empirik sifatnya. Dalam kaitan ini, menurut Leon Mayhew, bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel lainnya.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Lihta Soetandyo Wignyosoebroto, “Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi”, dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 102.

Dalam konteks demikian, hukum sebagai gejala sosial empirik dapat dipelajari di satu sisi sebagai suatu *independent variable* yang menimbulkan efek-efek dari berbagai kehidupan sosial, di sisi lain sebagai suatu *dependent variable* yang muncul sebagai suatu *resultante* berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial (studi mengenai *law in process*).

Melihat substansi studi yang demikian, jelaslah bahwa studi ini tidak lagi merupakan studi hukum dalam arti “yurisprudensi”, akan tetapi sudah merupakan suatu spesialisasi studi tersendiri yang lazim disebut dengan “*sociology of law*” (apabila fokus studinya dibatasi kepada hukum sebagai “*dependent variabel*” atau “*law and society*” apabila fokus studinya dipusatkan kepada hukum sebagai “*independent variable*.”

Perbedaan antara studi hukum yang normatif dan empiris membawa konsekuensi pada langkah-langkah teknis penelitian yang harus ditempuh. Meskipun dasar-dasar metodologik antara keduanya tidak berbeda, namun langkah-langkah teknis dan desain-desain penelitian yang dibuat dalam dua tipe penelitian hukum tersebut kenyataannya berbeda. Satu sisi menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dari analisis normatif-kualitatif, sedangkan yang lain lebih menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empirik-kuantitatif.¹⁰⁸

Dapat ditegaskan, bahwa langkah-langkah dari desain penelitian hukum empiris itu mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah apabila dikatakan bahwa penelitian hukum empiris ini dapat juga disebut sebagai “penelitian hukum sosiologis” (*socio-legal research*).

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 104.



Dalam konteks hukum Islam, tingkat keempirisan hukumnya terletak pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hukum Islam ini terletak pada level ketiga, yakni hukum Islam sebagaimana yang dipraktikkan oleh suatu masyarakat Muslim. Di atas telah dijelaskan bahwa hukum Islam itu secara garis besar dapat diteliti pada tiga level, yang pertama pada level sumber; yang kedua pada level pemikiran; dan yang ketiga pada level praktik di masyarakat. Pada bagian terakhir ini menjadi layak untuk diteliti, karena praktik masyarakat Islam bisa sangat variatif dan agak berbeda dari hukum yang tertulis secara teoretis.

B. JUDUL PENELITIAN

Judul penelitian harus menunjukkan lingkup penelitian dan sepenuhnya menyatakan subjek utama penelitian yang sebenarnya. *Pertama*, tulislah judul dalam bentuk menyeluruh, luas, banyak terminologi, termasuk seluruh isi penelitian dengan pemilihan kata-kata yang tepat dan pendek. Kata-kata yang tidak diperlukan dan mubazir seyogianya dihilangkan. *Kedua*, judul harus jelas dan menarik. Untuk mencegah agar judul tidak terlalu panjang dan berputar-putar, apabila perlu dibuat subjudul dengan tanpa kehilangan kesatuan pengertian judul. *Ketiga*, kejelasan judul janganlah mengorbankan keringkasan. *Keempat*, apabila menemui kesulitan dalam merumuskan judul, rumuskan terlebih dahulu tujuan penelitian sebagai batu loncatan untuk merumuskan judul penelitian.



C. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Dalam suatu penelitian ilmiah sangat dibutuhkan terhadap perumusan masalah yang mau diteliti. Tanpa ada kejelasan dari perumusan masalah akan mengakibatkan kekeburan terhadap objek peneliti. Di antara permasalahan yang dihadapi para peneliti dalam melakukan tugas penelitiannya di lapangan adalah bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan penelitian secara jelas dan lengkap.¹⁰⁹

Oleh sebab itu, kedua hal di atas merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari bagian penelitian. Sehingga sangat diharapkan pemahaman yang baik dalam melakukan identifikasi dan perumusan masalah.

Kendatipun demikian, tidak sedikit pula yang melihat masalah ini hanya hal yang sepele yang tidak perlu dianggap penting. Padahal, jenis apa pun penelitian yang dilakukan titik tolaknya tidak lain bersumber pada masalah. Tanpa masalah, sekali saya tegaskan penelitian tidak akan dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, sangat perlu dirasakan untuk membahas dan mengulas identifikasi permasalahan dari perumusan masalah dalam makalah ini sebagai suatu upaya untuk memberikan pemahaman yang memadai.

1. Identifikasi Masalah

Sebelum melakukan perumusan masalah seorang peneliti harus dapat melakukan apa yang disebut dengan identifikasi masalah. Setelah hal tersebut, peneliti akan dapat melakukan langkah berikutnya untuk merumuskan perma-

¹⁰⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 106.



lasahan dari penelitian yang sedang dilakukan.

Masalah adalah lebih dari sekadar pertanyaan, dan jelas berbeda dengan tujuan. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanya dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban.¹¹⁰

Dapat dipahami dari kutipan di atas bahwa paling tidak sesuatu itu dikatakan sebagai permasalahan apabila mempunyai dua faktor atau lebih yang kemudian dari faktor-faktor akan memunculkan sebuah pertanyaan dan permasalahan disebabkan hubungan keduanya. Selanjutnya dari tanda tanya yang muncul dari hasil hubungan faktor-faktor tersebut akan mengarahkan kita kepada jawaban yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Di samping itu pula para peneliti sebelum melakukan penelitiannya harus terlebih dahulu menginventarisasi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat menentukan mana yang perlu diteliti dan mana yang tidak. Pengulangan penelitian kadang-kadang diperlukan, misalnya dalam hal penelitian deskriptif yang dilakukan pada suatu kurun waktu-waktu tertentu, perlu diulang kembali pada kurun waktu atau tempat yang berlainan. Studi eksperimental yang telah dilakukan perlu diulang untuk menguji validitas hasilnya.¹¹¹

Dengan demikian, ada suatu sifat yang harus dipegang peneliti dalam lapangan penelitian bahwa penelitian yang

¹¹⁰ Guba and S. Lincoln, *Effective Evaluation* (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 1981), hlm. 218, dalam Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 93.

¹¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 107.



dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya bersifat relatif dan tidak mutlak kebenarannya. Sehingga bisa diadakan peninjauan ulang kembali terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Apakah itu dari sisi prosedur yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan, dan sebagainya.

Dari tinjauan ulang itu akan dihasilkan kembali sebuah temuan baru atau berupa kritik terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kemudian itu yang kita jadikan sebagai sebuah acuan terhadap masalah akan dibahas pada penelitian yang akan kita lakukan.

Maka untuk memperoleh penelitian, kita harus peka terhadap permasalahan. Apabila selama ini selalu menerima apa adanya tanpa curiga (bertanya-tanya), maka harus ia ubah pandangan dari persepsinya tentang.¹¹²

- a. Semua yang telah dituliskan dalam literatur.
- b. Prosedur dari para instruktur atau seniornya.
- c. Praktik-praktik profesi yang selama ini dikerjakan atau dilihatnya.

Berpijak dari poin di atas, sikap kritis, berpikir logis, dan ragu merupakan suatu langkah untuk dapat memudahkan mendapatkan permasalahan.

Untuk melokalisir permasalahan penelitian, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:¹¹³

1. Lakukan eksplorasi literatur, pada aspek tertentu dalam suatu bidang atau disiplin keilmuan dari kumpulan teori-teori, pelajan perkembangan atau perubahannya, kelemahan-kelemahannya, kesenjangan-kesenjangannya, atau inkonsistensinya. Tindakan ini akan lebih meng-

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 108.



arahkan kita pada permasalahan untuk diteliti lebih lanjut.

2. Mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah untuk memperkaya atau menangkap permasalahan-permasalahan. Misalnya dalam suatu seminar simposium, panel diskusi, lokakarya, pertemuan ilmiah, profesi kuliah tamu, ceramah-ceramah ilmiah, atau mengunjungi pusat-pusat penelitian, dan sebagainya.
3. Menyerap dari pengalaman sehari-hari dalam menjalani praktik profesinya.
4. Berdiskusi secara individual dengan teman-teman seprofesi.

Dari keempat poin di atas merupakan suatu pengantar kepada kita untuk dapat mengidentifikasi permasalahan. Tetapi walaupun demikian, langkah-langkah tersebut baru pada tataran pengarahannya kepada peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan objek yang diteliti.

Tidak hanya cukup memadukan dengan langkah-langkah tersebut, paling tidak ada tiga langkah lagi yang harus kita lakukan untuk lebih mengkonkretkan penelitian dalam rangka mendapatkan masalah yang mau diteliti.

1. Melakukan analisis terhadap semua yang diperoleh, diserap, diketahui, atau yang telah diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Carilah kesenjangan dalam penjelasannya, atau carilah kesimpulan yang belum teruji.
 - b. Dapatkan konflik pendapat (polemik) tentang sesuatu hal.
 - c. Carilah saran konkret yang harus diteliti lebih lanjut dari suatu laporan penelitian.



- d. Selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu prosedur inti atau rutin yang selalu dipakai setiap hari.
 - e. Baca, dengar, lihat, dan refleksikan dalam bentuk pertanyaan, misal: apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya.
2. Membatasi atas dasar minat atau disiplin ilmu yang sedang digeluti.
 3. Calon peneliti harus berbekal *scientific mind* dan *prepared mind*. Pertama dalam arti harus berpandangan objektif, independent, dan memiliki wawasan. Adapun yang kedua dalam arti selalu siap untuk dapat menangkap permasalahan yang muncul selama melakukan observasi.¹¹⁴

Dengan melakukan langkah-langkah di atas, akan memungkinkan kita dapat lebih mudah menemukan sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang akan dirumuskan. Sehingga identifikasi masalah yang akan kita dapatkan sekalipun tidak mencapai tahap kesempurnaan penuh paling tidak mendekati pada level kesempurnaan.

Senada dengan itu pula, dalam panduan penulisan karya ilmiah skripsi disebutkan bahwa sebagai suatu pertanyaan, maka masalah dalam penelitian dapat berbentuk:

- a. Kesenjangan, yaitu adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara perencanaan dan pelaksanaan, antara *das Sollen* dan *das Sein*.
- b. Kefakuman atau kekosongan, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang membutuhkan jawaban.
- c. Kontradiktif, yaitu adanya perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 109.



Oleh sebab itu, dalam penelitian yang paling diperhatikan adalah proses penelitian yang dilakukan bukan kepada hasilnya. Pada umumnya dalam penelitian apabila proses yang dilakukan betul mengikuti prosedur yang telah ditentukan kemungkinan besar hasilnya pun akan baik pula.

2. Rumusan Masalah

Setelah kita melakukan identifikasi terhadap masalah yang akan kita lakukan terhadap suatu objek, maka untuk selanjutnya yang dilakukan adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah penelitian merupakan kerja yang bukan mudah, termasuk bagi peneliti yang sudah berpengalaman. Padahal, masalah selalu ada di sekeliling kita.

Masalah pada hakikatnya adalah suatu pertanyaan yang mengundang jawaban, dan akan diperoleh melalui penelitian. Adapun rumusan masalah yaitu pertanyaan konkret dari apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Dengan demikian, antara masalah dan tujuan penelitian sangat erat kaitannya.¹¹⁵

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambiguity*), baik yang telah ada celah (*gap*) baik antar-kegiatan maupun antarfenomena, baik yang telah ada maupun yang akan ada. Penelitian diharapkan dapat memecahkan masalah itu, atau sedikitnya menutup celah yang terjadi.¹¹⁶

Dapat dipahami berarti masalah hanya akan didapatkan dari hasil cermatan kita terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang kemudian dituangkan dalam bentuk

¹¹⁵ Fakultas Syanah, *Pedoman Penulisan Skripsi dari Karya Ikniyah*, (Medan: IAIN Press, 2004), hlm. 17.

¹¹⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 133.



suatu rumusan yang harus perlu didapatkan jawabannya. Sebab masalah itu sebenarnya berada di sekeliling kita hanya mampukah kita menuangkannya dalam bentuk rumusan masalah yang jelas.

Berkaitan dengan itu pula pemecahan masalah yang dirumuskan dalam penelitian sangat berguna untuk membersihkan kebingungan, untuk memisahkan kemenduaan, untuk mengatasi rintangan ataupun untuk menutup celah antar-kegiatan atau fenomena. Karenanya, peneliti harus dapat memilih suatu masalah bagi penelitiannya, dan merumuskannya untuk memperoleh jawaban terhadap masalah tersebut. Perumusan masalah merupakan *hulu* dari penelitian, dan merupakan langkah yang penting dari pekerjaan yang sulit dalam penelitian ilmiah.¹¹⁷

Adapun kriteria permasalahan yang baik atau *research-bel* sebagai berikut, menurut Bambang Sunggono bahwa sesuatu permasalahan dinilai dalam kategori baik apabila:¹¹⁸

a. Mempunyai Kontribusi Profesional.

Artinya, hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu peneliti.

b. Mempunyai derajat keunikan dan keaslian.

Beberapa institusi menganggap penting faktor keaslian permasalahan penelitian itu. Namun dapat juga dilakukan pengulangan terhadap penelitian sebelumnya sebagai upaya untuk memperdalam yang telah ada, maka hal ini masih dikatakan sebagai penelitian yang asli.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 109-110.



c. Layak untuk dilaksanakan.

Penelitian yang selalu memerlukan waktu dan biaya, maka dengan demikian kita harus dapat mengukur dan memperkirakan fasilitas untuk mendukung terlaksananya penelitian tersebut.

Agaknya dari pernyataan di atas, kita akan dapat melihat lebih jauh bahwa dalam merumuskan masalah tersebut harus juga dilihat kriteria seperti keaslian dan keunikan data, kontribusi penelitian serta kelayakannya untuk dijalankan. Karena tanpa terpenuhi persyaratan ini, maka penelitian yang kita lakukan akan dinilai tidak punya kualitas yang baik. Dengan demikian, penelitian itu tidak menutup kemungkinan tidak berarti sama sekali, kalau hanya mengulang hasil dari peneliti sebelumnya ditambah lagi dengan tidak punya kontribusi.

Tidak jauh berbeda dengan dengan Bambang Sunggono di atas, M. Nazir melihat paling tidak ada tiga ciri-ciri masalah yang dianggap baik dengan kriteria sebagai berikut:

a. *Masalah harus ada nilai penelitian.*

Masalah untuk suatu penelitian tidak dipilih seadanya saja. Masalah harus mempunyai isi yang mempunyai nilai penelitian, yaitu mempunyai kegunaan tertentu serta dapat digunakan untuk suatu keperluan. Oleh sebab itu, dalam memilih masalah akan mempunyai nilai penelitian jika hal-hal berikut diperhatikan.¹¹⁹

- 1) Masalah haruslah mempunyai keaslian.
- 2) Masalah harus menyatakan suatu hubungan.
- 3) Masalah harus merupakan hal yang penting.

¹¹⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 3, hlm. 134-36. lihat juga Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 78.



- 4) Masalah harus dapat diuji.
- 5) Masalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.

b. *Masalah harus fisibel.*

Masalah yang dipilih harus mempunyai *fisibilities*, yaitu, masalah tersebut dapat dipecahkan. Ini berarti:

- 1) Data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia.
- 2) Biaya untuk memecahkan masalah, secara relatif harus dalam batas-batas kemampuan.
- 3) Waktu untuk memecahkan masalah harus wajar.
- 4) Biaya dan hasil harus seimbang.
- 5) Administrasi dari sponsor harus kuat.
- 6) Tidak bertentangan dengan hukum dan adat.

c. *Masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti.*

Masalah yang dipilih, selain mempunyai nilai ilmiah serta fisibel, juga harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti sendiri. Dalam hal ini masalah yang dipilih sekurang-kurangnya:¹²⁰

1. Menarik bagi si peneliti.
2. Masalah harus sesuai dengan kualifikasi.

Apabila kita komparasi kedua pendapat di atas, akan terlihat bahwa ulasan-ulasan yang diuraikan M. Nazir terlihat lebih dalam dan detail. Sehingga akan lebih memberikan wawasan dan bekal yang cukup memadai kepada para peneliti untuk dapat bekerja sesuai dengan prosedur yang jelas.

Namun satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita dari uraian M. Nazir bahwa orang yang mengadakan penelitian untuk merumuskan masalah tersebut merupakan orang

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 139.



yang berkompeten dan berkualifikasi di bidangnya. Artinya, dengan latar belakang demikian, maka kesulitan dan kendala-kendala yang dihadapi akan lebih sedikit dibanding yang tidak punya kualifikasi dalam hal tersebut.

Maka peneliti itu harus mempunyai keuletan dan motivasi yang tinggi dengan ketertarikan yang tinggi terhadap permasalahan yang diteliti, serta mempunyai naluri intelektual (yang serba ingin tahu), mampu memilih dan memilah dan mengevaluasi penelitian. Kemudian dapat bertindak sistematis dalam menulis dengan tajam, teliti, sabar, dan sebagainya.¹²¹

Bagian yang tidak kalah pentingnya dalam perumusan masalah ini adalah mengenai sumber untuk memperoleh masalah. Sebenarnya banyak sekali masalah yang perlu dipecahkan berada di sekeliling peneliti. Maka yang menjadi kendala untuk memperoleh masalah adalah kemampuan peneliti menggali dan mengidentifikasi masalah serta mengetahui sumber-sumber di mana masalah penelitian diperoleh dengan mudah. Sumber-sumber masalah diperoleh antara lain:¹²²

- a. Pengamatan terhadap pengetahuan.
- b. Bacaan.
- c. Analisis bidang pengetahuan.
- d. Ulangan serta keperluan penelitian.
- e. Cabang studi yang sedang dikerjakan.
- f. Pengalaman dan catatan pribadi.
- g. Praktik serta keinginan masyarakat.
- h. Pelajaran dari ajaran yang sedang diikuti.
- i. Pengamatan terhadap alam sekeliling.

¹²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 110.

¹²² *Ibid.*, hlm. 140.



j. Diskusi-diskusi ilmiah.

Dengan kata lain, sumber yang akan kita jadikan dalam perumusan masalah tidak terlepas dari pengalaman dan hasil bacaan kita terhadap masalah yang akan kita rumuskan pada tahap selanjutnya.

Terakhir yang menjadi bagian tidak dapat diabaikan adalah bentuk ketentuan umum perumusan masalah:¹²³

- a. Dirumuskan dalam kalimat tanya.
- b. Dirumuskan dengan padat dan jelas.
- c. Memungkinkan untuk pengumpulan data sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.

Dengan demikian, identifikasi dari rumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan bagian terpenting dari penelitian itu sendiri. Kebutuhan terhadapnya dalam skala prioritas adalah pada tingkatan primer atau pokok. Sebab penelitian yang akan dijalankan pada tahap berikutnya berpijak dari rumusan masalah yang kita telah kita rumuskan sebelumnya.

Oleh sebab itu, suatu penelitian apa pun itu tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya upaya yang baik dalam mengidentifikasi sekaligus merumuskan masalah terhadap objek yang akan kita teliti.

Identifikasi yang dilakukan dengan persyaratan dan kriteria yang disebutkan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dengan benar untuk mencapai suatu rumusan yang benar pula. Tentunya semua itu akan tercapai apabila mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

¹²³ Fakultas Syanah, *Pedoman Penulisan Skripsi dari Karya Ilmiah*, hlm. 20.



D. TUJUAN PENELITIAN

Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum, dan terdapat juga yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan sub-permasalahannya.

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.

Apabila peneliti menghadapi kesulitan dalam merumuskan tujuan penelitian, maka hal itu pertanda ide permasalahan penelitian yang akan dipecahkan belum dikuasai dengan baik. Oleh karena itu, lebih baik kiranya apabila tujuan penelitian yang secara keseluruhan merupakan tujuan umum penelitian tersebut. Tujuan penelitian seyogianya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dan dikorelasikan dalam penelitian tersebut.

E. HIPOTESIS

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Apabila peneliti tidak memiliki opini atau dugaan tentang jawaban permasalahan penelitiannya, maka penelitian ini tidak ada hipotesisnya.

Memang ada perbedaan pendapat tentang apakah setiap permasalahan harus ada hipotesisnya atau tidak. Di satu pihak menyatakan bahwa apabila peneliti tidak memiliki opini tentang hasil penelitiannya, maka tidak diperlukan adanya hipotesis. Di pihak lain, menyatakan bahwa dalam kasus semacam itu, peneliti harus menyatakan hipotesis nolnya, dengan kata lain peneliti harus mengajukan hipotesis yang



menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara bermakna dalam penelitian yang akan dilakukannya. Dalam penelitian hukum, hipotesis dapat ada atau tidak ada, tergantung dari tipe dan kerangka teori atau metodologinya.

Pada umumnya dikenal adanya hipotesis:

- a. Kerja (*research hypothesis*), biasanya dirumuskan dalam pernyataan: ‘Jika dalam, maka artinya: ‘Jika tidak ada akta X, maka tentu juga fakta laki Y’. Di sini, X disebut variabel penyebab, dan Y merupakan variabel akibat;
- b. Penguji (*statistical hypothesis*) dikenai juga sebagai F (hipotesis nihil [Ho] dari hipotesis alternatif [Ha]. Hipotesis/Ho biasanya dirumuskan dalam pernyataan; “tidak. Adapun hipotesis/Ha biasanya dirumuskan: “lebih besar dan lebih kecil.”

Jadi, hipotesis alternatif dirumuskan dalam bentuk adanya hubungan antara X dan Y, atau dalam bentuk adanya perbedaan keadaan antara dua variabel.

Secara umum untuk merumuskan suatu hipotesis hendaknya:

1. Menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih.
2. Dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (deklaratif).
3. Dirumuskan secara singkat, jelas, dan padat.
4. Dapat diuji kebenarannya dengan cara mengumpulkan data empirik.¹²⁴

1. Teori dan Hipotesis

Dalam mempelajari dasar-dasar penelitian, orang harus

¹²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 106.



terlebih dahulu memahami sebaik-baiknya apa yang disebut teori dan hipotesis. Teori dibutuhkan sebagai pegangan-pegangan pokok secara umum, sedangkan hipotesis dibutuhkan sebagai penjelasan problematik yang dicarikan pemecahan.

Dalam hubungannya dengan data, teori dibangun dengan data yang tersusun dalam satu sistem pemikiran yang sistematis. Karena itu, maka pengumpulan data dilakukan harus sesudah segala sesuatu pun mengenai masalah penelitian telah selesai direncanakan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa teori tidak tepat disamakan dengan pengertian “semacam metafisik yang tidak praktis”, justru segala tindakan praktis di dalam kehidupan didasarkan atas satu sudut pandangan dari teori tertentu. Misalnya, tindakan pedagogik tertentu bagi seorang guru didasarkan atas dasar teori perubahan tingkah laku. Juga segala tindakan praktis pemerintah di bidang

Dalam hubungannya dengan hipotesis dalam suatu penelitian, suatu teori perbedaan adalah perumusan; sementara tentang suatu kemungkinan dalil, teori sebagai titik satu dengan permulaan di dalam arti bahwa dari situlah bersumbernya hipotesis yang akan alternatif dibuktikan.

Hipotesis yang berasal dari kata “*hipo*” berarti kurang atau lemah dari “*tesis*” hipotesis, atau tesis yang berarti teori yang disajikan sebagai bukti. Dalam pembicaraan ini hipo diartikan lemah dan tesis diartikan teori, proposisi, atau pernyataan. Jadi, hubungan hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu tersebut dapat dibuktikan kenyataannya. Jika suatu hipotesis telah terbukti kebenarannya, ia akan 1) Hipo berubah namanya disebut tesis, jadi merupakan teori.

Hipotesis dapat diterima tetapi dapat ditolak, diterima



apabila bahan-bahan “kota” penelitian membenarkan kenyataan dan ditolak apabila menyangkal. Jumlah hipotesis sangat banyak, dapat tidak terbatas. Sebab apa saja yang diselidiki dapat dinyatakan dalam bentuk hipotesis, kecuali jika kita belum mempunyai kebenaran pengetahuan apa-apa tentang gejala yang akan diselidiki. Hipotesis dapat bersumber pengalaman-pengalaman praktik; teori-teori; kesan-kesan hasil diskusi dan kajian pembahasan dalam kepustakaan dan sebagainya.

Kalau kita ingin menyatakan hipotesis kita dapat menyatakan “ada” dan “tidak ada”. Hipotesis nihil atau nol adalah hipotesis yang menyatakan “tidak ada” perbedaan atau tidak ada hubungan antara sampel yang satu dengan yang lain, atau prosedur satu dengan yang lain, atau ukuran satu dengan yang lain. Adapun hipotesis yang lain adalah hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan antara dua buah ukuran atau prosedur atau antara sampel satu dengan sampel yang lain. Hipotesis nihil biasa diberikan kode H_0 , dan hipotesis alternatif biasa diberi kode H_a dalam statistik uji hipotesis.

Dalam hubungannya dengan sifat penelitian, maka ada dua macam hipotesis, yaitu hipotesis tentang perbedaan dan hipotesis tentang hubungan. Hipotesis perbedaan mendasari berbagai penelitian komparatif sedang hipotesis hubungan mendasari berbagai penelitian korelatif. Pernyataan kedua hipotesis tersebut dapat dirumuskan misalnya:

- 1) Hipotesis perbedaan “Tidak ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang berasal dari dalam kota dengan yang berasal dari luar kota di sebuah SMP di kota.”
- 2) Hipotesis hubungan ‘Ada hubungan positif antara tingkat IQ seseorang dengan prestasi belajar.”



Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empirik. Dalam langkah-langkah penelitian, hipotesis merupakan rangkuman dan kesimpulan-kesimpulan teoretik yang diperoleh dari kajian kepustakaan, supaya mudah diuji harus dirumuskan secara operasional. Walaupun tidak ada aturan umum untuk merumuskan hipotesis, tetapi dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hipotesis hendaklah dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan.
2. Hipotesis hendaklah menyatakan peraturan antara dua variabel atau lebih.
3. Hipotesis hendaklah dirumuskan secara jelas dan padat.
4. Hipotesis hendaklah mungkin untuk diuji, artinya hendaklah orang mungkin mengumpulkan data guna menguji hipotesis tersebut.

Dalam penelitian yang diarahkan pada pengembangan pengetahuan ilmiah, ada yang lebih dititikberatkan pada pembangunan atau pembentukan teori (*theory building*) dan ada yang dititikberatkan pada pengujian teori (*theory testing*). Namun demikian, titik berat kepada tujuan penelitian. Hal itu memiliki konsekuensi terhadap fungsi teori, kerangka berpikir, hipotesis, dan tahapan penelitian.

Dalam penelitian *grounded research*, terutama yang menggunakan pendekatan antropologis, lebih dititikberatkan pada pembentukan teori. Teori dibentuk berdasarkan data yang dikumpulkan dari realitas sosial. Ia berfungsi sebagai pengisi kekosongan teori. Adapun hipotesis diinduksi dari data yang diperoleh, dan berfungsi sebagai pedoman dalam pengumpulan data pada tahap selanjutnya. Tahapan



penelitian diawali dengan pengetahuan terhadap lapangan, penyusunan rencana penelitian, pengumpulan data, perumusan hipotesis, pengumpulan data tahap selanjutnya, analisis data, dan akhirnya perumusan teori.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif-moralistik, hipotesis biasanya tidak dirumuskan secara eksplisit walaupun secara implisit dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yang diajukan. Demikian halnya dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologis, hipotesis biasanya bersifat implisit namun ia juga dapat dirumuskan secara eksplisit sebagaimana dalam penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya.

Dalam penelitian yang dititikberatkan pada pengujian teori, rencana penelitian disusun sebagaimana dapat dilihat dalam pola umum penelitian. Teori berfungsi sebagai kerangka penelitian, kemudian disusun di dalam rumusan kerangka berpikir dan selanjutnya hipotesis.

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Dalam penelitian yang diarahkan pada pengujian hipotesis dituntut adanya kejelasan pengubah dari hubungan antar pengubah yang akan diuji. Kejelasan pengubah antara lain tentang dimensi-dimensi pengubah yang sangat spesifik. Adapun tentang kejelasan hubungan antar-pengubah, meliputi tipe hubungan simetrik yang lebih sering digunakan dalam penelitian, hubungan simetrik, dan hubungan timbal balik (*reciprocal*). Kejelasan hubungan itu akan memudahkan untuk menentukan model uji statistik yang akan digunakan. Salah satu bentuk rumusan hipotesis adalah sebagaimana dapat dilihat dalam ungkapan di bawah ini. Dalam contoh itu terdapat dua jenis hipotesis yaitu: hipotesis penelitian dan hipotesis statistik.



Contoh:

Sesuai dengan kerangka berpikir tersebut, hipotesis yang diajukan dalam (James P. penelitian ini adalah: “Terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa kelas yang menggunakan pengajaran dan les dengan siswa kelas yang menggunakan harus ada pengajaran tambahan dengan tugas dalam bidang studi matematika.”

Adapun hipotesis nol atau hipotesis statistik dari hipotesis alternatif memang dirumuskan dengan lambang statistik sebagai berikut:

Ho: $x_1 \leq x_2$, Artinya, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mengikuti pengajaran tambahan dan les dengan siswa yang basil per konklusi mengikuti tambahan pengajaran tambahan tugas dalam bidang studi matematika.

Ha: $x_1 > x_2$, Artinya, terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang harus mengikuti pengajaran tambahan dan les dengan siswa yang tidak mengikut pengajaran tambahan dengan tugas dalam bidang studi matematika.¹²⁵

2. Perumusan Hipotesis

Hipotesis ialah: *stelling*, patokan, pendirian dalil yang dianggap benar; juga berarti “*onderstelling*”, persangkaan dugaan yang dianggap benar untuk sementara pembaca waktu dan perlu dibuktikan kebenarannya.

Hipotesis adalah satu asumsi yang berperan sebagai satu penjelasan tentatif. Dilihat dari satu segi lain, hipotesis bisa dianggap sebagai satu pertanyaan yang menurut sifatnya harus dijawab lewat seni eksperimen atau seni observasi. (James P. Chaplin, 1981).

¹²⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dari Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 511.



Jadi, hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, yang harus diuji kebenarannya dengan jalan riset. Oleh karena itu, hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga bisa salah. Ia akan ditolak jika faktanya menyangkal, jadi hipotesisnya salah atau palsu. Dari hipotesis akan diterima, jika fakta membuktikan kebenarannya.

Penerimaan atau penolakan terhadap suatu hipotesis itu bergantung pada hasil pengolahan data yang relevan. Oleh karena itu, hipotesis dapat dianggap sebagai konklusi sementara, dan sebagai hasil sementara dari perenungan yang matang dan pertimbangan yang sistematis.

Apakah sebabnya orang merumuskan hipotesis? Penelitian itu selalu dikonfrontasikan dengan satu aktivitas yang cukup rumit dalam awal usahanya, yaitu: memilih satu fakta yang signifikan (penting dan berarti) serta relevan di tengah-tengah jaringan struktur masyarakat yang sangat kompleks. Dalam menemukan fakta ini, orang dibantu oleh pengalaman di masa yang lalu dari pembacaan literatur; juga oleh filsafat yang spekulatif dan keterampilan teknis tertentu. Maka pentinglah penemuan arti dari nilai suatu fenomena nonsosial bagi usaha menambah kesejahteraan hidup.¹²⁶

3. Menguji Hipotesis

Setelah si peneliti menelaah hasil-hasil penelitian, maka peneliti memberikan terdahulu melalui studi kepustakaan, dan si peneliti telah memilih dan merumuskan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, maka tibalah saatnya peneliti merumuskan hipotesis-hipotesis untuk diuji dengan banyak membaca. Si peneliti telah memperoleh hilang begitu ba-

¹²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 1990), hlm. 78.



nyak informasi.baik mengenai metode penelitian yang akan digunakan, maupun mengenai bahan-bahan konfaratif yang akan dipakai untuk mengembangkan hipotesis koordinasi dan mempertajam analisis. Si peneliti sudah cukup mempunyai pengetahuan tentang teori-teori yang berkembang serta konsep-konsep yang ada mengenai fenomena-fenomena dari hubungan-hubungan yang akan dicari.

Memformulasi hipotesis adalah harus diakui adalah suatu pekerjaan yang sukar dalam penelitian lebih-lebih akan sangat terasa jika permasalahan yang ingin dipecahkan tidak mempunyai kerangka teori yang jelas. Di lain pihak kesukaran merumuskan hipotesis disebabkan oleh kurangnya kemampuan untuk menggunakan kerangka-kerangka secara teori secara logis di samping kurang mengenal teknik serta ilmu metode penelitian yang ada.

Suatu hal yang masih kontroversial adalah pertanyaan apakah hipotesis diperlukan dalam suatu penelitian? sudah terang, jawabannya bisa “ya” bisa juga “tidak”. Jika penelitian berkenaan dengan verifikasi, di mana langkah pokok dituntun oleh komponen “masalah hipotesis-data-analisis kesimpulan” yang mana komponen-komponen ini dijamin oleh suatu kerangka teori, maka hipotesis ini tidak dapat dimungkiri merupakan langkah yang penting dalam metode ilmiah. Di lain pihak, jika penelitian bersifat deskriptif maka hipotesis tidak diperlukan penelitian eksploratif yaitu penelitian pendahuluan sebelum penelitian yang terperinci dan mendalam dilaksanakan, karena itu penelitian demikian belum memerlukan adanya hipotesis-hipotesis fakta ataupun dengan logika.

Hipotesis amat berguna dalam penelitian, tanpa antisipasi terhadap alam atau pun tanpa hipotesis tidak akan ada progres



dalam wawasan atau pengetahuan ilmiah dalam mengumpulkan fakta empiris tanpa ide yang membimbing maka sulit dicari fakta-fakta yang ingin dikumpulkan dan sukar menentukan mana yang relevan mana yang tidak (Conen, 1956).

Secara garis besar, kegunaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian.
- b. mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang terkadang hilang begitu saja dari perhatian peneliti.
- c. sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh.
- d. sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian antara satu fakta dengan yang lainnya.

4. Ciri-ciri Hipotesis

Hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Hipotesis harus menyatakan hubungan
- b. Hubungan harus sesuai dengan fakta
- c. Hipotesis harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dan tumhuh dengan ilmu pengetahuan.
- d. Hipotesis harus dapat diuji.
- e. Hipotesis harus sederhana.
- f. Hipotesis harus menerangkan fakta.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak pernah dibuktikan kebenarannya, tetapi diuji validitasnya. kecocokan hipotesis dengan fakta bukanlah membuktikan hipotesis, karena bukti tersebut memberikan alasan



kepada kita untuk menerima hipotesis, dan hipotesis adalah konsekuensi logis dan bukti yang diperoleh.

Yang penting disadari adalah hipotesis harus diuji, dan dievaluasi apakah hipotesis cocok dengan fakta atau dengan logika ilmuwan.

F. ASUMSI DASAR

Asumsi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu menampilkan data untuk membuktikannya. Asumsi harus konsisten dengan informasi yang ada dan dapat diterima. Dengan demikian, tidak disangsikan lagi kebenarannya. Asumsi adalah kondisi di mana penelitian dibangun. Apabila asumsinya tidak tepat, maka seluruh hasil penelitian menjadi tidak tepat juga sehingga kesimpulannya pun adalah kesimpulan yang palsu.

G. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian.

Dalam penelitian hukum, ruang lingkup penelitian harus dibatasi, misalnya bidang hukum ketatanegaraan; hukum internasional; hukum keperdataan; hukum lingkungan; hukum kepidanaan; hukum ekonomi; dan sebagainya.

Apabila lingkup penelitian telah ditetapkan, maka semua faktor yang termasuk di dalam batasan tersebut harus dipertimbangkan dalam penelitiannya. Sebab begitu ada fak-



tor yang ditinggalkan, kemungkinan akan memberikan kesimpulan yang berlainan.

H. STUDI KEPUSTAKAAN

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trail and error*”. Aktivitas ini merupakan tahapan yang sangat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan penelitian itu sendiri, *six hours library save six mounths in field or laboratory*.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:

1. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan yang digunakan.
3. Sebagai sumber data sekunder.
4. Mengetahui historis dari perspektif dan permasalahan penelitiannya.
5. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan.
6. Memperkaya ide-ide baru.
7. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dari siapa memakai hasilnya.



Berdasarkan fungsi kepustakaan, dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. Acuan umum, yang berisi konsep, teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya, buku-buku, indeks, ensiklopedia, dan farmakope.
2. Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan peneliti yang diteliti, misalnya: jurnal, laporan, penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur, dan sebagainya.

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dari terdiri:
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan dasar, yaitu:
 - Batang tubuh UUD 1945.
 - Ketetapan-ketetapan MPR(S).
 - c. Peraturan perundang-undangan:
 - undang-undang atau Perpu;
 - peraturan pemerintah;
 - keputusan presiden;
 - keputusan menteri;
 - peraturan daerah.
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat.
 - e. Yurisprudensi.
 - f. Traktat.
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga



kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHP Perdata (BW).

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), dan hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

Dari studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa:

1. diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
2. melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitiannya;
3. akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
4. melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan teoretis terhadap permasalahannya.

1. VARIABEL

Variabel adalah semua ciri atau faktor yang dapat menunjukkan variasi. Berdasarkan fungsinya, variabel dibedakan atas tiga fungsi, yaitu: variabel sebab, variabel penghu-



bung, dari variabel akibat. Adapun variabel sebab dibedakan atas variabel bebas, variabel moderator, variabel kendali, variabel random (rambang). Secara skematis hubungan antara variabel-variabel tersebut digambarkan berikut ini:

J. METODE PENARIKAN SAMPEL

Kemunculan perkembangan penelitian terjadi pada akhir abad ke-19. Awalnya penelitian digunakan hanya pada bidang ilmu pengetahuan alam untuk mengembangkan teori-teori dan konsep disiplin ilmu tersebut. Metode yang dipakai para peneliti pada waktu itu lebih banyak menggunakan metode penelitian ilmiah, yaitu penerapan langkah berpikir ilmiah. Gejala-gejala alam yang relatif tetap dilakukan pengamatan, kemudian dilakukan verifikasi data secara empiris untuk menguji suatu jawaban sementara atau hipotesis.

Penelitian-penelitian dalam ilmu pengetahuan alam kemudian perkembangan dan dipraktikkan dalam ilmu-ilmu sosial, di mana perkembangan selanjutnya penelitian dalam bidang ilmu ini bukan hanya berfungsi untuk mengembangkan konsep dan teori keilmuan, tetapi bahkan lebih banyak berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan manusia.¹²⁷ Di lain pihak, penelitian ilmu sosial tidak hanya menguji hipotesis kuantitatif dan empiris, tetapi juga berkembang melalui pengkajian yang tidak selalu menggunakan pengukuran kuantitatif.

Penelitian sebagai wujud dari kegiatan ilmiah, apa pun jenis dari metodenya, memiliki karakteristik yang sama, yaitu adanya *unsur-unsur dasar penelitian*. Ada tiga unsur po-

¹²⁷ Nana Sujana dari Ibrahim, *Penelitian dari Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1989), hlm. 2.



kok dalam penelitian di mana dengan adanya kejelasan dari tiga unsur pokok ini, maka akan dikembangkan unsur-unsur lainnya. Ketiganya yaitu:

1. masalah dari variabel penelitian;
2. hipotesis/dugaan sementara;
3. metodologi penelitian.

Artinya, kegiatan penelitian lebih lanjut dapat dilakukan setelah adanya masalah yang jelas termasuk variabel-variabel yang ditelitinya, kerangka teoretik sebagai landasan berpijak dalam merumuskan hipotesis dan menetapkan prosedur dari teknik memperoleh data empirik (metodologi) untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis.¹²⁸

Khusus mengenai unsur yang ketiga, yaitu tentang metodologi penelitian di dalamnya terkandung makna yang lebih luas menyangkut prosedur dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian, termasuk untuk menguji hipotesis. Penentuan metodologi penelitian sering juga disebut dengan “strategi pemecahan masalah”; karena dalam tahap ini, mempersoalkan “bagaimana” masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.

Ada beberapa aspek yang harus ada dan perlu menjadi perhatian dalam menentukan metodologi penelitian:

1. Jenis atau format penelitian yang akan digunakan; harus disesuaikan dengan tipe pendekatan penelitian yang digunakan, apakah studi kasus, survei, eksperimen, dan sebagainya.
- b. Metode, sumber, dari alat pengumpulan data. Misalnya untuk survei disertai teknik pengambilan sampel, dan

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 9.



untuk eksperimen disertai pola eksperimen yang akan dilakukan. Sumber datanya; jika orang, siapa orangnya, kalau dokumen, dokumen apa saja. Selanjutnya apa dan bagaimana alat pengumpulan datanya; angket, wawancara, ataukah lainnya, serta bagaimana alat-alat tersebut disusun dan dikembangkan.

- c. Strategi analisis data, yaitu mencakup mengolah data (mengedit dan mengkode), menganalisis data (mengorganisasikan, menabulasi, dan melakukan perhitungan-perhitungan tertentu), serta menginterpretasi atau menyimpulkan data, baik untuk masing-masing masalah (hipotesis) maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti.¹²⁹

I. Populasi Penelitian

Setelah peneliti merumuskan permasalahan, tujuan dari rancangan penelitian dengan tepat dan benar, maka tahap selanjutnya yaitu menentukan objek penelitian dan data akan dikumpulkan. Idealnya data dikumpulkan dari semua objek yang dipermasalahkan. Akan tetapi, hal ini akan terlalu banyak membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu, sehingga karena tidak efisien. Oleh karena itu bila seseorang penelitian pada umumnya hanya menggunakan sebagian dari keseluruhan objek penelitian, yang kemudian disebutkan dengan sampel.¹³⁰

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan atau ciri yang sama. Misalnya penduduk su-

¹²⁹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dari Aplikasi*, Cet. 5 (Jakarta: RajaGrafindo, 2001), hlm. 31.

¹³⁰ Bambang Sunggono, *Metoldologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 118.



atau kota atau kecamatan, mahasiswa di suatu institut atau universitas, narapidana di suatu lembaga permasyarakatan, anak-anak usia sekolah dari kalangan keluarga *broken home*, dan sebagainya.¹³¹

Masalah *sampling* dalam penelitian berawal dari kehen-
dak peneliti untuk:

- a. Mereduksi objek penelitiannya, artinya peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, tetapi hanya saja dari objek, ge-
jala, atau peristiwa tersebut.
- b. Menggeneralisasikan hasil penelitian, artinya kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasikan terha-
dap semua objek, gejala, atau peristiwa yang lebih luas.¹³²

Berdasarkan dua hal di atas (reduksi dan generalisasi), maka timbul masalah *sampling* dalam setiap penelitian il-
miah. Namun sebelum menguraikan teknik *sampling*, maka perlu diketahui beberapa istilah sebagai berikut:

1. Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau ma-
nusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang
mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.
2. Subpopulasi adalah sejumlah unit atau manusia yang
menjadi bagian dari populasi, misalnya polisi wanita
(Polwan).
3. Elemen populasi adalah anggota dari sejumlah unit atau
manusia yang menjadi populasi atau subpopulasi, mi-
salnya anggota polisi.
4. Populasi sasaran (*target population*) adalah populasi

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakar-
ta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 95.



dari mana akan ditarik suatu sampel berdasarkan teknik *sampling* tertentu, misalnya perwira menengah polisi.

5. Kerangka (*frame*) adalah daftar dari orang-orang atau unit yang merupakan bagian dari sampel yang mewakili populasi.¹³³

Secara umum, populasi ada juga yang memahaminya dalam suatu penelitian:

- a) *Target population* dari sampel *population*.
- b) Target populasi adalah populasi kepada siapa kesimpulan akan diberlakukan atau digeneralisasikan. Adapun *sampled population* adalah dari mana sampel diambil. Idealnya dalam suatu penelitian, *target population* identik dengan *sampled population*, terutama apabila digunakan metode statistik inferensial maka keadaan ideal tersebut mutlak harus dipenuhi.
- c) *Problem population* dan data populasi.

Problem populasi adalah kepada siapa hasil penelitian. Populasi ini pada umumnya sudah tercermin dalam rumusan masalah penelitiannya. Adapun *data population* adalah populasi dari mana data diperoleh melalui *sample population* disebut.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Ada beberapa alasan mengapa hal ini dilakukan, antara lain:

Apabila pengambilan sampel untuk pengambilan kesim-

¹³³. *Ibid.*, hlm. 97.



pulan tentang populasi data dipertanggungjawabkan. Apabila populasi homogen, sampel adalah identik dengan populasinya, dan apabila populasi jumlahnya tak terbatas, pemakaian populasi adalah sesuatu yang tidak mungkin.

Sementara itu, observasi atau eksperimentasi bersifat merusak unit sampel, maka digunakan populasi akan sangat merugikan. Apabila ada keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya penelitian, dan apabila diperlukan adanya kontrol atau pengaturan terhadap tertentu atas populasi.

Lingkungan penelitian dapat diperluas dan diperdalam oleh karena jumlah yang diobservasi dan diberi perlakuan lebih sedikit, dengan demikian informasi yang diperoleh akan lebih teliti.¹³⁴

Dengan demikian, tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi, karena di samping memakan biaya yang sangat besar, juga membutuhkan waktu yang lama. Tentu juga sangat tidak realistis untuk meneliti seluruh populasi jika populasi tersebut sangat luas. Dengan meneliti sebagian dari populasi (sampel), kita mengharapkan bahwa hasil yang diperoleh akan dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Cara ini lazim disebut dengan survei sampel (*sample enumeration*). Jadi, ide pokok dari pengambilan sampel yaitu: *mencari informasi tentang keseluruhan populasi dengan jalan mencari informasi pada sebagian saja dari populasi tersebut, dari informasi yang ditemukan diberlakukan kepada seluruh populasi*. Namun tentu saja cara ini tidak dapat diterapkan jika penelitian yang dimaksud untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan populasi, atau jika jumlah populasi yang akan diteliti tidak terlalu banyak,

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 120.



maka cara yang tepat adalah dengan menghitung tiap unit populasi atau yang lebih dikenal dengan istilah sensus (*complete enumeration*).¹³⁵

Untuk mendapatkan keterangan yang dapat mewakili suatu populasi, maka cara-cara pengambilan sebuah sampel haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebab meskipun sebuah sampel itu terdiri dari sebagian populasi, bila cara-cara pengambilannya tidak sesuai persyaratan, maka tidak selalu dapat disebut sebagai sebuah sampel.¹³⁶ Maksudnya, oleh karena sampel itu adalah suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri, maka dibutuhkan acuan yang tepat untuk menetapkan sampel.

Suatu metode pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat sebagaimana berikut ini:

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti.
2. Dapat menentukan presisi,¹³⁷ dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku dari taksiran yang diperoleh.
3. Sederhana, hingga mudah dilaksanakan.
4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya.¹³⁸

Jadi, dalam hal ini kita perlu memperhatikan masalah efisiensi dalam memilih metode penarikan sampel. Contohnya, metode A dikatakan lebih efisien daripada metode B

¹³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 325.

¹³⁶ Masri Singabuan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 149.

¹³⁷ Presisi adalah tingkat ketetapan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh dari sampel dibandingkan hasil yang diperoleh dari catatan lengkap dengan syarat metode keduanya adalah sama.

¹³⁸ Masri Singabuan, *Metode...*, hlm. 149.



apabila untuk sejumlah biaya, tenaga, dan waktu yang sama, metode A itu dapat memberikan tingkat presisi yang lebih tinggi; atau, untuk tingkat presisi yang sama diperlukan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih rendah.

Selanjutnya, dalam menetapkan sampel perlu juga memperhatikan kerangka *sampling*, yaitu daftar dari seluruh unsur sampel dalam populasi *sampling*. Kerangka pilihan *sampling* dapat berupa daftar mengenai jumlah penduduk, jumlah bangunan, dan sebagainya. Meringankan suatu kerangka *sampling* yang baik harus memenuhi syarat-syarat: (1) meliputi seluruh unsur sampel (tidak ada satu unsur pun tertinggal); (2) tidak ada tabel angka unsur sampel yang dihitung dua kali; (3) harus *up to date*; (4) batas-batasnya harus acak, jelas, misalnya batas wilayah, pekerjaan, rumah tangga; (5) harus dapat dilacak, ada di lapangan; misalnya, tidak boleh ada beberapa desa dengan nama yang sama.

3. Pembagian Teknik Sampling

Paling tidak dalam penarikan teknik sampling dalam penelitian terbagi kepada dua bagian, yaitu: *pertama*, teknik penarikan sampel probabilitas; *kedua*, teknik penarikan sampel nonprobabilitas.¹³⁹

Adapun yang dimaksud kedua bentuk teknik *sampling* di atas sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

a. Probability Sampling atau Random Sampling

Secara umum diketahui dari teknik penarikan *sampling*, yaitu: (1) Teknik penarikan probabilitas, adalah suatu teknik penarikan sampel yang berdasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jadi, berdasarkan hukum probabilitas, dari

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 122.



suatu populasi yang jumlah warganya 1000, setiap warganya mempunyai peluang $1/1000$ untuk dipilih sebagai sampel. Dengan kesempatan yang sama ini, hasil dari suatu penelitian dapat digunakan untuk memprediksi populasi. Dalam terminologi lain, teknik probabilitas sering juga disebut teknik *random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak.

Dan (2), teknik penarikan sampel nonprobabilitas adalah suatu teknik penarikan sampel yang didasarkan pada setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama. Anggota yang satu memiliki kesempatan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang lain sehingga hasil penelitian yang menggunakan teknik ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi populasi, atau dengan istilah lain, *non-random sampling*, yaitu pengambilan sampel yang bersifat tidak acak.¹⁴⁰

Di bawah ini akan diketengahkan jenis-jenis *probability sampling* atau *random sampling*, berikut penjelasan sekadarnya dari contoh-contohnya.

b. Teknik Acak Sederhana (Simple Random Sampling)

Teknik ini adalah teknik penarikan sampel yang paling mudah dilakukan gambarannya ini seperti undian. Namun cara undian tidak praktis jika angka yang populasinya besar, sebab hampir tidak mungkin untuk mengocok dengan saksama juga halnya seluruh gulungan kertas undian, di samping manusia sering cenderung memilih angka-angka tertentu.

Pilihan lain yaitu menggunakan tabel angka acak. Cara ini selain lebih meringankan pekerjaan, juga memberikan jaminan yang jauh lebih besar, bahwa setiap unit elementer

¹⁴⁰ Bambang Prasetyo dari Lina Maftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori Dari Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 121.



mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih. Penggunaan tabel angka acak cukup praktis sehingga sering dipakai dalam pengambilan sampel acak.

Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam menggunakan metode acak sederhana ini:

- a. Harus tersedia daftar kerangka *sampling*, jika belum tersedia harus dibuat terlebih dahulu.
- b. Sifat populasi harus homogen, kalau tidak kemungkinan akan terjadi bias.
- c. Keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis.¹⁴¹

Contoh:

Dalam suatu kampung terdapat 900 petani. Kita ingin menarik suatu sampel yang besarnya 9 (beranggotakan sembilan orang petani) untuk suatu keperluan. Jika kita menggunakan sistem undian, maka kita akan menyediakan 900 gulungan kertas dari masing-masing kertas kita tulis nama petani. Tentu kerja seperti ini melelahkan. Tetapi jika kita menggunakan tabel angka acak, maka akan menghemat waktu. Caranya yaitu: karena jumlah populasi (N) 900, maka bilangan harus terdiri dari tiga angka (digit).

Pertama-tama kita nomori tiap satuan elementer populasi (yaitu petani) dari 001 sampai 900. Kemudian bukalah tabel angka acak. Dengan menutup mata tusuklah sebuah angka dengan pensil, dan catatlah angka tersebut pada baris berapa dari kolom berapa. Misalnya, tusukan pensil jatuh pada baris ke-10 dari kolom ke-13. Karena populasi terdiri dari tiga digit, yaitu 900, maka kita gunakan tiga kolom, yaitu kolom 13, 14, dan 15. Dengan titik tolak baris 10 dengan ko-

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 159.



lom 13, 14, dan 15, maka kita peroleh angka-angka berikut:

026 426 022 914 476 336 089 072 530 445

918 821 531 888 981 200 726 dan seterusnya.

Angka yang lebih besar dari satuan elementer (di sini 900) tidak kita pakai. Demikian juga halnya angka 000 dari angka-angka yang terulang. Karena jumlah petani yang akan menjadi sampel adalah 9, maka kita pilihlah nomor-nomor berikut:

26 426 22 476 336 89 72 530 dan 445

c. Teknik Acak Sistematis (Systematic Random Sampling)

Teknik ini dipakai jika jumlah populasi sangat banyak dan homogen, dari jumlah sampel yang akan diambil juga banyak. Demikian juga teknik ini dipakai apabila nama atau identifikasi dari satuan-satuan elementer dalam populasi itu terdapat dalam suatu daftar, sehingga satuan-satuan tersebut dapat diberi nomor, dan apabila populasi itu mempunyai pola beraturan, seperti blok-blok dalam kota, atau rumah-rumah dalam suatu jalan sehingga dapat diberi nomor urut.¹⁴²

Adapun tahapan yang dilakukan untuk menarik sampel ini yaitu menyusun kerangka sampel (daftar nama populasi) dalam kelompok dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah responden. Selanjutnya pilihlah satu kelompok yang ada dengan cara acak.

Contoh:

Suatu wilayah memiliki penduduk sebanyak 5000 orang dan akan diambil 100 orang sebagai sampel. Maka kelompok = $5000/100 = 50$. Susunlah kerangka sampel berdasar

¹⁴² Ainirul Hadi dan Haryono, *Melodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 27.



kelompok. Kemudian dengan menggunakan undian kita memilih kelompok 1 hingga 50 secara acak. Misalnya yang terpilih dalam undian adalah kelompok 5, maka seluruh anggota kelompok 5 adalah sampelnya. Jadi, sampel yang diambil yaitu mulai dari nomor unit populasi:

5 55 105 155 205 255 305 355 ... 4905 4955

Atau dapat dikatakan kita menggunakan kelipatan 50. Namun jika populasi jumlahnya tidak genap/ganjil, akan sulit untuk menggunakan langsung kelipatan yang kita peroleh dari pembagian jumlah populasi dengan jumlah sampel. Solusinya gunakan interval fraksional.

Contoh:

Suatu wilayah memiliki penduduk sebanyak 5.543 orang dan akan diambil sebagai sampel 100 orang. Maka, kelompok $5543/100 = 55,43$. Pilihlah satu nilai antara 1-50 secara acak, misalnya 5,7.

Maka sampel yang akan diambil adalah:

Sampel 1	5,7	=	5,7	=	16
Sampel 2	5,7+55,43	=	61,13	=	61
Sampel 3	61,13+55,43	=	116,56	=	117
Sampel 4	116,56+55,43	=	171,99	=	172
Sampel 5	171,99+55,43	=	227,42	=	227
Sampel 6	227,42 + 55,4	=	227,42	=	283
Sampel 7 dan seterusnya.					

d. Teknik Acak Terlapis (Stratified Random Sampling)

Teknik ini diberlakukan dalam keadaan populasi yang tidak memiliki sifat homogen, tetapi heterogen, yaitu karakteristik populasinya bervariasi. Misalnya penduduk Indonesia akan sangat heterogen jika dilihat dari pendidikan, aga-



ma, tempat tinggal, dan penghasilan mereka. Oleh karena itu, teknik penarikan sampel yang digunakan pun harus melihat pada perbedaan sifat dan populasi.

Ada dua jenis teknik penarikan sampel terlapis; yaitu:

- a. Proporsional (sampel sebanding dengan jumlah populasi).

Contoh:

Kita akan menarik sampel sebanyak 50 orang dari suatu populasi penduduk sebanyak 130 orang dengan karakteristik: 20 orang lulusan SD, 40 orang lulusan SMP, 55 orang lulusan SMA, dari 15 orang lulusan PT, cara menarik sampelnya dengan rumus:

$$\text{Sampel} = \frac{\text{Populasi 1}}{\text{Total populasi}} \times \text{Total sampel}$$

1. Sampel lulusan SD $20/130 \times 50 = 7,69 = 8$ orang
2. Sampel lulusan SMP $40/130 \times 50 = 15,38 = 15$ orang
3. Sampel lulusan SMA $55/130 \times 50 = 21,15 = 21$ orang
4. Sampel lulusan PT $15/130 \times 50 = 5,77 = 6$ orang

- b. Nonproporsional (sampel tidak sebanding dengan jumlah populasi).

Contoh:

Kita menarik sampel sebanyak 15 orang dari suatu populasi penduduk dengan karakteristik: 20 orang lulusan SD, 60 orang lulusan SMP, 66 orang lulusan SMA, dari 4 orang lulusan PT, total populasi 150 orang.

Jika kita menggunakan cara proporsional, maka tidak akan diperoleh sampel dari lulusan PT, sehingga digunakanlah cara nonproporsional agar semua lapisan/kelompok dapat terwakili. Caranya setelah ditentukan jumlah sampel



dari setiap lapisan kelompok, tentukan anggota sampel tersebut berdasarkan acak sederhana (undian/tabel angka acak) atau sistematis. Maka bisa didapat sampel berikut:

- Sampel lulusan SD = 2 orang
- Sampel lulusan SMP = 5 orang
- Sampel lulusan SMA = 7 orang
- Sampel lulusan PT = 1 orang

e. **Teknik Acak Berkelompok (Duster Random Sampling)**

Teknik ini digunakan jika memiliki keterbatasan karena ketiadaan kerangka sampel (daftar nama seluruh anggota populasi), namun ada data yang lengkap tentang kelompok.

Ada dua jenis teknik penarikan sampel acak berkelompok, yaitu:

- 1) Teknik penarikan sampel kelompok satu tahap (*a stage duster random sampling*), digunakan jika sifat/karakteristik kelompok adalah homogen.

Contoh:

Di suatu universitas terdiri dari 6 fakultas. Sementara itu, data yang kita miliki tentang daftar nama mahasiswa tidak tersedia. Maka kita hanya perlu membuat undian nama-nama fakultas, kemudian memilih secara acak (sama seperti teknik penarikan sampel sederhana). Maka seluruh mahasiswa dari fakultas yang terpilih tersebut akan dijadikan sampel.

- 2) Teknik penarikan sampel kelompok banyak tahap (*multi stages duster random sampling*), digunakan jika sifat/karakteristik kelompok pada populasi cenderung heterogen.

Contoh:

Di suatu universitas terdiri dari 6 fakultas. Sementara itu tidak tersedia data rentang daftar nama mahasiswa. Kita memiliki asumsi bahwa ada fakultas yang tergolong dalam ka-



rakteristik ilmu pasti dari ilmu sosial. Maka pilih secara acak dari kelompok ilmu pasti, demikian juga dari kelompok ilmu sosial. Selanjutnya, pilih mahasiswa berdasar jurusan dengan cara teknik acak berlapis, atau langsung memilih mahasiswa di fakultas yang terpilih dengan cara acak sederhana atau sistematis.

Demikianlah beberapa jenis penarikan sampel secara acak, atau dikenal dengan *random sampling* dari *probability sampling*. Pertanyaan yang sering muncul kemudian, kapan suatu jenis sampel tepat untuk dipilih dalam suatu penyalinan?

Dalam hal ini pemilihan suatu jenis sampel haruslah bisa dinalar kesesuaiannya dengan karakteristik populasi yang hendak diteliti. Yang pasti, hanya pengambilan sampel secara *random* yang dapat diperhitungkan kesalahan-kesalahan baku (*standard errors*) dari sampel yang diambil di dalam merepresentasikan parameter populasi; dapat diperhitungkan tingkat keakuratan berlakunya kesimpulan terhadap populasi yang diambil sebagai sampel. Karenanya teknik-teknik *non-random* dan nonprobabilitas hanya relevan digunakan untuk penelitian yang bersifat eksplorasi atau penjajakan; bukan untuk menarik inferensi dari populasi.¹⁴³

Dalam suatu penelitian sangat dimungkinkan terjadi penyimpangan. Besar penyimpangan yang dapat ditoleransi dalam suatu penelitian, sangat tergantung pada sifat penelitian itu sendiri. Ada penelitian yang dapat menoleransi penyimpangan yang besar; sebaliknya ada juga penelitian yang menghendaki penyimpangan yang kecil. Sebab penyimpangan yang besar dapat menimbulkan kesimpulan yang salah.¹⁴⁴

Dalam suatu penelitian, ada kemungkinan muncul dua

¹⁴³ Sanapiah, *Format-format...*, hlm. 70.

¹⁴⁴ Masri, *Metode Penelitian...*, hlm. 172.



macam penyimpangan:

- a. Penyimpangan karena pemakaian sampel (*sampling error*).
Intinya tidak ada kesalahan pada pengamatan, satuan-satuan ukuran, definisi, pengolahan data, dan sebagainya, maka perbedaan itu hanya disebabkan oleh pemakaian sampel. Mudah dimengerti bahwa semakin besar sampel yang diambil semakin kecil juga terjadinya penyimpangan. Apabila sampel itu sudah sama besar dengan populasi, maka penyimpangan oleh pemakaian sampel akan hilang.
- b. Penyimpangan bukan oleh pemakaian sampel (*non-sampling error*).

Golongan penyimpangan ini ditimbulkan oleh berbagai hal, di antaranya:

1. Penyimpangan karena kesalahan perencanaan.
Misalnya tidak tepatnya pemakaian definisi, kriteria-kriteria satuan-satuan ukuran, dan sebagainya, memberikan penyimpangan pada hasil penelitian.
2. Penyimpangan karena penggantian sampel.
Sampel yang diteliti berbeda dengan sampel yang diterapkan. Misalnya seorang petani yang telah ditetapkan sebagai sampel tidak berada di rumah pada waktu dikunjungi, lalu petugas menggantinya dengan orang lain.
3. Penyimpangan karena salah tafsir petugas maupun responden.
Akibat dari kesalahan ini adalah jawaban yang didapat akan menyimpang dari keadaan yang sebenarnya.
4. Penyimpangan karena responden sengaja salah menjawabnya. Ini bisa terjadi karena responden merasa cukup



terhadap maksud dari tujuan penelitian, atau mungkin juga responden mempunyai maksud-maksud tertentu.

5. Penyimpangan karena kesalahan pengolahan data atau penerbitan.

Hal ini sering terjadi dalam pengolahan data, misalnya salah dalam menjumlah, mengalikan, dan sebagainya.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik yang berupa *sampling error* maupun *non-sampling error*, seorang peneliti harus menggunakan metode pengambilan sampel yang tepat, dan dengan melakukan perencanaan dari pelaksanaan yang cermat.

4. Teknik Penarikan Sampel Non-Probabilitas

Teknik penarikan sampel non-probabilitas ini dapat digunakan jika peneliti tidak memiliki kerangka sampel yang memadai.¹⁴⁵ Berbeda dengan teknik penarikan sampel probabilitas yang memiliki ciri semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai adanya kesempatan yang sama bagi anggota, sehingga hasil peneliti dengan menggunakan teknik ini tidak dapat digunakan menyimpulkan kondisi pola populasi.¹⁴⁶

Dalam teknik penggunaan sampel nonprobabilitas dalam penelitian dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa teknik yang termasuk dalam bagian penelitian tersebut yang terbaga kepada beberapa bagian, yaitu:

a. Sampel Aksidental

Teknik penarikan sampel aksidental ini didasarkan pada kemudahan (*convenience*). Sampel dapat terpilih karena ber-

¹⁴⁵ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 133.

¹⁴⁶ *Ibid.*



ada pada waktu, situasi, dan tempat yang tepat. Misalnya, jika ingin meneliti tentang bagaimana pendapat penonton film *Ada Apa Dengan Cinta?* (AADC), kita tidak boleh memiliki asumsi semua orang sudah menonton film ini. Akan tetapi, yang dapat memberikan pendapat adalah mereka yang telah menonton film tersebut, sehingga era yang paling mudah adalah menemui para penonton film AADC di pintu keluar bioskop yang memutar film tersebut.¹⁴⁷

Adapun Muhammad Musa berpendapat aksidental ini adalah pengambilan sampel tidak ditentukan lebih dahulu. Penelitian langsung mengumpulkan data dari unit *sampling* yang ditemuinya. Setelah diperkirakan mencukupi, pengumpulan data dihentikan.¹⁴⁸

Misalnya, penelitian tentang pendapat umum mengenai pemilihan umum di Indonesia, peneliti dengan menggunakan interviu langsung mengumpulkan dari setiap orang dewasa yang dijumpainya, setelah jumlah yang diwawancarai dianggap cukup, pengumpulan data dihentikan dan dianalisis.¹⁴⁹

b. Teknik Sampel Purposive

Teknik penarikan sampel *purposive* ini disebut juga *fundamental sampling* yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli. Misalnya, jika kita ingin mengetahui bagaimana sebaiknya membuat iklan yang baik, tentu saja kita harus memilih mereka yang mengatakan memahami atau berasal dari orang-orang periklanan atau mereka yang bergerak

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 134.

¹⁴⁸ Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, hlm. 130.

¹⁴⁹ *Ibid.*



di bidang pemasaran.¹⁵⁰

Dalam teknik ini pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan bagaimana *accidental sampling* perbedaannya terletak pada pembatasan sampel dengan hanya mengambil unit *sampling* yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, unit *sampling* yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang di tetapkan berdasarkan tujuan penelitian.¹⁵¹

Misalnya penelitian tentang tertib lalu lintas di sebuah kota, sampel yang digunakan hanya diambil di antara orang-orang pemilik kendaraan bermotor yang tercatat di kepolisian atau pada pemilik SIM. Cara ini kadang-kadang sama dengan *Kuota Sampling*, bedanya cara *porposive sampling* lebih banyak memusatkan perhatian pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk di dalam *sampling* yang dipilih.

Keuntungannya lebih mudah dan dapat meminimalkan biaya. Adapun kelemahannya, sampel yang terpilih tidak mencerminkan populasi, akibatnya sulit untuk menarik generalisasi terhadap populasi.¹⁵²

c. Teknik Sampel Kuota

Teknik ini merupakan teknik sampel yang sejenis dengan teknik penarikan sampel stratifikasi, perbedaannya adalah ketika menarik anggota sampel dari masing-masing lapisan, kita tidak menggunakan cara acak tetapi menggunakan cara kemudahan.¹⁵³

Misalnya, untuk mendapatkan dua puluh orang yang

¹⁵⁰ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 134.

¹⁵¹ Muhammad Musa, hlm. 93.

¹⁵² Amiruddin Zainal Azikin, hlm. 106.

¹⁵³ Bambang Prasetyo, hlm. 134.



tinggal di kompleks Pondok Surya, kita tidak harus mencari-cari responden dengan sulit, cukup kita dengan mengenal seorang mahasiswa yang tinggal di kompleks Pondok Surya itu, dan kemudian memintanya mewawancarai tetangga yang tinggal di kompleks itu. Keuntungannya, biaya relatif murah, karena orang yang diwawancarai atau diberi daftar pertanyaan yang dapat siapa saja, yang penting memiliki kriteria yang ditentukan. Kelemahannya, kemungkinan sampel yang terpilih tidak mencerminkan populasi.¹⁵⁴

d. Teknik Sampel Bola Salju

Teknik penarikan sampel Bola Salju (*Snow Ball Sampling*) digunakan jika tidak memiliki informasi anggota populasi. Peneliti hanya memiliki satu nama populasi. Dari nama ini, peneliti akan mengembangkannya dan mencari yang mungkin terlibat dalam kasus ini, sehingga ia mendapatkan nama-nama yang lain. Teknik ini biasanya digunakan jika kita memiliki kasus yang sensitif dari sangat rahasia, maka peneliti harus menggunakan cara ini supaya tidak tercium kepada yang bersangkutan lainnya yang masih dalam pencarian. Misalnya, tentang jaringan narkoba, pembunuhan, dan lain-lain.¹⁵⁵

K. METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Setelah data terkumpul, langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu pengolahan data. Selanjutnya dalam penelitian ilmiah penggunaan analisis data tidak kalah pentingnya kalau kita perhatikan dari fungsinya. Untuk itu, analisis data

¹⁵⁴ Amiruddin Zainal Azikin, hlm. 104.

¹⁵⁵ Bambang Prasetyo, hlm. 135.



adalah suatu hal yang perlu diperhatikan karena berfungsi untuk menjawab rumusan masalah serta pengujian hipotetis yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proposal penelitian.

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan dalam metode penelitian ilmiah, karena dengan analisis data, data dapat diberi arti dan makna sehingga berguna untuk memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.

Sebelum melakukan analisis terhadap data, maka peneliti harus melewati proses pengolahan data terlebih dahulu, dalam makalah ini, penulis akan mencoba membahas proses tersebut serta analisis data dalam penelitian sosial.

1. Pencatatan Hasil Pengumpulan Data Secara Kuantitatif

a. Editing

Apabila pekerjaan untuk mengumpulkan data di lapangan telah selesai, maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterimanya itu. Peneliti harus memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima peneliti. Semua pekerjaan tersebut lazimnya dinamakan pekerjaan *editing*, yang biasanya dilakukan seorang petugas khusus yang dinamakan editor.¹⁵⁶

Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta meng-

¹⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI-Press 1986), hlm. 264.



hilangkan keragu-raguan data dinamakan mengedit data.¹⁵⁷ Dari pekerjaan tersebut, dilakukan sebelum hasil-hasilnya dicatat oleh peneliti. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Lazimnya *editing* dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur, dari pengisiannya yang melalui wawancara formal maka para editor bertugas mengorek isinya kembali.¹⁵⁸

Apabila pada tahap *editing* ini terdapat kejanggalan-kejanggalan yang sangat mengganggu pada instrumen dan data yang diperoleh, artinya ada beberapa kesalahan atau kekurangan informasi yang sangat mengganggu, maka peneliti atau *field worker* yang bersangkutan harus melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Kembali ke lapangan untuk menemui sumber data yang bersangkutan.
- 2) Menyisihkan instrumen tersebut sebagai instrumen yang tak terpakai atau rusak.
- 3) Melakukan cek silang atau berkonsultasi dengan penelitian lain untuk mengecek kebenaran data yang terkumpul.¹⁵⁹

Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah dan dianalisis serta kelengkapan dari kebaikan informasi akan terjamin. Dari

¹⁵⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. III, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 406.

¹⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. VI, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 126.

¹⁵⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. I, (Jakarta: Kencana 2005), hlm. 166.



pekerjaan tersebut, dilakukan sebelum hasil-hasilnya dicatat oleh peneliti.

b. Coding

Tidak jarang bahwa seorang peneliti melakukan *pra-coding* atau *coding*. Di mana *coding* artinya berusaha untuk membuat klasifikasi jawaban-jawaban, dengan memberikan kode-kode tertentu pada jawaban tersebut, agar nantinya mempermudah kegiatan analisis. Misalnya, diajukan pertanyaan sebagai berikut (dengan kemungkinan jawaban-jawaban yang sudah diberi kode):

“Menurut pendapat saudara, bagaimanakah derajat kepatuhan pengemudi becak terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan raya?”

Jawaban	Kode
1. Sangat patuh	01
2. Patuh	02
3. Biasa	03
4. Kurang patuh	04
5. Tidak patuh	05

Prakoding juga akan sangat memudahkan pewawancara, di dalam memasuki jawaban-jawaban responden ke dalam kategori-kategori yang relatif tepat.

Sejumlah kategori diberitahukan untuk keperluan *coding* dengan keharusan memperhatikan tiga petunjuk berikut ini:¹⁶⁰

1. bahwa setiap perangkat kategori harus dibuat dengan mendasarkan diri kepada satu asas kriterium tunggal;
2. bahwa setiap perangkat kategori harus dibuat lengkap

¹⁶⁰ Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, “Pengolahan dari Analisis Data” dalam Kontjaroningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1977) hlm. 338.



sehingga tidak ada satu pun jawaban responden yang tidak mendapatkan tempatnya yang tepat ke dalam kategori-kategori yang disediakan;

3. bahwa kategori tersebut satu sama lain (dalam setiap perangkat) harus saling terpisah tegas, dan tidak boleh saling *overlap*, sehingga dengan demikian setiap jawaban responden yang masuk tidak akan mungkin dapat dimasukkan ke dalam lebih dari satu kategori.

c. Menghitung Frekuensi

Setelah *coding* selesai dikerjakan, maka diketahui bahwa setiap kategori telah menampung dan memuat data-data dalam jumlah (frekuensi) tertentu. Pada akhir tahap *coding* ini peneliti akan memperoleh distribusi data dalam frekuensi-frekuensi tertentu pada masing-masing kategori yang ada.

Cara yang paling sederhana untuk menghitung frekuensi ini yaitu dengan cara “*tallying*”, seperti contoh berikut:

Kategori	Tally	(f)
Bersih sekali		5
Bersih		4
Cukup bersih		10
Kotor		16
Kotor sekali		17
Tidak tahu		3
Tidak bersedia menjawab		5

(f): frekuensi

Pekerjaan selanjutnya dari peneliti yaitu melakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten. Untuk keperluan itu, maka lazimnya dibuatkan tabel kosong yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Misalnya, tujuan penelitian untuk mengetahui penyebaran jumlah mahasiswa Fakultas Syariah tertentu, sesuai dengan jurusan yang telah dipilihnya. Pro-



sesnya secara sederhana, sebagai berikut:

Langkah *pertama*, buatlah tabel kosong

Langkah *kedua*, isilah kotak-kotak pada tabel, dengan jurusan-jurusan yang ada, pada sebelah kiri tabel, dan berilah huruf-huruf a, b, c, d dan seterusnya, pada sebelah kanan kotak-kotak pada tabel.

Jurusan

Ahwal al-Shakhsiah	a
Perb.Hukum & Mazhab	b
Muamalah	c
Jinayah Siyasa	d

Langkah *ketiga*, isilah kotak-kotak a, b, c, d, dengan garis-garis (*tallies* dari kata “*tally*”), sesuai dengan jumlah mahasiswa pada setiap jurusan, yang kemudian dijumlahkan secara menyeluruh pada setiap jurusan yang ada.

Jurusan

Ahwal al-Shakhsiah	////
Perb.Hukum & Mazhab	//// //// /
Muamalah	//// //// ///
Jinayah Siyasa	//// //

Pencatatan data sebagaimana dijelaskan di muka masih sangat mudah untuk dilakukan, oleh karena jumlah kotak di sebelah kiri sangat terbatas. Akan tetapi, apabila jumlah



kotak sangat banyak, maka akan lebih efisien untuk menerapkannya dengan membuat kelompok atau kelas interval. Misalnya, ingin diketahui tentang penyebaran nilai-nilai dari mata pelajaran filsafat hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah tertentu untuk periode tahun akademis tertentu pula. Nilai-nilai tersebut berkisar antara 10 hingga 99; maka akan terdapat 90 kotak (oleh karena untuk setiap nilai harus disediakan satu kotak).

Oleh sebab itu, akan lebih praktis untuk mengelompokkan nilai-nilai tersebut ke dalam interval, misalnya 10–14, 15–19, 20–24, dan seterusnya. Dengan demikian, dapat disajikan tabel, sebagai berikut:

Kelas interval	Frekuensi ()
95 – 99	A
90 – 94	b
85 – 89	c
80 – 84	d
75 – 79	e
70 – 74	f
65 – 69	g
60 – 64	h
55 – 59	i
50 – 54	j
45 – 49	k
40 – 44	l
35 – 39	m
30 – 34	n
25 – 29	o
20 – 24	p
15 – 19	q
10 – 14	r



Pada tabel tersebut, terdapat kelas interval dari yang besar ke kecil pada lajur kiri, sedangkan lajur kanan akan diisi dengan jumlah kasus (frekuensi) pada setiap interval (yang juga dilakukan dengan *tallies*). Pada contoh di atas, jumlah kelas interval adalah 18. Jumlah bilangan bulat pada setiap kelas interval ada 5 (misalnya, dari angka 10 hingga 14, ada angka-angka 10, 11, 12, 13, dan 14, dari itu disebut sebagai luas interval).

Apabila kelas interval 10–14 digunakan sebagai contoh, maka:

- batas bawah adalah 9,5;
- batas atas adalah 14,5;
- batas interval adalah 9,5 dari 14,5.

Pekerjaan yang dijelaskan di atas merupakan kegiatan menghitung frekuensi, yakni menegaskan berapa besar frekuensi data pada masing-masing klasifikasi/kategori. Contoh lain sebagai berikut:

<u>Klasifikasi/kategori</u>	<u>Tally</u> _____	<u>Frekuensi (f)</u>
Takut pada sanksinya	//// //// //// //// //// //// //// //// //	42
Sesuai dengan nilai-nilai	//// //// //	13
Memelihara hubungan baik dengan penguasa	//// //// //// //// //// //// ////	35

Frekuensi tersebut di atas selanjutnya harus disusun ke dalam bentuk tabel yang disebut dengan kegiatan tabulasi. Dalam hal ini, maka angka mutlak sebagai hasil penjumlahan frekuensi diberi bentuk persen, dengan menggunakan rumus:



$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Catatan: P = persentase; f = frekuensi pada klasifikasi atau kategori variasi yang bersangkutan; n = jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi).

Contohnya, seperti masalah pada penjelasan di atas, yang menyangkut sebab-sebab kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas sebagai berikut:

<u>Sebab-sebab</u>	<u>f</u>	<u>%</u>
Takut pada sanksinya	42	47,19
Sesuai dengan nilai-nilai	13	14,61
Memelihara hubungan baik		
<u>Dengan penguasa</u>	<u>34</u>	<u>38,20</u>
Jumlah	89	100,00

Tabel di atas merupakan tabel yang sederhana sekali dan diperlukan untuk analisis deskriptif yang tujuannya mengungkapkan data tentang apa yang lazim, apa yang unik, dan bagaimana variasinya.

Sesudah mengumpulkan data yang menyangkut kelompok-kelompok tertentu, maka biasanya ada kecenderungan untuk mengetahui secara mendalam tentang kelompok tersebut. Untuk itu, diperlukan suatu nilai tunggal yang dapat mewakili seluruh kelompok, yang dapat dilakukan dengan beberapa cara tertentu.

Cara pertama disebut “mean” atau menghitung nilai rata-rata matematis. Nilai rata-rata matematis tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan semua nilai yang ada untuk kemudian dibagi dengan banyaknya atau jumlahnya nilai (dengan simbol N). Dalam bentuknya yang paling sederhana nilai rata-rata tersebut diperoleh dengan rumus sebagai berikut:



$$\text{Mean} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

“Range” dapat menunjukkan seberapa jauhkah nilai-nilai tersebar di dalam suatu kelompok. Hal itu dapat diperoleh dengan menerapkan rumus:

$$\text{Range} = \text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah.}$$

Kelemahan pada “range” adalah bahwa cara itu kurang tepat untuk diterapkan pada keadaan-keadaan di mana terdapat nilai ekstrem. Untuk itu lebih lazim diterapkan standar deviasi yang dapat memberikan suatu gambaran mengenai penyimpangan rata-rata yang terjadi terhadap “mean”.

Misalnya, ada nilai-nilai 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, maka “mean” adalah 5. Nilai-nilai 3, 4, 6 dan 7 merupakan nilai-nilai yang menyimpang dan kecenderungan terbesar dari kelompok. Nilai 3 menyimpang dari kecenderungan terbesar dari kelompok. Nilai 3 menyimpang sebanyak -2, nilai 4 sebanyak -1, nilai 6 sebanyak +1, serta nilai 7 sebanyak +2. Oleh karena ada 2 nilai 3, 1 nilai 4, 1 nilai 6, dan 2 nilai 7, maka ada $(2 \times -2) + (1 + 1) + (1 + 1) + (2 \times 2)$ penyimpangan-penyimpangan (Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K, Direktorat Kemahasiswaan: 1977-1978). Atas dasar hal tersebut, maka dapat dicari nilai rata-rata dari penyimpangan di dalam suatu kelompok, dengan menerapkan rumus sebagai berikut:

$$SD = \frac{\sum [X - M]}{n}$$

(Catatan: SD adalah ukuran rata-rata penyimpangan; $(X - M)$ adalah penyimpangan X terhadap “mean”, sedangkan N adalah banyaknya kasus yang dijumpai di dalam penelitian.

Nilai standar biasanya digunakan untuk membandingkan dua macam pengukuran yang menggunakan satuan-



satuan yang berbeda. Kedua nilai tersebut secara langsung hanya dapat dibandingkan besar atau kecilnya, apabila kedua nilai tersebut dinyatakan dalam nilai standar, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{X-M}{SD}$$

(Catatan: Z merupakan nilai standar, sedangkan X adalah nilai tertentu; M merupakan “mean”, sedangkan SD adalah standar deviasi).

2. Analisis Data Secara Kuantitatif

Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorisasikannya.¹⁶¹ Oleh karena itu, analisis data sangat erat hubungannya dengan pencatatan serta pengolahan data, maka di atas telah disinggung perihal masalah tersebut. Mencari nilai rata-rata, nilai tengah, maupun nilai terbesar dari suatu kelompok sudah merupakan kegiatan untuk menganalisis data yang kemudian dapat dilanjutkan dengan konstruksinya baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Namun demikian, dapatlah dikatakan bahwa hal-hal tersebut hanya menyangkut analisis terhadap satu variabel belaka, tanpa usaha untuk mencari kemungkinan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Biasanya yang terakhir ini dilakukan apabila peneliti ingin mencari ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, yang lazimnya dinamakan korelasi. Untuk mencari korelasi tersebut, dapat digunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan beberapa rumus tertentu. Kemudian peneliti akan dapat melanjutkan kegiatannya dengan menyelidiki apakah

¹⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XX, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 281.



suatu penyebaran tertentu terjadi secara kebetulan ataukah ternyata secara sungguh-sungguh dipengaruhi oleh satu atau beberapa faktor tertentu, yang biasanya menggunakan rumus dasar:

$$X = Y$$

Hal ini tidak akan dijelaskan di sini.

Apabila dikatakan bahwa antara dua variabel terdapat suatu korelasi, maka kemungkinan-kemungkinannya sebagai berikut:

- a. x adalah sebab dari y, atau y adalah sebab dari x;
- b. baik x maupun y merupakan akibat dari suatu variabel yang lain. Biasanya angka korelasi berkisar antara -1 hingga + 1. Artinya, kalau korelasi sama dengan satu, maka ada hubungan yang sempurna antara dua variabel di mana semakin besar variabel yang satu, maka semakin besar pula variabel yang lain.

Kalau korelasi sama dengan 0, maka berarti bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel. Apabila korelasi sama dengan -1, maka hal itu berarti bahwa ada hubungan yang sempurna, akan tetapi terbalik antara kedua variabel termaksud. Hal itu berarti bahwa semakin besar variabel yang satu, semakin kecil variabel lainnya.

Apabila ingin ditelaah perihal korelasi antara dua variabel, misalnya, korelasi antara suku bangsa dengan jenis kejahatan tertentu, maka kalau jumlah klasifikasi atau kategori hanya 2 x 2, maka biasanya diterapkan rumus:

$$Q = \frac{ad - bc}{ad + bc}$$

Rumus ini dapat diterapkan pada tabel sebagai berikut



(frekuensi dalam angka mutlak):

Jenis Kejahatan Suku bangsa Pelaku	Terhadap Nyawa dan Badan	Terhadap Jumlah Harta Benda	
X	47	20	67
Y	130	445	575

Tabel tersebut dapat disederhanakan menjadi:

Kejahatan terhadap nyawa dan badan	Kejahatan terhadap harta benda
47 (a)	20 (b)
130 (c)	445 (d)

(Catatan: a adalah frekuensi pada kotak kiri atas, b merupakan frekuensi pada kotak kanan atas, c adalah frekuensi pada kotak kiri bawah, dan d merupakan frekuensi pada kotak kanan bawah).

Kalau jumlah klasifikasi atau kategori lebih dari 2 x 2, maka dapat diterapkan atau digunakan rumus:

$$C = \frac{\sum S - n}{\sum S}$$

Penerapannya dapat dilakukan apabila hendak dicari korelasi antara empat suku bangsa dan empat jenis kejahatan (atau lebih), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Membuat matriks frekuensi peristiwa sebagai berikut (angka-angka adalah fiktif):

SUKU BANGSA	JENIS KEJAHATAN				
	A	B	C	D	TOTAL
W	(1) 194	(5) 70	(9) 41	(13) 30	335



X	(2) 83	(6) 124	(10) 41	(14) 36	284
Y	(3) 25	(7) 34	(11) 55	(15) 23	137
Z	(4) 56	(8) 36	(12) 43	(16) 109	244
TOTAL	358	264	180	198	1000

- b) Hitunglah nilai bebas di dalam setiap kotak (misalnya [1], [2] dan seterusnya) dengan mengalikan jumlah war-ga suku bangsa dengan jumlah kejahatan dibagi dengan jumlah sampel.
- c) Kuadratkan jumlah frekuensi pada setiap kotak un-tuk kemudian dibagi dengan nilai bebas yang hasilnya disimbolkan dengan S. Contoh: Kotak 1 = $S = (194): 120 = 313,6$.
- d) Jumlahkan $S + S + S \dots$ dan seterusnya yang simbolnya S.

SUKU BANGSA	JENIS KEJAHATAN			
	A	B	C	D
W	(1) 120	(5) 88	(9) 60	(13) 66
X	(2) 102	(6) 75	(10) 51	(14) 56
Y	(3) 49	(7) 36	(11) 25	(15) 27
Z	(4) 87	(8) 64	(12) 44	(16) 48

- e) Terapkan rumusnya:
 $C = \text{Korelasi antara dua variabel setara}$



jumlah $S + S + S \dots$ dan seterusnya
 $N = \text{Jumlah sampel}$

Dapat disimpulkan dari uraian di atas, bahwa pengolahan data mencakup kegiatan mengedit (*editing*) data dan mengode (*coding*) data. Mengedit data ialah kegiatan memeriksa data yang terkumpul; apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak, lengkap atau tidak, cara pengisiannya sudah benar atau tidak, dapat disisihkan atau menyempurnakannya dengan jalan melakukan pengumpulan data ulangan ke sumber-sumber data bersangkutan.

Mengkodekan data, berarti memberikan kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variabel yang dikumpulkan datanya untuk variabel jenis kelamin misalnya, diberi kode 1 kepada data yang jenis kelaminnya *laki-laki*, dan diberi kode 2 kepada data jenis yang kelaminnya *perempuan*. Setelah semua data dikodekan, selanjutnya dipindahkan ke dalam “*beberan*” rekapitulasi data.

Setelah pengolahan data, berikutnya melakukan analisis dan menginterpretasikan data. Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka penginterpretasian data; ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah atau hipotesis penelitian; juga melakukan perhitungan-perhitungan tertentu sesuai dengan jenis pengolahan statistik yang digunakan di masing-masing masalah atau hipotesis penelitian; dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan, baik untuk masing-masing masalah atau hipotesis penelitian maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti.



7

TEKNIK DAN FORMAT PENULISAN PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu penelitian, setelah peneliti melakukan langkah-langkah yang telah ditentukan dalam dunia penelitian sehingga sampai pada tahap penyimpulan penelitian. Namun tugas yang tidak kalah penting dari proses penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah melakukan penulisan laporan penelitian itu sendiri.

Pada bagian ini, penulis diharapkan dapat mendeskripsikan penelitiannya dimulai dari proses pertama sekali melakukan penelitian sampai pada batas terakhir penelitiannya yang dilakukan secara sistematis dan terukur. Dengan laporan yang akurat dan dapat diuji dengan fakta-fakta yang ada tentunya penelitian yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik. Dalam pada itu, penulis mencoba untuk mengurai berbagai bagian yang terkait dengan teknik dan cara dalam penulisan laporan penelitian tersebut.

B. FUNGSI DAN JENIS LAPORAN HASIL PENELITIAN

Pada umumnya peneliti setelah melakukan penelitian terhadap objek tertentu dalam penelitiannya, maka tugas terakhir yang harus dilakukan adalah membuat laporan hasil penelitian secara sistematis. Dengan kata lain, penulisan laporan penelitian merupakan suatu keniscayaan yang mesti dilaksanakan peneliti.

Dalam jenjang akademik misalnya, sudah menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa yang berada pada jenjang S-1 untuk menyusun laporan penelitian berbentuk skripsi, sedangkan untuk jenjang S-2 menyelesaikan tugas laporan tesis, dan pada jenjang terakhir S-3 dituntut untuk menyelesaikan laporannya berupa disertasi penelitian.

Sementara itu di pihak lain, penulisan laporan penelitian dimanfaatkan juga untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu fungsi penelitian lainnya. Penelitian demikian biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian. Ada lembaga penelitian nasional yaitu LIPI dan lembaga-lembaga lainnya, lembaga-lembaga di tingkat daerah, dan lembaga-lembaga penelitian di tingkat daerah, lembaga-lembaga penelitian di tingkat perguruan tinggi. Penulisan laporan hasil penelitian demikian terutama dilakukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan.

Ada pula penelitian yang dilakukan karena keperluan lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan, atau lembaga bisnis tertentu. Dengan kata lain, penelitian demikian dilakukan untuk keperluan suatu lembaga tertentu. Karena penelitian itu dilakukan atas "pesanan, maka penyusunan laporan dengan sendirinya disusun untuk keperluan pesanan tersebut ada bahaya yang mengancam bagi penelitian pe-



san, yaitu apabila pemesan” ikut mengatur “skenario hasil penelitian yang dilakukan”. Dengan kata lain, hasil penelitian akhirnya dipengaruhi pemesan penelitian, mungkin untuk keperluan politik tertentu, keperluan strategi dagang, dan semacam itu. Dalam hal ini, peneliti hendaknya tetap berpegang pada etika penelitian sehingga ia membuat laporan penelitian apa adanya. Jadi, peneliti hendaknya objektif walaupun banyak kesukaran yang akan dihadapi.

Akhirnya, penulisan hasil penelitian dapat pula dimanfaatkan untuk keperluan publikasi ilmiah. Hal ini ada kaitannya dengan fungsi penulisan laporan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun fungsi terakhir ini lebih mengarah pada publikasi ilmiah karena suatu dorongan tertentu. Seorang peneliti yang bekerja di lembaga penelitian atau seorang dosen sangat memerlukan butir kredit untuk keperluan mengembangkan karier profesionalnya. Motivasi itu dapat dicapai secara efektif dan efisien jika seorang peneliti atau dosen melakukan penelitian dan memublikasikannya dalam majalah ilmiah.

Fungsi-fungsi penulisan laporan tersebut sangat erat kaitannya dengan jenis dan bentuk laporan itu sendiri.

Adapun jenis laporan-laporan tersebut paling tidak terbagi kepada empat bagian, yaitu:

Pertama, laporan yang dilakukan oleh mahasiswa (jalur pendidikan formal). Jika pada mahasiswa S-1, maka laporan penelitiannya disebut skripsi, selanjutnya untuk mahasiswa S-2 laporan akhirnya disebut tesis, dan untuk S-3 disebut disertasi. Hal tersebut tentunya memiliki aturan tersendiri yang telah ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi. Hal ini sebagai ajang pembuktian dan pengesahan seorang mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.



Kedua, laporan penelitian yang berbentuk publikasi ilmiah. Hal ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian dari para peneliti dan akan dipublikasikan melalui majalah, jurnal. Perbedaannya adalah jika tesis dan disertasi memiliki aturan yang kaku dalam bentuk penulisan, namun untuk penulisan publikasi ilmiah ini terkesan lebih longgar dan penyusunan laporannya terkesan lebih luwes untuk menentukan sendiri gaya penulisan, misalnya laporannya disusun dan ditulis sesuai dengan target audience atau pembaca.

Ketiga, bentuk ketiga dalam penulisan laporan penelitian adalah laporan penelitian yang ditujukan kepada para pembuat keputusan atau kebijaksanaan, bentuk ini disebut juga dengan “bentuk eksekutif”. Bentuk ini akan menjadikan pembacanya sekaligus menjadi pemakai hasil penelitian. Bentuk laporan seperti ini berkaitan sekali dengan waktu pemakai hasil penelitian. Oleh karenanya, ciri dari laporan seperti ini biasanya tepat, padat, singkat, dan tidak dalam tataran ilmiah dari laporan yang bersifat argumentatif dan persuasif.

Keempat, laporan penelitian yang disusun untuk dilemparkan kepada masyarakat awam. Hal ini biasanya dibuat sebagai artikel dalam koran atau majalah. Bentuk ini memiliki cara penyusunan tersendiri, sebab pembacanya terdiri dari masyarakat awam, oleh karenanya penyusunannya berbentuk “ilmiah populer”. Bahasanya disusun secara singkat sederhana namun harus tetap terlihat inti dari hakikat penemuan penulis dan tentunya dapat terkomunikasikan terhadap pembacanya.

C. KERANGKA DAN ISI LAPORAN PENELITIAN

Tentunya akan beragam model dan metode dalam penulisan laporan penelitian, berbeda bentuk tulisan yang dibuat



tentunya akan berbeda pula bentuk laporan yang digunakan, namun ukuran baku dalam menyusun kerangka dari isi laporan penelitian berdasarkan penelitian yang dilakukan di bangku kuliah seperti penyusunan tesis atau disertasi. Dan, tentunya penelitian juga berbentuk kualitatif dari kuantitatif serta penelitian doktrinal dari nondoktrinal.¹⁶²

Dalam penyusunan kerangka laporan penelitian terdiri dari lima bagian: (1) tujuan penelitian; (2) keputusan tentang metode; (3) presentasi data; (4) validasi dari verifikasi penemuan; (5) kesimpulan dan rekomendasi. Hal ini nantinya akan mengukur sejauh mana kualitas penelitian yang kita lakukan, apakah penggalian penelitian sifatnya hanya umum saja atau sampai pada menggali sampai ke akar-akarnya. Dalam menyusun laporan penelitian ini juga nanti harus jelas letak baik pertanyaan yang dilontarkan sampai kepada tindakan apa yang dilakukan dalam mengambil keputusan sebagai hasil penelitian.

Dalam menetapkan tujuan penelitian¹⁶³ hendaknya harus sesuai dengan beberapa tahapan yang telah diatur, yaitu:

1. Konteks Penelitian. Dalam hal ini yang perlu diketahui yaitu: Bagaimana asal mula penelitian dilakukan? Untuk apa penelitian dilakukan? Bagaimana penelitian ini dibiayai? Bagaimana penentuan penelitian?
2. Fokus Penelitian: hal ini didasari pada pertanyaan apakah yang nantinya akan dijawab dalam penelitian ini? Tindakan atau keputusan apakah yang akan diambil sebagai hasil penelitian?

Setelah melalui tahapan pertama tersebut dan telah dipa-

¹⁶² Baca Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo.

¹⁶³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 218.



hami dan ditetapkan, maka akan masuk pada langkah kedua, yaitu keputusan tentang metode.¹⁶⁴

1. Ketetapan Metode; hal ini bertujuan untuk mencari jawaban tentang bagaimana caranya sehingga metode yang digunakan mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan? Kelebihan dari kekurangan apa yang ada pada metode yang digunakan sehubungan dengan tujuan penelitian?
2. Keputusan desain dari *sampling* apa yang telah dibuat serta alasannya; situasi yang disampel. Periode waktu sampel, orang-orang yang disampel. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya masuk pada tahapan mencari presentasi data, yang tentunya juga bagian dari kelanjutan dari tahapan pertama dari kedua.

1. Deskripsi informasi tentang program: riwayat dari asal usul program penelitian, kegiatan program, proses dan tujuan, ciri-ciri subjek.
2. Deskripsi penemuan; informasi deskriptif atas dasar pengamatan atau wawancara. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan?
3. Analisis data; penyajian pola, tema, kecenderungan, dari motivasi yang muncul dari data. Menyusun tipologi, baik yang disusun melalui dunianya maupun tipologi yang disusun oleh peneliti.
4. Penafsiran dari penjelasan; hubungan antara hal-hal yang berkaitan dan dengan bagian yang bebas. Persoalan yang berkaitan dengan sebab dari konsekuensinya, termasuk hubungan antara proses dari hasil

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 219.



Tahapan selanjutnya yaitu validasi dari verifikasi penemuan hal ini juga akan berkaitan dengan tahapan-tahapan sebelum dan sesudahnya.

1. Perincian tentang pelaksanaan metode dari pelaporan: bagaimana studi dilakukan? Bagaimana pengumpulan data sebenarnya?
2. Derajat dari kepercayaan penemuan; pembahasan tentang hipotesis alternatif dan alternatif penjelasan. Analisis kasus-kasus negatif atau yang mengganggu. Triangulasi; metode, sumber, peneliti, pengaruh peneliti, peranan pribadi, dan perspektif peneliti.

Bagian yang terakhir dari tahapan ini adalah kesimpulan dari rekomendasi¹⁶⁵ dari bagian ini menjadi bagian akhir dalam penulisan laporan.

1. Apa sajakah penemuan-penemuan penting?
2. Apa sajakah implikasi dari penemuan-penemuan tersebut?
3. Apa sajakah rekomendasi yang diajukan; baik rekomendasi dari pihak subjek maupun peneliti.

Selanjutnya dalam proses penulisan laporan penelitian juga dikenal tentang teknik dan format penulisan, hal ini tentunya juga harus sesuai dengan aturan formal yang mengatur tata cara penulisan ini. Seperti halnya pengaturan tentang kertas dan margin ketikan, penomoran halaman, sumber acuan, kutipan, daftar pustaka, penyajian data dan beragam hal yang berkaitan dengan format penulisan.¹⁶⁶

Dalam melakukan penulisan tentunya memiliki beragam permasalahan, dan hal tersebut sering berdampak pada hasil

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 220.

¹⁶⁶ Baca Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 141-165. Serta buku-buku yang berkaitan tentang teknik penulisan.



penulisan. Dalam buku Imam Munawir¹⁶⁷ dijelaskan, bahwa permasalahan dalam pelaporan penelitian diawali dari siapa pendengar itu? Hal ini sebagai bagian dari pembuktian serta pertanggungjawaban hasil penelitian. Apakah penelitian tersebut dipertanggungjawabkan hanya terhadap audiens, atau kepada masyarakat.

Selanjutnya, disebut tentang format dari metode penulisan, antara lain mengenai hipotesis yang sudah jelas dan tegas? Apakah latar belakang observasi juga sudah sesuai? Apakah problem hipotesis telah dinyatakan dalam istilah ilmiah? Apakah rencana riset telah dibuat secara terperinci hingga logikanya menjadi jelas dan beragam hal lainnya yang menjadi problema dalam penulisan laporan.

Dalam buku Bruce Chadwick, dkk.¹⁶⁸ dijelaskan, bahwa ada tiga masalah pokok dalam penulisan, yaitu: *Pertama*, identifikasi pembaca, hal ini merupakan bagian yang penting, sebab penulisan hasil laporan penelitian akan tergantung kepada pembaca, dan ini juga berkaitan dengan cara penyampaian, maka harus dilihat target serta subjek dari hal yang akan diteliti. Misalnya, jika pembaca adalah dari kalangan peneliti atau akademisi maka ia akan tertarik dengan aspek-aspek teknis penelitian, namun jika masyarakat umum, pejabat serta manajer maka yang akan diungkapkan “ceritakan kepada kami apa yang kamu temukan? Apa maknanya bagi kami? Dan lainnya”.

Selanjutnya, yang menjadi bagian dari permasalahan *kedua*, adalah organisasi, hal ini berkaitan dengan penyusunan pokok-pokok bahasan atau penemuan mengenai topik apa

¹⁶⁷ Baca Imam Munawir, *Metode-metode Penelitian Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.

¹⁶⁸ Baca Bruce A. Chadwick, dkk., *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, Terj., (Semarang: IKIP Press, t.th.), hlm. 123.



dan diletakkan di mana. Atau dengan kata lain, penyusunan dalam penulisan laporan akan menjadi penting untuk menyajikan hasil laporan penelitian tersebut.

Bagian yang terakhir atau yang *ketiga*, adalah gaya. Hal ini berkaitan dengan cara penyampaian dalam penyampaian gagasan secara singkat, menarik, dan tepat. Tepatnya gaya yang disajikan akan berdampak pada pembaca, jika pembaca merasa dimudahkan dan tertarik dengan penyusunan serta bentuk dari metode penulisan hasil laporan, maka hal ini tentunya akan baik.

Contoh: Bentuk Kerangka Laporan Penelitian

I. Tujuan Penelitian

A. Konteks Penelitian

1. Bagaimana asal mula penelitian dilakukan?
2. Untuk apa penelitian ini?
3. Bagaimana penelitian ini dibiayai?
4. Bagaimana penentuan peneliti?

B. Fokus Penelitian

1. Pertanyaan apakah yang dijawab dalam penelitian dilakukan?
2. Mengapa pertanyaan-pertanyaan ini?
3. Tindakan-tindakan apakah yang diperkirakan atau keputusan-keputusan apakah yang akan diambil sebagai hasil dari penelitian ini.

II. Keputusan-keputusan tentang Metode

A. Ketetapan Metode

1. Bagaimana caranya sehingga metode yang digunakan mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan?
2. Kelebihan dan kekurangan apakah yang ada pada metode yang digunakan sehubungan dengan tujuan penelitian?



- B. Keputusan-keputusan Desain dari *Sampling* Apakah yang Telah Dibuat, Apa Alasan, dan Apa Konsekuensinya?
 1. Situasi yang disampel.
 2. Periode waktu yang disampel.
 3. Orang-orang yang disampel.
- III. Presentasi Data
 - A. Deskripsi Informasi tentang Program
 1. Riwayat dari asal usul program penelitian.
 2. Kegiatan program, proses, dan tujuan.
 3. Ciri-ciri subjek.
 - B. Deskripsi Penemuan yang Diorganisasi di Sekitar Pertanyaan-pertanyaan Penelitian dan Pemakai Informasi
 1. Informasi deskriptif atas dasar pengamatan atau wawancara. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan?
 2. Sediakan informasi apa saja yang diperlukan pembaca ke dalam situasi yang diuraikan peneliti.
 - C. Analisis Data
 1. Penyajian pola, tema, kecenderungan, dan motivasi yang muncul dari data.
 2. Penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi:
 - a. tipologi yang disusun oleh subjek untuk menjelaskan dunianya;
 - b. tipologi yang disusun oleh peneliti.
 - D. Penafsiran dan Penjelasan
 1. Kaitan-kaitan antara kategori dari dimensi.
 2. Hubungan-hubungan antara hal-hal yang berkaitan dari bagian-bagian yang bebas.
 3. Persoalan yang berkaitan dengan sebab dan konsekuensinya, termasuk hipotesis tentang hubungan antara proses dan hasil.
- IV. Validasi dan Verifikasi Penemuan



- A. Perincian tentang Pelaksanaan Metode dan Pelaporan pada Setiap Tingkatan Awal dari Prosedur yang Diharapkan.
 - 1. Bagaimana studi itu dilakukan?
 - 2. Bagaimana pengumpulan data sebenarnya?
- B. Derajat Kepercayaan Penemuan
 - 1. Pembahasan tentang hipotesis alternatif dan alternatif pembahasan.
 - 2. Analisis kasus-kasus negatif yang menunggu.
 - 3. Triangulasi: a. metode, b. sumber, c. peneliti.
 - 4. Pengaruh peneliti dan peranan pribadi perspektif peneliti.
 - 5. Salinan setiap reaksi subjek atau lainnya yang telah menelaah jalannya studi.
- V. Kesimpulan dan Rekomendasi (atas permintaan tertentu, bagian ini kadang-kadang ditempatkan pada bagian pertama laporan agar pengambil keputusan langsung memperhatikannya)
 - A. Apa sajakah Penemuan-penemuan Penting?
 - B. Apa Saja Implikasi dari Penemuan-penemuan Tersebut?
 - C. Apa Sajakah Rekomendasi-rekomendasi yang Diajukan
 - 1. Rekomendasi dari pihak subjek.
 - 2. Rekomendasi dari pihak peneliti.

Kerangka tersebut, sudah berbicara tentang isinya sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Di lain pihak, ada juga tahap penulisan yang sebenarnya. Kedua penulis itu menamakan tahap awal itu sebagai “tugas organisasional”. Ada tiga kelompok tugas organisasional yang perlu dilakukan.

Lincoln dan Cuba (1985: 362-363) dalam buku mereka tidak mengemukakan kerangka lengkap sewaktu membahas tentang pelaporan studi kasus. Mereka menyajikan kerangka dua dimensi penting yang harus ada dalam laporan, yaitu



bagian substantif dari bagian metodologis. Kerangka dasar kedua dimensi tersebut diperlihatkan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Isi Laporan ‘Studi Kasus’

Aspek-aspek	Maksud	Pelaksanaan	Modifikasi
Pertimbangan Substantif <ul style="list-style-type: none"> - Masalah, evaluasi, atau 			
Pilihan Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> - Konteks atau latar - Transaksi - Hal-hal yang menonjol - Hasil 			
Pertimbangan Metodologis <ul style="list-style-type: none"> - Peneliti - Metode keabsahan data 			

Maksud pelaksanaan dan modifikasi dalam kolom-kolom pada Tabel 6 menunjukkan adanya sesuatu yang diharapkan semula dengan unsur-unsur substantif maupun metodologi. Harapan itu dilaksanakan pada latar penelitian yang sebenarnya dan bila ada perbaikan-perbaikan tertentu, disajikan pada kolom terakhir. Selanjutnya, menurut kedua penulis tersebut bagian substantif berisi hal-hal sebagai berikut:

- Rumusan masalah, evaluasi, atau pemilihan kebijakan yang terjadi dalam studi.
- Rumusan secara teliti tentang konteks atau latar tempat penelitian diadakan. Hal inilah yang membentuk “uraian tabel” seperti yang sudah (diuraikan di muka).
- Pembahasan tentang hal-hal yang menonjol yang ditemukan di lapangan ialah tentang unsur-unsur yang dite-



mukan sebagai hal penting dan yang diteliti secara mendalam.

- Diskusi tentang hasil penelitian sebagai bahan “pelajaran yang dapat dipelajari” dari penelitian. Pembaca hendaknya memperhatikan bahwa pelajaran itu bukan merupakan generalis, melainkan “hipotesis kerja” yang menghubungkannya dengan arah pengertian dengan tempat penelitian.

Bagian metodologi yang dapat dimasukkan ke dalam isi maupun pada lampiran berisi hal-hal sebagai berikut:

- Uraian secara teliti tentang derajat kepercayaan peneliti. Jika memang manusia peneliti itu bertindak sebagai “alat penelitian”, maka menjadi hak pembaca untuk mengetahui informasi tentang “alat” itu sebagaimana layaknya pada penelitian konvensional. Yang dikemukakan ialah jenis latihan dan pengalaman yang pernah disandangnya, pernyataan. Tentang keinginan dan harapan-harapannya, dari kemenangan terhadap masalah atau latar yang hendaknya dikemukakan sejauh memang ia berpendapat demikian.
- Uraian secara teliti tentang metode-metode yang digunakan mencakup hakikat upaya “membuka” desain.
- Uraian secara teliti tentang ukuran-ukuran yang digunakan untuk meningkatkan kemungkinan keabsahan data peneliti yang derajat keabsahannya dikaitkan dengan berbagai ketentuan, dan akhirnya pemeriksaan secara khusus dilakukan dengan pengecekan anggota dan *auditing*.

Di atas telah dikemukakan dua kerangka lengkap namun sebagai bahan perbandingan kiranya perlu dikemukakan su-



atau kerangka lain. Sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

- I. Latar Belakang, Masalah, dan Tujuan Penelitian
 - A. Latar Belakang Penelitian
 1. Asal mula diselenggarakannya penelitian.
 2. Alasan diadakannya penelitian.
 3. Penelitian ini diadakan oleh siapa?
 4. Apakah penelitian ini diadakan secara perorangan ataukah oleh tim peneliti, siapa dan bagaimana penentuannya?
 - B. Masalah dan Pembatasan Penelitian
 1. Fokus sebagai pembatasan penelitian.
 2. Pertanyaan-pertanyaan penelitian.
 3. Alasan (untuk menjawab mengapa pertanyaan-pertanyaan ini yang diajukan).
 - C. Tujuan, Kegunaan, dan Prospek Penelitian
 1. Tujuan penelitian.
 2. Kegunaan pelaksanaan dari hasil penelitian.
 3. Prospek penelitian (berupa tindakan tindakan yang diperkirakan atau kepustakaan-kepustakaan yang akan diambil sebagai akibat hasil penelitian ini).
- II. Acuan Teori
 - A.(Judulnya sesuai Fokus Penelitian)
 1. (Subjudulnya sesuai subfokus 1)
 2. (Subjudulnya sesuai subfokus 2)
 - B. Petunjuk untuk Studi Ini
- III. Metodologi
 - A. Deskripsi Latar Penelitian, Entri, dan Kehadiran Peneliti
 1. Deskripsi latar penelitian.
 2. Tahap-tahap dan jadwal waktu penelitian.



3. *Sampling*: situasi dan subjek.
 - B. Deskripsi Peneliti sebagai Alat dan Metode yang Digunakan
 - C. Tahap-tahap Penelitian dan Sampling
 1. Tahap-tahap dan jadwal waktu penelitian.
 2. *Sampling*: situasi dan subjek.
 - D. Proses Pencatatan dan Analisis Data
 1. Proses pencatatan data.
 2. Proses analisis data.
- IV. Penyajian Data
- A. Deskripsi Penemuan (yang Diorganisasikan di Sekitar Pernyataan-pernyataan Penelitian dan Pemakai Informasi)
 1. Deskripsi informasi: hasil pengamatan atau wawancara (Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan?)
 2. Deskripsi informasi lainnya (berasal dari dokumen, FOW).
 - B. Deskripsi Hasil Analisis Data
 1. Penyajian tema, kecenderungan, dan motivasi yang muncul.
 2. Penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi (tipologi yang disusun untuk menjelaskan caranya dari yang disusun oleh peneliti).
 - C. penafsiran dan penjelasan
 1. Hipotesis kerja: Kaitan-kaitan antara kategori dengan dimensi; antara konsep dengan konsep.
 2. Persoalan yang berkaitan dengan sebab dan konsekuensinya (dengan “konsep” yang saling mempertajam).
- V. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
- A. Perpanjangan Kehadiran Pengamat



- B. Diskusi Rekan Sejawat
- C. Analisis Kasus Negatif
- D. Kecukupan Referensial
- E. Triangulasi: Metode, Sumber, Peneliti
- F. Pengecekan Anggota
- G. Auditing

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

- A. Apa Sajakah Penemuan-penemuan Penting?
- B. Apa Saja Implikasi dari Penemuan Tersebut?
- C. Apa Sajakah Rekomendasi-rekomendasi yang Diajukan?
 - 1. Rekomendasi dari pihak subjek.
 - 2. Rekomendasi dari pihak peneliti.

Seperti yang dikemukakan di atas, selain kemungkinan adanya kekurangan, peranan pembimbing atau konsultan peneliti juga akan menentukan penyusunan kerangka laporan penelitian. Dengan kata lain, model yang disajikan di atas dapat secara luwes dimanfaatkan dengan kemungkinan adanya penyesuaian-penyesuaian tertentu.

D. TEKNIK DAN STRATEGI PENULISAN LAPORAN

Setidaknya dalam suatu penelitian untuk dapat melakukan penulisan hasilnya sebagai harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Langkah-langkah Penulisan Laporan

Lincoln dari Guba (1985:366-368) membagi langkah-langkah penulisan itu ke dalam dua tahap besar, yaitu tahap awal dari tingkatan abstraksi berupa pertanyaan-pertanyaan tentang jenis latar tertentu menjadi pertanyaan universal



tentang makhluk hidup, perilaku, atau situasi.

Pertama, menyusun materi data sehingga bahan-bahan itu dapat secepatnya tersedia apabila diperlukan. Tugas ini hendaknya dapat diselesaikan selama pemrosesan data berlangsung. Kategori-kategori yang telah ditemukan dan dituliskan dalam kartu dapat digunakan untuk keperluan penelaahan data yang bersumber dari dokumen, buku, dan lainnya.

Kedua, penyusunan kerangka laporan. Kerangka laporan itu hendaknya dipersiapkan dalam rangka konsep yang ditemukan dari data. Penulis hendaknya menyadari bahwa kerangka yang disusun secara awal akan beberapa kali mengalami perubahan. Yang penting dalam hal ini agar peneliti mengusahakan supaya seluruh data dapat tercakup dalam kerangka itu.

Ketiga, mengadakan uji silang antara bahan data dengan kerangka yang baru disusun. Pekerjaan ini membosankan, tetapi harus dilakukan karena hasilnya akan menjadi dasar penulisan, jika indeks yang disusun terlalu banyak, penulis hendaknya membuat ikhtisarnya agar mudah diujisilangkan. Uji silang dilakukan dengan jalan menelaah indeks bahan data satu demi satu, kemudian dipertanyakan apakah hal itu sesuai dengan kerangka.

Setelah pekerjaan tersebut selesai, selanjutnya penulis siap menghadapi penulisan yang sebenarnya. Penulisan yang sebenarnya hendaknya mengikuti kerangka yang telah disusun itu. Biasanya timbul kejenuhan namun usahakan untuk mengatasinya dengan jalan beristirahat atau melakukan sesuatu yang lain dan meneruskan lagi dengan pekerjaan penulisan, yaitu sewaktu sudah segar kembali. Usahakan agar jangan memaksakan diri melakukan pekerjaan menulis apabila berada dalam keadaan jenuh, letih, dan mengantuk.



Tahap penulisan ini perlu disertai peninjauan audit. Hal itu memungkinkan penulis untuk melaporkan fakta yang benar-benar fakta atas dasar sumber yang dapat ditunjukkan. Dengan demikian, peneliti benar-benar yakin untuk membuat pertanyaan yang senantiasa didukung oleh data. Penulis pada tahap penulisan ini hendaknya senantiasa mengaitkannya dengan hasil penelaahan kepustakaan. Hasil penelaahan kepustakaan berguna bagi penggunaan kriteria inklusi-eksklusi.

2. Teknik Penulisan Laporan

Dalam hal ini mencakup tiga hal, yaitu cara penulisan, gaya penulisan, dan diakhiri dengan petunjuk umum penulisan. Menurut Bogdan dan Bikien (1982:172-175), cara penulisan suatu laporan penelitian biasanya diarahkan oleh suatu “fokus” yang berarti bahwa penulis memutuskan untuk memberitahukan keinginannya kepada para pembaca. Keinginan tersebut hendaknya dituliskan dalam satu atau dua kalimat.

Fokus itu hendaknya berupa tesis, tema, atau topik. Tesis ialah proposisi yang diajukan kemudian diikuti argumentasi. Tesis itu bisa diangkat dari hasil perbandingan penelitian yang sedang dilakukan dengan apa yang dikatakan oleh kepustakaan profesional. Misalnya: “Peneliti berpendirian bahwa ...: Peneliti ini menemukan dimensi lainnya, yaitu ...; Model ... yang ditemukan dalam penelitian ini jelas menuntut adanya cara penerapan lainnya dalam kehidupan masyarakat.”

Tesis demikian barangkali dapat berargumentasi bahwa konsekuensi yang tak tampak dari suatu perubahan tertentu yang dilihat oleh orang luar lebih penting daripada proses yang direncanakan. Dalam hal ini, tesis itu merupakan suatu fokus yang baik yang penyajiannya bersifat argumentatif dan



menarik. Yang perlu dilakukan ialah peneliti hendaknya berhati-hati mengemukakan argumentasinya karena biasanya argumentasi demikian diserang oleh para peneliti lainnya.

Fokus berikutnya ialah tema. Tema menurut kedua penulis di atas (17), adalah beberapa konsep yang muncul dari data. Tema ini dapat dirumuskan dalam beberapa penulis yang mengungkapkan kerangka penelitian, walaupun tidak lengkap, sebagaimana yang dikemukakan berikut ini.

Fokus jenis ketiga ialah topik, yaitu satuan aspek tertentu tentang apa yang sedang diteliti dari suatu ide mengenai hal itu. Tema bersifat konseptual sedangkan topik bersifat deskriptif.

Penggunaan fokus ini kadang-kadang digabung oleh penulis laporan, dan hal itu bergantung pada beberapa hal. *Pertama*, bergantung kepada apa yang diperlukan oleh penulis laporan. *Kedua*, bergantung kepada kemampuan dan kecakapan penulis. *Ketiga*, bergantung kepada bentuk tulisan yang dihasilkan, misalnya penulisan akademis cenderung menggunakan tema.

Persoalan kedua yang dibahas ialah gaya penulisan. Gaya penulisan dapat dinyatakan berada di antara suatu kontinu. Di suatu pihak terdapat gaya penulisan formal dan tradisional dari pihak lain ada gaya penulisan yang terlampau longgar, deskriptif, menceritakan peristiwa yang berkepanjangan terlebih dahulu, pada akhirnya menarik kesimpulan. Pada gaya tradisional penulis menyajikan laporan penulisan atau pandangannya secara didaktis. Sejak awal penulis sudah menyatakan isinya akan berargumentasi, menyajikan aspek-aspek kunci perspektifnya, dari menyajikan contoh-contoh data. Data ditemukan secara induktif dan penyajiannya dilakukan secara deduktif.



Gaya nontradisional agak kontroversial dalam cara menyajikan latar penelitian. Membaca laporan mereka adalah sebagai membaca novel di mana penulis menciptakan suasana. Kadang-kadang penulis ikut berperan serta dalam laporannya.

3. Petunjuk Penulisan Laporan

Ada enam macam petunjuk penulisan yang diberikan oleh Lincoln dan Guba (1985:365-366), yang kiranya dapat bermanfaat dalam penulisan laporan penelitian yang dikemukakan berikut ini:

- a. Penulisan hendaknya dilakukan secara informal. Dalam penelitian kualitatif, tugas seorang peneliti pada dasarnya demikian. Hal itu berarti bahwa ia perlu memberikan gambaran tentang dunia lapangan penelitian yang dilihat dari segi bangunan yang dipakai oleh responden, melihat dunia dari segi pandangan sebagai apa adanya, dan menyatakan bangunan dari segi bahasa mereka. Penyajiannya sedemikian terurai sehingga peneliti lainnya yang datang ke tempat itu akan memperoleh gambaran umum yang sama.
- b. Penulisan itu hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif, kecuali bagian yang mempersoalkan hal itu. Dengan kata lain, jika seorang peneliti menggambarkan bangunan responden, janganlah dikacaukan dengan bangunan peneliti sendiri. Penafsiran dan evaluasi itu harus didasarkan atas data itu sendiri. Jangan membiarkan pembaca menafsirkan bahwa yang dikemukakan itu dari peneliti sendiri. Jika memang hal itu perlu dikemukakan, sebaiknya peneliti menuliskannya dengan kata atau



kalimat yang diberi tanda khusus seperti huruf miring atau diberi garis di bawahnya.

- c. Penulis hendaknya menyadari jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan. Pada mulanya laporan yang disusun akan menjadi sangat banyak dan tebal. Semakin lama peneliti makin berpengalaman dalam pekerjaan menulis laporan. Berdasarkan pengalaman tersebut akan tiba saatnya dalam dirinya terbentuk kriteria sehingga bahan yang dimasukkan atau tidak (dimasukkan akan terbatas dengan sendirinya).
- d. Penulis hendaknya tetap menghormati janji untuk tidak menuliskan nama calon menjaga kerahasiaannya, dan ini tidak mudah pelaksanaannya, namun tetap harus diusahakan agar dapat diimplementasikan secara tetap. Hal itu perlu dilakukan, karena walaupun nama subjek dari nama lokasi telah diubah, namun demikian jika uraiannya jelas, barangkali orang lain akan tetap dapat mengenalnya.
- e. Penulis hendaknya tetap melaksanakan penjelasan audit. Penelusuran *auditing* merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang baik dan penting. Oleh karena itu, hal itu tetap harus dilaksanakan dan untuk itu peneliti hendaknya membuat catatan tentang setiap langkah kegiatan.
- f. Penulis hendaknya menetapkan batas waktu penyelesaian laporannya dan bertekad untuk menyelesaikannya. Batas waktu itu dikaitkan dengan perubahan yang mungkin terjadi pada latar penelitian. Dikaitkan dengan perubahan yang mungkin terjadi pada latar penelitian. Maksudnya ialah agar peneliti dapat menyelesaikan laporan sebelum perubahan terjadi.



E. PENELAAHAN HASIL PENULISAN

Jika menginginkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, salah satu cara untuk melaksanakannya mengadakan penelaahan (*review*) terhadap laporan yang telah selesai disusun. Tentu hal itu perlu dilakukan sebelum laporan itu diterbitkan. Itulah yang merupakan maksud dan tujuan diadakannya penelaahan.

Suatu penelaahan dapat dilakukan oleh siapa pun, tetapi penelaahan itu didasarkan pada patokan atau kriteria tertentu. Sehubungan dengan hal itu Lincoln dan Guba (1985: 372-372) memberikan beberapa butir patokan yang dikemukakan berikut:

- 1) Apakah uraian tentang lokasi telah benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya? Pengetahuan dan pengalaman pada latar penelitian akan merupakan dasar untuk menetapkan jawaban terhadap pertanyaan ini. Jika memang sekiranya masih ada yang tidak cocok dengan keadaan dan situasi pada latar penelitian, maka revisi jelas perlu diadakan.
- 2) Apakah ada kekeliruan pengungkapan fakta atau interpretasi? Jika sekiranya anggota tim penelitian ada yang berbeda pendapat mengenai kedua hal tersebut, tentu ada sesuatu yang perlu diperjelas atau dipersoalkan. Untuk itu, perlu diadakan pengecekan kembali terhadap fakta langsung pada sumbernya. Jika persoalannya terletak pada penafsiran, maka hal itu perlu diselesaikan dengan anggota tim penelitian. Setelah penyelesaian dilakukan, tentulah perlu diadakan revisi lagi.
- 3) Apakah ada data atau informasi penting yang dibuang? Kriteria inklusi dan eksklusi akan sangat besar perannya. Jika ditelaah kembali dan memang ada informasi



yang telah dibuang, maka perlu diadakan perbaikan kembali.

- 4) Apakah penafsiran yang dilakukan oleh peneliti atau anggota tim penelitian itu sesuai dengan penafsiran oleh subjek? Pada petunjuk penulisan laporan ini sudah dikedukakan, namun dapat terjadi peneliti menafsirkannya melebihi penafsiran subjek. Jika hal itu terjadi, kewajiban penelitalah untuk memperbaikinya kembali.
- 5) Apakah kerahasiaan dan usaha tidak mencantumkan nama latar penelitian dari subjek itu sudah benar-benar terjamin? Hal ini pun telah diberikan sebagai petunjuk bagi penulisan laporan, namun hal-hal kecil demikian dapat saja terlupakan, dan hal itu akan merupakan persoalan yang menimbulkan masalah yang cukup serius. Hal itu perlu disadari agar tidak sampai terjadi.
- 6) Apakah ada persoalan-persoalan yang “hangat” dan sensitif ikut dimasukkan dalam laporan? Persoalan demikian hendaknya diselesaikan dengan orang yang bersangkutan pada latar penelitian, apakah mereka setuju atau tidak setuju persoalan itu diungkapkan dalam laporan penelitian. Hal-hal seperti itu hendaknya dicek dahulu dengan teliti.

Dengan bermodalkan pegangan tersebut, kiranya penelaahan dan revisi dapat diadakan. Apakah penelaahan seperti itu cukup diadakan sekali? Lincoln dan Guba (1985: 371-373) memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu dan sekaligus menganjurkan agar hal demikian paling tidak diadakan tiga kali.

Pertama, penelaahan perlu dilakukan oleh anggota-anggota tim penelitian itu sendiri. Mereka yang dilibatkan ke dalam langkah pertama ini bukan hanya mereka yang pergi ke



lapangan penelitian. Mereka juga yang tidak sempat mengunjungi lapangan, tetapi memiliki cukup pengetahuan mengenai hal itu, dapat pula dilibatkan dalam kegiatan itu.

Kedua, penelaahan pada tahap ini hendaknya tidak hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai latar belakang tentang yang diteliti, tetapi juga oleh yang berasal dari luar lingkaran penelitian. Hal itu perlu dilakukan atas dasar pendapat bahwa yang dilakukan dan dikerjakan oleh dua kepala akan lebih baik jika dibandingkan dengan yang dilakukan hanya oleh satu kepala.

Ketiga, penelaahan dilakukan oleh kedua kelompok itu secara bersama-sama. Pada tahap ini penelaahan hendaknya diarahkan pada organisasi dari gaya penulisan. Pegangan tim untuk menelaah dalam hal ini yaitu: Apakah laporan ini dapat dipahami oleh orang-orang pada tingkatan-tingkatan tertentu? Apakah penulisannya diorganisasi dengan baik? Apakah penulisannya tidak memperhatikan jargon seperti yang biasa digunakan? Apakah penulis telah membantu para pembaca dengan mudah menemukan pengaturan judul dan subjudul, adanya pendahuluan dan ikhtisar peralihan yang baik, tata urutan yang logis, dan sebagainya?

Dengan penyajian bab ini, kiranya pembaca dapat memperoleh pemahaman tentang prinsip dan teknik penulisan laporan sehingga apabila peneliti melaporkan hasil penelitiannya, pekerjaan itu akan dilakukan secara efektif dan efisien.

F. KERTAS DAN MARGIN KETIKAN

Paling tidak di dalam uraian Bambang Sunggono pada buku metodologi penelitiannya menguraikan beberapa laporan yang bersifat teknis yang harus dilakukan peneliti, di



antaranya:¹⁶⁹

1. Ukuran : Kuarto (28 x 21 cm);
2. Warna : putih;
3. Jenis : kertas HVS

Sementara itu, kriteria margin ketikan dari susunannya sebagai berikut:

1. Samping kiri dan atas: 4 (empat) cm.
2. Samping kanan dan bawah: 3 (tiga) cm.
3. Alinea baru dimulai pada ketukan keenam.
4. Judul bab menggunakan (semua) huruf kapital tanpa titik dari garis bawah.
5. Subbab diberi garis bawah untuk masing-masing kata, sedangkan untuk subbab cukup diberi titik saja.

BAB II

HUKUM PERKAWINAN

2.1 Hukum Perkawinan UU Nomor I/1974

2.1.1 syarat sah perkawinan

2.1.2 dan seterusnya

2.2 dan seterusnya

6. Penomoran subjudul diketik dengan susunan sebagai berikut:

1.1.....

1.1.1.....

1.1.2.....

Dan seterusnya

7. Hasil lembaran-lembaran tindasan (ketik maupun komputer) harus terbaca jelas.

¹⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 141-142.



8. Untuk kesalahan kata, kalimat, ragaan, tabel, grafik, dan sebagainya dibuatkan halaman ralat khusus atau tersendiri, dengan mencantumkan hal dari letak yang diralat.

G. PENOMORAN HALAMAN

Untuk penomoran halaman dibedakan nomor halaman sebagai berikut:

1. Penomoran halaman awal (sebelum bab pertama) ditulis dengan menggunakan huruf Romawi kecil, misalnya: i, ii, iii, iv, v, vi, dan seterusnya.
2. Penomoran halaman inti (bab pertama sampai dengan bab terakhir) ditulis dengan angka Arab, misal: 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
3. Penomoran tersebut pada poin a diletakkan di bagian bawah tengah, sedangkan poin b diletakkan di sudut kanan atas atau kanan bawah.
4. Penomoran tabel, grafik, dan sebagainya menggunakan nomor tersendiri.

H. SUMBER ACUAN DAN KUTIPAN

Sumber acuan atau rujukan dari kutipan ditulis langsung pada alinea yang sama, dan bukan diletakkan pada catatan kaki, sebagai berikut:¹⁷⁰

I. Dikutip Sesuai Aslinya

Dalam hal ini termasuk kutipan yang diterjemahkan sendiri oleh pengutip cantumkan:

- a. Nama penulis atau nama marga/keluarga penulis dengan tanpa mencantumkan gelar akademik, berikutnya

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 144.



beri tanda koma (,).

- b. Sebutkan tahun penerbitannya dan berikut beri tanda titik dua (:).
- c. Cantumkan halaman yang dikutip, contoh:

Dari buku yang ditulis sendiri:

... implementasi kebijaksanaan massa mengambang ternyata berakibat pada kemerosotan partisipasi politik masyarakat di tingkat bawah. (Bambang Sunggono, 1992: 108)

Atau dituliskan:

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijaksanaan massa mengambang berakibat pada ... dan seterusnya. (1992: 108)

Dari buku terjemahan:

Dalam memecahkan permasalahan, pada dasarnya terdapat dua langkah utama, yaitu:

- 1) Menentukan sasaran
 - 2) ... dan seterusnya.
- (Ordiorne, 1979: 75)

Pendapat seorang (ahli) dalam buku/tulisan yang lain:

Benjamin R. Beede mengemukakan satu asas, "*law effectively legitimates policy*," bahwa hukum merupakan sarana yang efektif untuk kebijaksanaan publik. (Bambang Sunggono, 1993: 102)

Dari majalah/jurnal:

- Menulis sendiri

Seorang wiraswasta selalu berorientasi kepada masa depan, di mana tantangan jangka panjang terhadap kesuksesan merupakan ... dan seterusnya. (Roepke, 1978)

Atau ditulis:

Seorang wiraswasta selalu berorientasi kepada masa depan.



Roepke (1978) mengemukakan bahwa ... dan seterusnya.

- Pendapat seorang yang dikutip oleh penulis lain
Mc. Delland (Killer dari Holland, 1971: 760)
Berpendapat bahwa “*achievement*” merupakan unsur penting ... dan seterusnya.

Dari surat kabar:

- Menulis sendiri
Bambang Sunggono (1990) menyatakan, bahwa telah terjadi pergeseran orientasi di kalangan angkatan muda Indonesia.

Atau ditulis:

Telah terjadi pergeseran orientasi di kalangan angkatan muda Indonesia. (Bambang Sunggono, 1990)

- Pendapat Sunggono dikutip oleh penulis lain
Menurut Sunggono, seorang pengamat hukum dari politik (*Jawa Pos*, Juni 1990: VII).

2. Tidak Dikutip Persis Hanya Pokok Pikirannya

Dalam hal ini cukup dicantumkan nama penulis atau nama marga/keluarganya dan tahun penerbitan. Adapun penomoran halaman yang dikutip tidak perlu dicantumkan, contoh:

- Peranan faktor sosial dalam pembangunan telah cukup lama mendapat perhatian para ahli ekonomi. (Hagen, 1981; Rostow, 1961; 1 Weber, 1930)
- Dengan tegas Sahetapy (1986) menyatakan pentingnya faktor “Sobural” ... dan seterusnya.
- Hukum, lingkungan; dan kependudukan sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang erat berkaitan satu sama lain. (Bambang Sunggono, 1994)

3. Kutipan Langsung



- a. kutipan langsung berupa uraian biasa langsung ditulis dalam dua spasi, sedang kutipan langsung yang jumlahnya maksimal lima halaman langsung ditulis dengan atau tanpa mencantumkan tanda petik (“), contoh:
Pembangunan politik erat berkaitan dengan partisipasi politik. Dalam hal ini implementasi kebijaksanaan mengambang ternyata berakibat dan seterusnya (Bambang Sunggono, 1992:108).
Atau ditulis,
Pembangunan politik erat berkaitan dengan partisipasi politik. Dalam hal ini Bambang Sunggono menyatakan, “implementasi kebijakan massa mengambang...” (1992: 108).
- b. Kutipan langsung yang jumlahnya lebih lima baris ditulis dalam satu spasi dan masuk pada ketukan keempat, contoh:

Logeman menyatakan:

“Di dalam buku ini, hukum tata negara Indonesia dikembangkan sebagai ajaran kompetensi. Artinya, seyogianya adanya penambahan mengenai pandangan-pandangan perihal tipe negara Indonesia. Bukankah hal itu hanya meninjau negara sebagai suatu organisasi dan belum memperhatikan cita-cita yang mendukungnya (1954: 16).”

Cara penulisan yang demikian itu juga berlaku dalam mengutip langsung bunyi suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Kutipan Bebas (Tidak Langsung)

Penulisan kitab ini tidak perlu ada tanda petik (“) dan/atau diketik rapat satu spasi. Kutipan bebas (tidak langsung) merupakan bagian dari kalimat biasa.



5. Catatan Kaki

Sebagaimana diuraikan di muka bahwa sumber rujukan dari kutipan tidak dicantumkan pada catatan kaki. Catatan kaki hanya digunakan sebagai tempat untuk menjelaskan hal-hal yang kurang sesuai dengan penempatannya apabila dicantumkan dalam uraian, atau dapat juga berisi suatu “penafsiran” bandingan pemikiran, atau tambahan informasi baru. Tentang catatan kaki ini berlaku hal-hal sebagai berikut:

- a. Diketik 1 (satu) spasi.
- b. Diberi nomor urut untuk setiap bab. Jadi, nomor catatan kaki di suatu bab bukan kelanjutan nomor catatan kaki bab sebelumnya.
- c. Di atas catatan kaki diberi garis pembatas sepanjang 20 ketukan.
- d. Diketik satu spasi, baris pertama masuk ketukan keenam, baris berikutnya dimulai dari margin kiri.
- e. Uraian dalam catatan kaki harus terletak pada halaman yang sama, dan tidak boleh dilanjutkan pada halaman berikutnya.
- f. Jarak antara catatan kaki satu dengan yang lain (berikutnya) adalah 11/2 spasi.

Contoh:

Dengan mendasarkan diri pada pengertian pada pengertian demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka “kedaulatan rakyat” menduduki porsi seperti yang dirumuskan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara.¹⁷¹

¹⁷¹ Isma'il Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm. 7, dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 148.



Dalam praktiknya, catatan kaki dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. *Op. cit.* singkatan *operete citato*, dipakai untuk mencatat catatan kaki terhadap pengarang/penulis yang sama, judul buku/tulisan yang sama, akan tetapi diantarai oleh pengarang/penulis yang lain. *Op. cit.* ini digunakan untuk halaman yang berbeda.

Contoh:

Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 100.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 24.

Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 102.

- b. *Loc. cit.* Singkatan *loco citato* digunakan sama dengan *Op. cit.* di atas, akan tetapi untuk halaman yang sama.

Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 100.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 24.

Abdurrahman, *Loc. cit.*

- c. *Ibid.* singkatan dari *ibidem*, digunakan untuk mencatat kaki pengarang/penulis dengan buku/ tulisan yang sama di atasnya. Dalam hal ini halaman dapat sama atau tidak.

Contoh:

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XX (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 34.

Ibid, atau

Ibid., hlm. 40



Sebagai catatan tambahan bagi *Op. cit.*, dan *Loc. cit.*, bagaimana apabila seseorang pengarang/penulis memiliki lebih dari satu buku/tulisan yang sama-sama dijadikan sebagai acuan atau rujukan? Terhadap hal ini, maka untuk catatan kaki berikutnya setelah nama pengarang/penulis, cantumkan terlebih dahulu buku/tulisannya tersebut.

Contoh:

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI-Press 1986), hlm. 34.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1973), hlm. 35.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: UI-Press 1988), hlm. 123.

Ibid.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, *Op.cit.*, h. 12.

Sutrisno Hadi, *Loc. cit.*

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, *Loc. cit.*

Di samping itu, seperti telah diuraikan di muka bahwa catatan kaki juga digunakan untuk suatu penafsiran, bandingan pemikiran, atau tambahan informasi baru.

Contoh:

... tidak aneh kalau dalam praktik terdapat berbagai sistem politik yang menunjang asas-asas demokrasi, namun dalam kenyataannya justru terdapat hal-hal yang bertentangan dengan asas atau prinsip demokrasi menurut ukuran umum.¹⁷²

... bahwa kekuasaan eksekutif dalam menyelenggarakan tu-

¹⁷² Bandingkan dengan Lyman Tower Sargent, *Ideology-ideology Politik Kontemporer*, terj. Sahat Simamora (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 120.



gasnya yang jauh lebih banyak dan intensif bila dibandingkan pada masa *Nachtwachtertaat*.¹⁷³

I. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka meliputi tulisan-tulisan yang dipublikasikan untuk digunakan sebagai acuan atau rujukan. Berikut ini diberikan contoh-contoh penulisan daftar pustaka:

1. Dari Buku

- a. Tuliskan nama pengarang/penulis (untuk pengarang/penulis (luar negeri mulai nama marga/keluarganya).
- b. Judul buku digarisbawahi (bila dalam ketikan komputer diganti cetak miring).
- c. Terhadap pengarang yang banyak, cantumkan nama pengarang pertama, sedangkan yang lain diganti “dan kawan-kawan” (dkk. atau *et. all.*).
- d. Bila pengarang tersebut merupakan editor, di belakangnya langsung diberi (ed.).
- e. Penerbit dan tahun penerbitan apabila tidak ada diganti (t.tp.); sedangkan kota penerbitan apabila tidak ada tidak perlu dicantumkan.
- f. Ketikan mulai dari margin kiri, baris selanjutnya mulai masuk pada ketukan keenam.
- g. Terhadap nama pengarang yang sama, berikutnya diganti dengan garis sepanjang delapan ketukan.
- h. Mulai dengan abjad paling awal, dan seterusnya diurut sesuai abjad.

¹⁷³ *Nachtwachtertaat* adalah negara penjaga malam, artinya negara yang hanya membenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas-batas yang sempit. Konsep ini muncul sekitar abad ... dan seterusnya.



- i. Apabila nama pengarang tidak ada, diganti dengan anonim.
- j. Diketik dalam satu spasi dan jarak antara daftar pustaka satu dari yang lain ialah 1 ½ spasi.

Contoh-contoh

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1983.

_____, *Masalah dari Prospek Perkembangan Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1984.

Anonym, *Himpunan Peraturan Hukum di Bidang Politik*, Surabaya: Sinar Jaya, 1987.

Anderson, benedict R.O.G. and Andrey Kahin (ed.), *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contrubtion to the Debate*, New York: Cornell University Press, 1982.

Dasim Mukhtar, dkk., *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jember: Gita Bahana, 1985.

Samsun, *Desa dari Kelurahan*, Malang: t.tp.

Wage Sunjoyo, *Asas-asas Kepemimpinan*, Penyebar Pengetahuan, t.th.

2) Dari Majalah atau Jurnal atau Surat Kabar

Secara umum tata cara dalam daftar pustaka dan buku tersebut juga berlaku di sini, dengan beberapa perbedaan, yaitu:

- a. Judul tulisan di bawah tanda petik (“).
- b. Nama majalah, jurnal, atau surat kabar digarisbawahi (apabila diketik komputer dicetak miring).
- c. Cantumkan saat penerbitan, misal tanggal, bulan, dan tahun.



Contoh-contoh:

Imam Munawir, “Bank Islam; latar belakang dari bentuk operasinya”, Iqra, Sen VI, Nomor 1.

F.G. Winarno, “Tempo Merupakan Warisan Gizi”, Kompas, 8 Februari 1981.

Philipus Mandin Hadjon, “Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi”, Yundika, Nomor 2, tahun VIII.

3. Kertas kerja (*Seminar, Simposium, Diskusi Panel dan Sebagainya*).

Sama dengan tata cara di atas, dengan perbedaan, yaitu kertas kerja atau makalah digaris bawahi, contoh:

Abdoel Gain, Peranan Ilmu Hukum dalam Pembangunan Indonesia”, *Kertas Kerja Symposium Peranan Ilmu Hukum dalam Pembangunan Indonesia*, Surabaya, 1984.

Bambang Sunggono, “Pembangunan Kualitas Manusia Melalui Hukum”, Makalah, seminar sehari tentang pembangunan kualitas SDM indonesia, lembaga pengkajian sosial dan pembangunan, Jember, 1991.



Lampiran

Contoh Proposal Penelitian Normatif dan Empiris

1. Contoh Proposal Penelitian Normatif

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari komunitas yang lebih luas. Setelah keluarga berhimpun dari berbagai keluarga terciptalah masyarakat. Akhirnya himpunan masyarakat itu pula menjelma menjadi suatu tatanan masyarakat yang lebih kompleks yang disebut dengan negara.

Namun yang perlu diingat adalah bahwa himpunan masyarakat mulai dari terkecil sampai pada yang besar tidak terlepas dari sepasang suami istri yang memadu kasih sehingga melahirkan keturunan. Begitu pentingnya peranan dua pasang insan ini dalam mengarung bahtera kehidupan mereka, maka perlulah agama memberikan arahan dan anjuran untuk menjalani hidup dengan sakinah dan rahmah di antara keduanya.

Hal ini dipertegas oleh ayat Al-Qur'an dalam surah *ar-Ruum* (30) ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu be-



*nar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*¹⁷⁴

Demikianlah idealnya suatu keluarga menurut konsep Islam yang mana antara suami dan istri terjalin rasa kasih sayang. Bahwa keluarga seperti demikian adalah idaman setiap orang di mana pun dia berada.

Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep Islam adalah adanya harta kekayaan yang merupakan perhiasan dunia, baik harta itu tergolong harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun kerja sama antara keduanya secara otomatis akan berjalan dengan baik. Tapi tidak sedikit pula bagi sebagian keluarga yang mengalami *disharmonis* atau tidak harmonis. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, salah satu di antaranya karena kelalaian mereka terhadap petunjuk Allah SWT, sehingga terjadilah pertengkaran, percekocokan, saling membenci, dan lain sebagainya.

Bahkan sering sekali perselisihan itu tidak bisa diatasi (*out of control*), peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada bubarnya perkawinan (*broken marriage*). Apabila pertengkaran itu sampai pada perpisahan, konsekuensi logis dari perpisahan atau perceraian itu akan menimbulkan berbagai persoalan pula mengenai hak dan kewajiban antara keduanya. Bagaimana hak asuh anak atau hak *hadhanah*, tanggung jawab suami selama masa iddah, dan tidak terkecuali persoalan harta bersama.

Dalam permasalahan penyelesaian harta bersama tidak terlepas dari peran pengadilan dalam menangani masalah ini. Dijadikannya pengadilan sebagai tempat untuk menye-

¹⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 644.



lesaikan persengketaan perdata manakala tingkat persoalan itu sudah tidak dapat lagi diselesaikan pada tingkat internal keluarga antara kedua belah pihak.

Berkenaan dengan sengketa harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab 8 yang berjudul “Putusnya Perkawinan serta Akibatnya” yang termuat dalam Pasal 38 hingga Pasal 41 dan juga pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 dalam Bab 5 (Tata Cara Perceraian) termuat dalam Pasal 14-36.¹⁷⁵

Apabila perceraian terjadi di antara kedua belah sebelum mempunyai anak dan harta pun belum didapat selama pernikahan, maka permasalahan tidak akan begitu sulit. Namun sebaliknya, jika anak dan harta sudah dimiliki ketika terjadinya perceraian, maka persoalannya akan panjang. Sebab seluruh yang terkait dalam pernikahan itu baik harta bersama, anak, dan lain sebagainya akan menjadi bagian yang tidak terlepas dari bagian perceraian itu.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengemukakan beberapa pasal yang berkenaan dengan permasalahan harta bersama ini sebagai suatu upaya melihat kasusnya dengan komprehensif.

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

¹⁷⁵ Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: t.p., 2001), hlm. 139-140.



Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Tentang harta bersama lebih perinci lagi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII dengan judul harta kekayaan dalam perkawinan pada Pasal 85-97.

Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa harta bersama itu adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan. Adapun harta yang dibawa masing-masing pihak sebelum menikah, maka itu tidak dikatakan sebagai harta bersama.

Dalam kajian fikih klasik khususnya dalam bidang muamalat harta bersama cenderung disamakan dengan *syirkah* atau harta yang diusahakan secara bersama oleh suami istri. Meskipun pada hakikatnya persamaan tidak terlalu tepat dalam pengkategorian. Hal itu disebabkan para ulama klasik belum mengenal dengan apa yang disebut pencarian bersama antara suami dan istri dalam tradisi masyarakat pada waktu itu. Karena pada umumnya perempuan hanya sebatas di rumah, sedangkan untuk masalah pencari penghidupan mutlak hanya bagi suami.

Kendatipun demikian, sebab konsep *syirkah* itu sendiri beragam dalam pelaksanaannya maka paling tidak dapatlah masalah harta bersama ini didekatkan dengan konsep syir-



kah. Dalam konsep *syirkah* ada yang disebut dengan *syirkah al-abdan*, yaitu modal dari suami kemudian istri mempunyai andil dalam hal jasa dan tenaganya. Kemudian yang lain, apa yang disebut dengan *syirkah 'inan*,¹⁷⁶ yaitu di mana kedua belah pihak suami dan istri masing-masing mendatangkan modal untuk dikelola secara bersama.

Realitas di tengah-tengah masyarakat kita kebanyakan yang terjadi adalah model *syirkah abdan*, artinya lebih banyak suami yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga sedangkan istri hanya mengatur sirkulasi perbelanjaan rumah tangga. Tentunya ketika terjadi perselisihan dan berujung pada perceraian, maka kaitannya dengan penyelesaian harta bersama merupakan menjadi persoalan yang cukup *intens*.

Dalam proses penyelesaian persengketaan dimaksud, lembaga peradilan cukup berperan dan di Indonesia institusi tertinggi dalam menyelesaikan perkara pencari keadilan termasuk dalam harta bersama adalah Mahkamah Agung. Hal itu dapat kita lihat dalam putusan Nomor 176/K/AG/ 1993 tanggal 23 Juni 1994 yang memutuskan istri serong dengan lelaki lain tetap mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang diperoleh pada masa dalam ikatan perkawinan. Dari sisi psikologis hal ini berimplikasi negatif baik bagi para pihak maupun pencari keadilan. Dari sisi keadilan suami atau istri merasa tidak adil terhadap pembagian harta bersama kepada istri atau suami yang berperangai amoral (berbuat serong), sehingga tidak pantas menerima $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama.

Berangkat dari latar belakang di atas tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menetapkan

¹⁷⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 201.



istri yang serong dengan lelaki lain tetap mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Maka penulis mengangkatnya dalam karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **“PENYELESAIAN HUKUM TENTANG HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN (Studi Terhadap Putusan MARI No. 176 K/AG/1993)”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang hendak dicari jawabannya dalam tesis ini adalah: Mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No. 176 K/AG/1993 telah memutuskan istri yang serong dengan laki-laki lain mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan?

Bagaimanakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian tidak lain adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah sebelumnya.

1. Untuk mengetahui mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No. 176 K/AG/1993 telah memutuskan istri yang serong dengan laki-laki lain mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam.



2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap pengertian dan memudahkan pemahaman tentang proposal ini perlu dijelaskan beberapa istilah sekaligus pengertian dari judul yang tertera di atas, di antaranya:

1. *Penyelesaian Hukum*

Kata penyelesain hukum terdiri dari dua kata, yaitu penyelesaian dan hukum. Penyelesaian menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah cara menyelesaikan hukum keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).¹⁷⁷ Dengan kata lain, hukum artinya suatu proses penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh hakim.

2. *Harta Bersama*

Menurut Abdul Manan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun secara bersama-sama.¹⁷⁸ Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi persoalan apakah istri atau suami yang membeli. Apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian, atau atas nama siapa itu didaftarkan.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1020.

¹⁷⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 157.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 158.



3. *Perceraian*

Perceraian adalah perihal bercerai antara suami istri yang dimaksud dengan perceraian dalam pembahasan ini ialah putusannya hubungan perkawinan baik karena kematian, perceraian maupun karena keputusan pengadilan.

F. Landasan Teoretis

Hukum mengenai harta bersama kurang mendapat perhatian yang saksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus mendapat perhatian yang serius. Mengingat persoalan harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila terjadi perceraian. Biasanya persoalan harta bersama ini muncul apabila sudah terjadi perceraian antara suami istri di Pengadilan Agama. Sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis formal, aturan-aturan tentang harta bersama sudah ditentukan dalam Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang. Namun dalam peradilan ketentuan tersebut tidaklah mudah dan sederhana sebagaimana bunyi pasal tersebut. Terdapat beberapa hal yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Perubahan yang begitu cepat dalam berbagai bidang seperti dalam bidang ekonomi misalnya, dengan adanya asuransi, pertanggungan, dan santunan-santunan lainnya. Yang kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap perolehan harta bersama sekaligus terhadap pembagiannya.

Permasalahan harta bersama ini pada hakikatnya telah diantisipasi oleh KHI dengan merumuskan dalam Pasal 85 s/d 97. Namun pada Pasal 96 (1) terlihat kurang tegas. Porsi



pembagian harta bersama sebelum dibagi waris dan penentuan separuh bagiannya dalam Pasal 96 (1) tersebut adalah langkah yang berani. Apabila diteliti, dasar metodologinya antara lain dapat ditempuh melalui jalan maslahat. Di mana kemaslahatannya tidak bertentangan dengan tujuan syariat.¹⁸⁰

Dengan jalan inilah menentukan persoalan harta bersama yang sebelum dibagi ahli waris, maka diberikan separuh terlebih dahulu sebagai hak suami atau istri bukan sebagai warisan. Kemudian setelah itu dibagi dengan cara pewarisan. Alasannya karena tidak tegas dalam *nash* masalah pembagian harta bersama. Praktik seperti ini pada dasarnya tidak bertentangan nilai-nilai dan tujuan syariat, bahkan dianggap baik. Sehingga suatu tradisi yang baik di tengah-tengah masyarakat akan dianggap baik juga, sebagaimana rumusan para ulama dalam kaidah *ushul fiqh* sebagai berikut:

العادة محكمة¹⁸¹

Kebiasaan itu dihukumkan.

Kaidah ini diberlakukan apabila pembagian harta bersama tidak terjadi sengketa atau menemukan jalan buntu. Tetapi jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam KHI Pasal 88 sebagai berikut:

“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama”.¹⁸²

¹⁸⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Maktabah al-Sa'wah al-Islamiyah, 1990), hlm. 84.

¹⁸¹ Ali Ahmad al-Nadwi, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damsyik: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 293.

¹⁸² Ditbinpera, *Himpunan Peraturan*, hlm. 339.



Kemudian apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti berjudi, mabuk, boros, dan lain sebagainya, maka suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 95 KHI.

Uraian Pasal 95 didianalogikan kepada ketentuan Rasulullah SAW yang membolehkan Hindun mengambil harta suaminya dengan cara yang makruf. Sementara Pasal 95 menekankan bahwa suami justru melakukan tindakan pemborosan yang dapat membahayakan keberadaan harta bersama itu. Oleh sebab itu, hakim dipandang memiliki otoritas untuk menangani dan menjaga agar harta tersebut diamankan demi kepentingan keluarga (khususnya istri dan anak-anak) dengan cara meletakkan sita jaminan sekaligus juga melindungi kepentingan rumah tangga. Dalam praktik yang banyak dilakukan dalam pembagian harta bersama adalah masing-masing (suami dan istri) berhak seperdua dari harta bersama tersebut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah surah *an-Nisaa'* (4) ayat 32:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٣٢

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian orang lain. (Karena) agar orang laki-laki ada sebagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*¹⁸³

¹⁸³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 122.



Namun masih bisa dikembangkan lagi dengan jalan masalah apabila istri tertua dalam poligami dan dalam persoalan asuransi, pertanggungan dan bentuk-bentuk santunan lainnya. Terlepas dari perbedaan para ulama tentang eksistensi *masalahat al-murasalah* sebagai metode istinbat dalam hukum Islam. Tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa kontribusinya terhadap pengembangan hukum Islam sangat besar.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai penyelesaian tentang harta bersama karena perceraian sering sekali kurang mendapat perhatian yang saksama dari para ahli dan praktisi hukum.¹⁸⁴ Oleh karena itu, penulis berpendapat tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/K/AG/1993 cukup penting dan menarik untuk dikaji. Adapun kajian terdahulu yang pembahasannya erat kaitannya dengan judul tesis penulis ini antara lain:

- 1) Tesis H. Arso dengan judul “*Penerapan Hukum Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Rasa Keadilan di Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara*”. Yang mana tesis ini menguraikan penerapan hukum harta bersama dan pengaruhnya terhadap pemenuhan rasa keadilan. Kompilasi Hukum Islam dijadikan hukum terapan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan sengketa atau perkara-perkara harta bersama akibat perceraian. Materi Kompilasi Hukum Islam adalah penyelesaian kasus harta bersama di Pengadilan Agama telah memenuhi rasa keadilan.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah*, hlm. 152.

¹⁸⁵ H. Arso, *Penerapan Hukum Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Rasa Keadilan di Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara*, (tesis PPS IAIN Sumatera Utara, 2001), hlm. VIII-IX.



- 2) Tesis Muhammad Iqbal Irham yang berjudul “*Kedudukan Wanita tentang Harta Benda Hukum Perkawinan Indonesia*”¹⁸⁶

Tesis ini menguraikan tentang kedudukan wanita dalam harta benda hukum perkawinan Indonesia. Dalam tesis ini, bagaimana sebenarnya perempuan punya hak yang sama dalam kepemilikannya terhadap harta ditinjau dari undang-undang dan juga hukum Islam.

Dari dua penelitian di atas terlihat belum ada yang membahas tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/K/AG/1993 yang memutuskan istri yang serong dengan laki-laki lain mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama.

H. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang akan digunakan pada kesempatan ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sehubungan dengan hal itu, maka langkah-langkah yang akan ditempuh pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka yang akan menjadi sumber pengumpulan data ialah:

a) Sumber Data Primer

Adapun yang menjadi sumber primer pada penelitian ini adalah kitab-kitab karangan Putusan Mahkamah Agung No. 176/AG/1993.

b) Sumber Data Sekunder

Adapun sumber sekunder yang akan digunakan adalah

¹⁸⁶ M. Iqbal Irham, *Kedudukan Wanita tentang Harta Benda dalam Hukum Perkawinan Indonesia* (tesis PPS IAIN Sumatera Utara, 2001), hlm. 22.



kitab-kitab yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti.

2. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

Untuk mengolah dan menganalisis data yang nanti akan terkumpul penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

- Metode komparatif adalah cara untuk membandingkan dua pendapat yang bertentangan.
- Metode *content analisis* adalah metode yang berusaha memahami alur pemikiran tokoh-tokoh mazhab dan merekonstruksi kerangka pemikiran yang akan diteliti.

3. *Metodologi Penulisan*

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fak. Syari'ah IAIN, SU, Tahun 2004.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan tesis ini sehingga sistematis dalam materi bahasannya, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, landasan teoretis, dan terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, terdiri dari tinjauan umum tentang harta bersama, pengertian harta bersama, konstruksi hukum dan ruang lingkup harta bersama, harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab III, terdiri dari tinjauan teoretis tentang perceraian, mengenai pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, prosedur pengajuan perceraian di Pengadilan Agama.



Bab IV, terdiri dari analisis tentang putusan Mahkamah Agung, penyelesaian kasus harta bersama di Pengadilan Agama, konsep harta bersama menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam, harta bersama menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/K/AG/1993.

Bab V, terdiri dari penutup berupa kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

- Arso, H., *Penerapan Hukum Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Rasa Keadilan di Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara*, tesis PPS IAIN Sumatera Utara, 2001.
- A Weng, Henry Lee, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan: Rinbaw, t.th.
- Azhar Basyar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: tp, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: t.p., 2002.
- Effendi, Satria, *Analisis Fikih*, dalam Ditbenpera, *Tinjauan*



Fiqh Islam Terhadap Putusan Badan Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian.

- Harahap, M. Yahya, S.H., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, hlm. 229.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading Co. Medan, 1975.
- Harahap, M. Yahya, *Perlawanan Terhadap Eksekusi, Grose Akta Serta Putusan Pengadilan, Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Irham, M. Iqbal, *Kedudukan Wanita tentang Harta Benda dalam Hukum Perkawinan Indonesia*, Tesis PPS IAIN Sumatera Utara, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Sa'wah al-Islamiyah, 1990.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul dan Fauzan, M, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet IV, Jakarta: Raja-Grafindo Persada, 2001.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damsyik: Dar al-Qalam, 1994.



2. Contoh Proposal Penelitian Empiris

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan zakat yang baik, profesional, dan efektif bagi seorang *muzakki* (wajib zakat) tentu akan berdampak positif bagi *asnaf* (penerima zakat) yang ada dalam suatu negeri. Sebagai *muzakki*, ia tidak hanya sekadar menunaikan kewajibannya tetapi juga akan merasakan manfaat bagi dirinya dan hartanya dapat dirasakan oleh Islam, karena zakat merupakan penyanggah peradaban Islam. Al-Thahir menjelaskan, sejarah telah mencatat bahwa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana ketika itu tidak ditemukan lagi para penerima zakat, sehingga zakat yang ada, ia gunakan untuk memerdekakan budak, di mana budak ketika itu masih ada. Begitu juga pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a., di mana Mu'az bin Jabal ketika menjabat sebagai Gubernur di negeri Yaman, ia mengirimkan sepertiga sisa zakat yang ada di Yaman ke Baitul Mal, Madinah. Pada tahun berikutnya setengah dari sisa zakat dan pada tahun berikutnya ia mengirim seluruh zakat yang ada di Yaman ke Baitul Mal.¹⁸⁷ Ini menunjukkan bahwa tujuan zakat itu telah tepat pada sasarannya.

Itu dahulu, di mana kalau ada saja seorang yang wajib zakat tidak menyisihkan zakatnya, maka khalifah langsung mengomandoi untuk memerangnya. Hal ini sebagaimana yang telah diawali oleh Khalifah Abu Bakar Siddik r.a. di mana ia mengomandoi memerangi mereka yang enggan ber-

¹⁸⁷ Abdullah al-Thahir, Signifikansi Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat, dalam Jurnal al-'Ibrah, Volume 1, Nomor 1, 2003, hlm. 60.



zakat.¹⁸⁸ Sekarang ini dalam konteks Indonesia misalnya, mereka para *muzakki* memberikan zakatnya di antara sebabnya adalah karena kesadaran sendiri atau karena dibujuk-bujuk dan lain-lain. Pernyataan ini sebagaimana dikatakan oleh teman penulis Agussalam yang juga relawan BAZDA Sumatera Utara sebagaimana ungkapannya “Sangat sulit sekali mendapatkan *muzakki* baru di Kota Medan, padahal masih banyak orang yang kaya.”¹⁸⁹ Bisa jadi hal di atas terjadi karena tidak adanya sangsi pidana bagi mereka yang enggan berzakat. Jadi, orang berzakat hanya karena untuk kesalehan semata atau berzakat setelah terkontaminasi dengan sifat riya bukan karena keikhlasan semata.

Kota Parapat merupakan kota parawisata yang terletak di Sumatera Utara. Mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan dan Katolik, Islam merupakan penduduk minoritas. Adapun latar belakang keberadaan mereka secara umum adalah pendatang yang terdiri dari berbagai etnis; Jawa, Batak Mandailing, Padang, dan lain-lain. Profesi mereka di antaranya: Karyawan Hotel, Pedagang, Pengusaha Restoran, Penjual Souvenir, Pedagang Kaki lima, dan Tukang.¹⁹⁰

Aktivitas penyaluran zakat akan terlihat sekali pada akhir-akhir bulan Ramadhan, dalam rangka penyaluran zakat fitrah, fidyah dan ada juga yang menyalurkan zakat harta. Aktivitas yang sama tidak akan dijumpai lagi di luar bulan Ramadhan. Mereka berzakat harta dapat dikategorikan orang-orang yang kesadaran keislamannya sudah tumbuh, dan itu hanya sebagian kecil. Kuat dugaan mereka menyalurkan za-

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ Wawancara pada 20 Desember 2007 di rumah saudara Agussalam.

¹⁹⁰ Pemaparan di atas adalah observasi penulis pra-penelitian.



kat mereka hanya dikarenakan adanya *even* akhir Ramadhan tersebut. Yang menarik dari kasus Parapat ini yaitu: *Pertama*, tidak adanya peminta-minta di jalanan. Peminta-minta musiman dari luar kota hanya dapat ditemukan ketika hari besar, di mana banyak pengunjung berdarma wisata ke kota tersebut. *Kedua*, para penerima zakat (*asnaf*) secara umum tidak terdapat perubahan dari tahun ke tahun, walaupun ada perubahan tidak terlihat secara substansi tetapi berubah dalam arti penambahan *asnaf* di mana akan dijumpai *asnaf* baru, yaitu para *muallaf* (orang yang baru masuk Islam).

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih jauh dan menyuguhkannya dalam bentuk Tesis yang berjudul “Pengelolaan Zakat Profesi Masyarakat Islam Parapat.”

B. Identifikasi Masalah

Di antara masalah yang teridentifikasi pada masalah zakat profesi masyarakat Islam Parapat, yaitu:

1. Pengelolaan zakat profesi para *muzakki*.
2. Penghalang-penghalang yang menyebabkan para *muza-kki* tidak berzakat.
3. Produktivitas para *asnaf* dalam menggunakan zakat yang diterima.
4. Efektivitas penyaluran zakat profesi.
5. Penyebab ketidakefektifan penyaluran zakat.

C. Batasan Masalah

Dari masalah yang teridentifikasi di atas, penelitian ini akan dibatasi hanya pada:

1. Pengelolaan zakat profesi para *muzakki* masyarakat Islam Parapat.



2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat *muzakki* masyarakat Islam Parapat dalam pengelolaan zakat profesi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi para *muzakki* masyarakat Islam Parapat?
2. Faktor apa saja yang menghambat *muzakki* masyarakat Islam Parapat dalam mengelola zakat profesinya?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana:

1. Pengelolaan zakat profesi para *muzakki* masyarakat Islam Parapat.
2. Faktor Apa saja yang menghambat *muzakki* masyarakat Islam Parapat dalam mengelola zakat profesinya.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadi bahan masukan dan pengembangan bagi institusi zakat yang ada, terlebih khusus bagi masyarakat Islam Parapat.

G. Penegasan Istilah

Pengelolaan: berasal dari kata kelola, kata kerjanya mengelola, menyelenggarakan, mengurus.¹⁹¹ Pengelolaan di sini dimaksudkan adalah bagaimana cara *muzakki* masyarakat Islam Parapat mengurus zakat profesi mereka. Zakat: secara etimologi suci, bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang.¹⁹² Namun yang dimaksud di sini adalah zakat dalam arti termi-

¹⁹¹ Suharto & Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, (Surabaya: Indah, 1996), hlm. 132.

¹⁹² Jamaluddin Muhammad ibn Muharram ibn Manzur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Juz xv, (Bairut: Dar al-fikri, 1956), hlm. 358.



nologi yaitu penyerahan harta tertentu kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu.¹⁹³

Profesi: Pekerjaan yang daripadanya didapat nafkah hidup atau pekerjaan yang dikuasai karena pendidikan dan keahlian.¹⁹⁴

Muzakki: Mereka yang wajib berzakat.

H. Kajian Terdahulu

1. Zulkarnain Tje'mat disampaikan pada seminar Nasional pengelolaan ZIS Perusahaan di Hotel Hasanah Regency pada tanggal 25 Oktober 1997 Bandung tentang bagaimana Pengelolaan ZIS PT Pupuk Kujang. Hasil studi tersebut menjelaskan bahwa jumlah karyawan Muslim memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan dengan *muzakki* 36 persen, oleh karena itu ia menyimpulkan dengan promosi yang baik diharapkan jumlah *muzakki* dapat meningkat. Dari Hasil di lapangan beberapa alasan yang diungkapkan mengapa mereka belum menjadi *muzakki* antara lain karyawan dan karyawan masih ingin secara langsung membayar zakatnya dikampung halamannya. Alasan kedua masih ada keraguan mengenai dasar hukum pelaksanaan zakat profesi.¹⁹⁵
2. Penelitian Muhammad Darudin sebagaimana terdapat pada Jurnal Penelitian Hukum Edisi VIII Januari 1999 terbitan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Pendaan Gunaan Zakat di Kotamadya Beng-

¹⁹³ Abdurrahman al-Jiri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijarah al-Kubro, t.th.), hlm. 590.

¹⁹⁴ J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 1090.

¹⁹⁵ Zulkarnain Tje'mat, "Pengelolaan ZIS PT Pupuk Kujang," *Hasil Penelitian Mandiri*, Bandung 1992.



kulu dengan pendekatan normatif empiris, melalui analisis deskriptif kuantitatif disimpulkan bahwa kesadaran *muzakki* untuk membayar zakat secara kolektif masih sangat rendah. Akibatnya dana zakat tidak dapat terkumpul secara optimal, sehingga tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan. Di samping itu, BAZIS Provinsi Bengkulu belum berhasil menggalang terkumpulnya dana zakat dari *muzakki* secara optimal sehingga pemasukan setiap tahunnya relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi masyarakat dengan potensi zakat yang tersedia di masyarakat.¹⁹⁶

3. Muhammad Taufiq, Tesisnya di IAIN Sumatera Utara pada tahun 2003 dengan *Judul Zakat Profesi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Kajian ini terfokus pada pandangan komisi fatwa MUI Sumatera Utara mengenai zakat profesi. Dari hasil penelitiannya ada dua pendapat: *Pertama*, berpendapat bahwa zakat profesi tidak wajib. Pendapat ini dianut oleh sebagian kecil anggota komisi fatwa. Alasannya, zakat adalah ibadah dan harus *ittiba'* harus ada *nash* yang tegas. Zakat profesi tidak bisa di-*qiyas*-kan dengan salah satu *amwal* (harta) zakat yang wajib dilaksanakan. Pendapat *kedua*, zakat profesi wajib, pendapat ini merupakan pendapat mayoritas anggota MUI, mayoritas berpendapat profesi apa saja (yang diperbolehkan syariat) wajib mengeluarkan zakatnya asal sesuai dengan syarat atau ketentuan memenuhi hisab dan haul; kewajiban di sini terbagi kepada dua bagian: *Pertama*, mayoritas wajib, tetapi dalam tataran wajib bagi diri

¹⁹⁶ Muhammad Darudin, "Pendayagunaan Zakat di Kodya Bengkulu," Jurnal Penelitian Hukum, Edisi VIII, UMB Bengkulu, 1999.



sendiri. Artinya mereka mewajibkan bagi diri mereka sendiri. *Kedua*, sebagian kecil mewajibkan zakat profesi bagi kaum muslimin.¹⁹⁷

Adapun penelitian ini ditujukan untuk meneliti daerah yang minoritas penduduk Muslim dengan alasan bahwa bisa dikatakan tidak dijumpai kemiskinan yang riil di lapangan, karena sebagian besar penduduk mempunyai profesi atau pekerjaan tersendiri.

I. Hipotesis

Berdasarkan pengamatan pra-penelitian yang diperoleh dapat diajukan hipotesis terlebih dahulu, yaitu: para *muzakki* belum mempunyai format tertentu dalam mengelola zakat mereka, walaupun ada mereka memberikan zakat mereka kepada famili mereka di kampung halaman atau tidak berzakat sama sekali, hal ini disebabkan oleh minimnya keilmuan dan kesadaran mereka mengenai kewajiban zakat.

J. Metode Penelitian

1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam studi kasus (*Study Case*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya ia tidak dapat digeneralisasi.

Subjek penelitian ini ialah para *muzakki*, para *amil* zakat, alim ulama, dan tokoh masyarakat. Karena semenjak proposal ini ditulis belum diperoleh data-data para *muzakki*, maka para *muzakki* akan ditelusuri dengan kategori; mereka yang setelah didekati telah memenuhi syarat sebagai pewajib zakat. Dan juga populasi yang ada di sekitar lokasi diperkirakan

¹⁹⁷ ...????



kan tidak begitu banyak karena tidak begitu luasnya cakupan wilayah penelitian.

2. *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan.

3. *Teknik Pengumpulan Data*

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini: (1) data primer, (2) data skunder. Data primer berasal dari lokasi penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*).

Adapun data sekunder akan ditelusuri dari buku-buku primer yang dianggap representatif terhadap topik bahasan, didukung juga buku-buku skunder dan tertier sebagai pelengkap dari buku-buku primer yang ada.

4. *Uji Kesahihan Data*

Uji kesahihan data dilakukan sesuai dengan yang diajukan Miles dan Huberman,¹⁹⁸ antara lain memeriksa kerepresentatifan data; memeriksa pengaruh peneliti, melakukan triangulasi, memberi bobot pada bukti, membuat pertentangan/perbandingan, menghilangkan hubungan palsu, mencari penjelasan tandingan, memberi bukti yang negatif dan mendapatkan umpan balik dari informan.

5. *Teknik Analisis Data*

Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yaitu reduksi data dan penarikan ke-

¹⁹⁸ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohandi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992)



simpulan. Analisis data merujuk pada analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.¹⁹⁹

K. Sistematika Penelitian

Bab I, Pendahuluan: (a) Latar Belakang Masalah. (b). Identifikasi Masalah. (c) Batasan Masalah. (d) Rumusan Masalah. (e) Tujuan Penelitian (f) Kegunaan Penelitian. (g) Penegasan Istilah. (h) Kajian Terdahulu. (i) Hipotesis. (j) Metode Penelitian. (k) Sistematika Penelitian.

Bab II, Gambaran Umum Lokasi Penelitian: (a) Letak Geografi. (b) Kondisi Demografis. (c) Sejarah kedatangan muslim Parapat. (d) Kehidupan Sosial dan Ekonomi. (e) Kehidupan beragama masyarakat.

Bab III, Zakat Profesi dan Aspeknya: (a) Pengertian (b) Hukum Zakat Profesi. (c) Jenis-jenis Zakat Profesi. (d) Kadar Kewajiban Zakat Profesi. (e) Metode Pengelolaan Zakat Profesi.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan: (a) Pengelolaan *Muzakki* Terhadap Zakat Profesi pada Masyarakat Muslim Parapat. (b) Faktor-faktor Penyebab yang Menghambat *Muzakki* Masyarakat Muslim Parapat dalam Mengelola Zakat Profesinya.

Bab V, Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

Daftar Pustaka

Badudu, J.S. dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

¹⁹⁹ *Ibid.*



- Darudin, Muhammad, "Pendayagunaan Zakat di Kodya Bengkulu," *Jurnal Penelitian Hukum*, Edisi VIII, UMB Bengkulu, 1999.
- Ibn Manzur, Jamaluddin Muhammad ibn Muharram al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Juz xv ,Bairut: Dar al-fikri, 1956.
- Iryanto, Tata & Suharto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, Surabaya: Indah, 1996.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* ,Mesir: Maktabah Tijariah al-Kubro, t.th.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohandi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Al-Thahir, Abdullah, "Signifikansi Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat," *Jurnal al-'Ibrah*, Volume 1, Nomor 1, 2003.
- Tje'mat, Zulkarnain, "Pengelolaan ZIS PT Pupuk Kujang," *Hasil Penelitian Mandiri*, Bandung, 1992.



3. Contoh Proposal Penelitian Tokoh

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qiyas adalah salah satu bentuk ijtihad yang diakui oleh mayoritas ulama *ushul fiqh* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Metode ini berupaya menetapkan suatu hukum dengan cara menyamakan suatu kasus yang tidak ada *nash*-nya dengan sesuatu yang telah jelas *nash* dan hukumnya. Berdasarkan adanya kesamaan ilat²⁰⁰ yang diyakini menjadi penghubung hukum dalam menciptakan masalah yang dikehendaki.

Pada prinsipnya ada empat unsur yang harus wujud dalam *qiyas*, yakni adanya *ashal*, cabang, hukum *ashal*, dan ilat. Dari keempat unsur ini, yang selalu menjadi kajian yang urgen adalah eksistensi ilat. Ada atau tidaknya hukum dalam *nash*, tergantung pada keberadaan ilat tersebut. Hal ini dikarenakan ilat merupakan asas *qiyas* yang harus dimiliki secara metodologi. Ilat ini pulalah yang menyebabkan ulama *ushul* berbeda pendapat mengenai penerapan *qiyas* dalam menetapkan hukum *syara'*. Sehingga muncul metode atau cara yang dikemukakan oleh para ulama untuk menemukan ilat tersebut terhadap kasus dalam penetapan hukum yang diistinbatkan. Kemudian dikenal dalam *ushul fiqh* dengan *masalik al-illat*.²⁰¹

²⁰⁰ Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1398), hlm. 52.

²⁰¹ Wahbah az-Zuhaili. *Ulul al-Fiqh al-Islam*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th.), hlm. 661.



Namun sebagai metode penetapan hukum, *qiyas* menjadi khilafiyah yang aktual untuk dipersoalkan, tidak hanya menyangkut tentang kehujjahan *qiyas* itu sendiri, juga syarat penggunaan *qiyas* dalam hukum *syara'*. Apakah *qiyas* boleh menetapkan seluruh bidang hukum *syara'* atau hanya untuk sebagian hukum tertentu saja. Khusus tentang penggunaan *qiyas* dalam menetapkan hudud yang diyakini oleh sebagian ulama merupakan sesuatu yang bersifat *ta'abbudi*.²⁰² Tentu menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji dalam skripsi ini.

Secara umum, para *ushuliyun* memperselisihkan kelebaran memakai *qiyas* untuk semua bidang hukum *syara'*. Sebagian ada yang membolehkan dengan alasan bahwa semua bidang hukum *syara'* itu merupakan satu kesatuan, yang jika terhadap salah satunya boleh ditetapkan dengan *qiyas* maka terhadap yang lainnya juga bisa ditetapkan dengan *qiyas* pula.

Adapun menurut *ushuliyun* yang lain, *qiyas* tidak dapat menetapkan semua bidang hukum *syara'*. Sebab meskipun satu kesatuan, namun sebenarnya terdapat perbedaan karakter antara satu dengan yang lainnya. Apa yang terdapat pada yang satunya belum tentu dapat diterapkan pada yang lainnya. Karena boleh jadi masing-masing memiliki ciri khas tersendiri.²⁰³

Namun yang dikehendaki dari pembahasan ini adalah menetapkan hudud terhadap suatu perkara atau kasus yang tidak dijumpai *nash*-nya, bukan terhadap sesuatu kasus yang

²⁰² *Ta'abbudi* yaitu sesuatu yang tidak dimengerti maknanya atau sesuatu yang tidak dapat dijangkau akal hikmah dan maslahatnya secara khusus. Lihat As-Syatibi, *Muwafaqat fi ulul al-Fiqh*, Juz II, (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro), hlm. 318. Juga Lihat lebih lanjut DR. H. Fathurrahman Djamil, M.A. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 52.

²⁰³ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 33.



telah jelas *nash*-nya. Hal ini perlu dibatasi untuk lebih mempermudah penelaahan dan tidak menimbulkan kerancuan dalam pembahasan berikutnya.

Menurut Imam al-Baidawi²⁰⁴ *qiyas* boleh digunakan untuk menetapkan hudud berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan beliau sebagai berikut:

القياس يجري في الشرعيات حتى الحدود والكفارات لعموم
الدلائل²⁰⁵

Qiyas itu boleh diterapkan pada seluruh bidang hukum syara' termasuk hudud dan kaffarat karena keumuman dalil.

Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama yang menyatakan *qiyas* boleh saja digunakan untuk seluruh bidang hukum *syara'* termasuk penetapan hudud selama memenuhi kriteria syarat yang berlaku.²⁰⁶ Mereka yang berpendapat demikian termasuk ulama *syafi'iyah* dan *hanabilah*.

²⁰⁴ Imam al-Baidawi adalah seorang mufasir terkemuka, nama lengkapnya adalah al-Imam Abdullah Ibn Umar Muhammad al-Baidawi. Ia lahir di Desa Baido daerah Persia anak dari seorang hakim agung di bawah Atabeg (gelar pejabat militer Bani Saljuk).

Al-Baidawi banyak menghasilkan karya dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan termasuk tafsir Al-Qur'an yaitu *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, karya ini berdasarkan kitab *al-Kasasyaf az-Zamakhshari*. Beliau juga banyak menulis dalam bidang teologi, bahasa, fikih dan Ushul dan salah satu dari karya beliau dalam Ushul adalah *Minhaj al-Wushul Ilal 'Ilmi al-Ushul*, Beliau meninggal pada tahun 685 H/1282 M. Lihat Departemen Agama, Ensiklopedi Islam, Cet. VI, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Houve, 1999), hlm. 220. Lihat juga lebih lanjut an-Nawawi, *Mukhtar Thabaqat al-Fuqaha*, Cet. I, (Beirut: Muassasah al-Kitab al-Tsaqafah, t.th.), hlm. 149-150.

²⁰⁵ Imam Baidawi, *Minhaj al-Wushul Ilal 'Ilmi al-Ushul*, dalam Ali Abdul Khafis as-Subki Dan Tajuddin as-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj 'Ala Minhaj al-Wushul Ilal 'Ilmi al-Ushul*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 29. Lihat juga Isnawi, *Nihayah al-Sul fi Syarh al-Minhaj 'ala Minhaj al-Wushul Ilal 'Ilmi al-Ushul*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 229.

²⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz I, hlm. 706.



Adapun menurut pendapat imam as-Sarakhsi²⁰⁷ *qiyas* tidak boleh dipakai untuk menetapkan hudud. Penolakan tersebut jelas dinyatakannya:

جوزنا اثبات الحدود والكفارات بدلالة النص وان كنا لانجوز
بالقياس²⁰⁸

"Kami hanya menetapkan hudud dan kifarat dengan menggunakan dalil nash dan tidak membolehkannya dengan qiyas."

Pendapat as-Sarakhsi ini didukung oleh ulama hanafiyah yang menolak pemakaian *qiyas* dalam menetapkan hudud.²⁰⁹ Bagi mereka, *qiyas* dalam hal ini sama saja dengan menetapkan hukum terhadap kasus-kasus yang bersifat akidah dan ibadah.

Keurgensian kajian ini bersifat teoretis dan metodologis, yaitu hudud sebagai salah satu hukuman yang ada dalam Islam, pada umumnya dipahami dengan ketentuan hukum yang sudah jelas dan pasti baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Sehingga tidak ada lagi wewenang manusia (*mujtahid*) untuk merekayasanya. Tetapi hudud ternyata masih bisa didekati penetapan hukumannya dengan jalan *qiyas* yang tentunya adalah rekayasa *mujtahid*.

Sehingga adanya kasus-kasus baru yang termasuk dalam

²⁰⁷ Imam as-Sarakhsi nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad Syams ad-Din as-Sarakhsi. Beliau adalah seorang yang ahli dalam bidang kalam dan *Ushul fiqh*. Sebagai seorang yang bermazhab Hanafi banyak karyanya yang mengonsumsi sekaligus mengomentari pemikiran pendahulunya dalam karya-karya monumentalnya. As-Sarakhsi banyak mensyarahkan kitab-kitab hanafi di antaranya, al-Ziyadat, al-Mab-sut, dan lain-lain. Dan, beliau wafat pada tahun 490 H. Lihat Abdul Wafa'at Afgani, dalam Abu Bakar Muhammad Syams ad-Din as-Sarakhsi, Juz I, *Ushul as-Sarakhsi*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1973), hlm. 4-7.

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 242.

²⁰⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz I, hlm. 706. Lihat juga Ibn Amir al-Haj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 229-230.



kategori hudud dan tidak didapati pula *nash*-nya tentu dapat didekati dengan jalan *qiyas* seperti penetapan hukuman bagi *nabb±sy* (pencuri kain kafan) sekaligus menunjukkan bahwa Islam itu relevan dengan segala situasi dan kondisi.

Dari uraian di atas dan keurgensiannya dalam menyahuti perkembangan hukum *syara'* maka penulis mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul “PENERAPAN QIYAS DALAM MENETAPKAN HUDUD” (Studi Komparatif antara Pendapat Imam al-Baidawi dan Imam as-Sarakhsi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yang perlu dikaji lebih jauh, yakni:

- 1) Bagaimana pendapat imam al-Baidawi dan dalil-dalilnya tentang penggunaan *qiyas* dalam menetapkan hudud.
- 2) Bagaimana pendapat imam as-Sarakhsi dan dalil-dalilnya tentang penggunaan *qiyas* dalam menetapkan hudud.
- 3) Meneliti dan memilih mana pendapat yang *rajah*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari pembahasan skripsi ini yaitu untuk menjawab secara global apa yang diinginkan dari rumusan masalah, yakni:

- 1) Untuk mengetahui pendapat imam al-Baidawi dan dalil-dalilnya tentang penggunaan *qiyas* dalam menetapkan hudud.
- 2) Untuk mengetahui pendapat imam as-Sarakhsi dan dalil-dalilnya tentang penggunaan *qiyas* dalam menetapkan hudud.
- 3) Untuk meneliti dan memilih mana pendapat yang *rajah*.



Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yakni:

- a) Secara teoretis memberikan sumbangan kepada khazanah perbendaharaan keilmuan dalam hukum *syara*'.
- b) Secara praktis memberikan kontribusi terhadap para sarjana hukum *syara*' dalam hal pengistinbatan hukum *syara*'.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah bahwa ulama *ushul* berbeda pendapat tentang penggunaan atau pemakaian *qiyas* dalam menetapkan hudud. Perbedaan tersebut terjadi berdasarkan adanya pendapat yang menyatakan bahwa hudud merupakan bagian yang termasuk kepada hal yang bersifat *ta'abbudi* atau merupakan sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia mengenai hikmah dan ilatnya. Sehingga menurut sebagian ulama *ushul qiyas* tidak boleh dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hudud terhadap suatu kasus yang tidak dijumpai *nash*-nya.

Adapun pendapat imam al-Baidawi, yang membolehkan *qiyas* dipakai untuk menetapkan hudud mengemukakan alasan berdasarkan adanya petunjuk *nash* yang berlaku secara umum. Sehingga menjadi dalil bagi ke-*hujjah*-an *qiyas* secara umum tanpa dibatasi oleh apa pun. Selama tak ada dalil yang jelas untuk melarangnya dari hal yang demikian.

Adapun pendapat imam as-Sarakhsi tentang pemakaian *qiyas* dalam menetapkan hudud tidak lain karena anggapan beliau yang mengatakan bahwa hudud adalah bagian dari permasalahan *ta'abbudi* yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Oleh karenanya, imam as-Sarakhsi tidak membolehkan penetapan hudud dengan *qiyas*, akan tetapi hanya



boleh ditetapkan berdasarkan petunjuk *nash*. Secara konkret dengan menggunakan *istidlal nash*. Dengan kata lain mereka hanya membolehkan penetapan hudud sepanjang berpijak kepada *nash* syariat secara teks, baik yang umum maupun yang khusus atau pula berpijak kepada pemahaman *nash* (secara konteks) baik isyarat maupun yang lainnya.

E. Hipotesis

Dari kedua pendapat imam al-Baidawi dan as-Sarakhsi tentang kebolehan penggunaan *qiyas* dalam penetapan *qiyas*, penulis lebih memilih kepada imam al-Baidawi karena melihat kuat dalil-dalil yang digunakan dan lebih maju dalam metologi *qiyas*-nya dan memberikan adanya peluang berijtihad yang lebih terbuka dalam menyahuti perkembangan hukum *syara'*. Selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis serta tidak menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan.

F. Metodologi Penelitian

Adapun langkah-langkah praktis yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, pada dasarnya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasi menjadi beberapa metode sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini penulis kelompokkan menjadi dua sumber yang saling berkaitan, yaitu sumber primer dan sekunder.

Adapun sumber primer yang dimaksud dengan cara meneliti kitab imam al-Baidawi, *Al-Minhaj 'ala Minhaj al-Wushul 'ila 'Ilmi al-Ushul*. Adapun imam as-Sarakhsi dengan kitabnya *Ushul as-Sarakhsi*.



Adapun sumber-sumber sekunder penulis ambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian yang dibahas.

2) *Pengolahan Data*

Adapun cara pengolahan data yang penulis gunakan adalah dengan metode komparatif, yaitu metode yang menggunakan cara membandingkan kedua pendapat tokoh yang dimaksud dari pembahasan skripsi ini.

3) *Analisa Data*

Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan pendekatan falsafi, yaitu pendekatan sistematis yang dikategorikan kepada hasil pemikiran ulama sarjana-sarjana Islam.

4) *Metode Penulisan*

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku panduan yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN-SU

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ini menjadi beberapa bab dan subbab pembahasan, yaitu:

Bab I. Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Membahas tinjauan umum tentang *qiyas* dan permasalahannya, yang meliputi pengertian *qiyas*, macam-macam, dan ke-*hujjah*-annya.

BAB III. Membahas tentang pengertian hudud dan permasalahannya, yang meliputi pengertian hudud, bentuk-



bentuk hudud serta hikmah disyariatkannya.

Bab IV. Membahas tentang pemakaian *qiyas* dalam menetapkan hudud menurut pendapat imam al-Baidawi dan as-Sarakhsi, yang meliputi ikhtilaf tentang penerapan *qiyas* terhadap hudud, serta mengemukakan pendapat dan dalil keduanya. *Munaqasah adillah*, serta menentukan pendapat yang paling rajih.

Bab V. Merupakan bab penutup dengan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan dalam perbaikan skripsi ini.



SAMPLE

REFERENSI

- Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Al-`Āshimi, Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. 2009. *Al-Itmām bijam`i āyātil Ahkām*. Riyadh: Alma`ārif Al-qur`āniyyah.
- Al-Juday', Abdullāh Yūsuf. 1997. *Taysīr 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh*. Leeds: Islamic Research Centre.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Yesnil dan Adang. T.Th.. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Arfa, Faisar Ananda. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet. I. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1994. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Fakultas Syariah. 2004. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya*

- Ilmiah*. Medan: IAIN Press.
- Gie, The Liang. 1996. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Cet. II. Yogyakarta: Penerbit liberty.
- Guba and S. Lincoln. 2006. *Effective Evaluation*. Hlm. 218, dalam Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Huxle, T.H. 1964. *The Method of Scientific Investigation, Science: Method and Meaning*. Ed. Samuel Rapport dan Helen Wright. New York: Washington Square Press.
- Hadi, Sutrisno. 1973. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hillway, T. 1956. *Intoduction to Research*. Houghton Mifflin Co., hlm. 56.
- Indra. 2016. *Maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut Muhammad at-Tāhir Bin Āsyūr*. Tesis. Medan: UIN-SU.
- Ibrahim, Johni. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Kartono, Kartini. 1986. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni.
- Marzoeki, Djohansjah. 2000. *Budaya Ilmiah dan Filsafat Ilmu*. Jakarta: Grafindo.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XX. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pagar. 2010. *Himpunan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Prasseyo, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Kuantatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pearsall, Judy and Bill Trumble (ed.). 1996. *The Oxford English Reference Dictionary*. New York: Oxford University Press.



- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 3. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suriasumantri, Jujun S. 1991. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Salim, Peter. 1991. *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern English Press.
- Senn, Peter R. 1971. *Social Science and Its Methods*. Boston: Holbrook.
- Suryasubrata, Sumardi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syaltūt, Maḥmūd. 1421H/2001M. *Al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*. Cet. 17. Kairo: Dār asy-Syurūq.
- Ṭaḥḥān, Maḥmūd. 1991. *Uṣūl at-Takh wa Dirāsah al-Asānīd*. Cet. 2. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1977. "Pengolahan dan Analisis Data" dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Wehr, Hans. 1980. *A Dictionery of Modern Written Arabic*, ed. By J. Milton Cowan. Beirut: Librari Du liban.
- Ziman, Jhon FRS. 1984. *An Introduction to Science Studies, The Philosophical and Social Aspects of Science and Technology*. New York: Cambridge University Press.



SAMPLE

PARA PENULIS



Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A., lahir di Medan 2 Juli 1964 adalah dosen pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), Fakultas Syari'ah UIN-SU, Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum serta pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Menyelesaikan S-1 dari Fakultas Syari'ah IAIN-SU Medan (1988), S-2 dari McGill University Montreal Canada (1995), sedangkan S-3 diselesaikan di Universitas Islam Negeri Jakarta (2001).

Di tengah kesibukan sebagai dosen, juga mengikuti berbagai pelatihan, di antaranya: EAP IALF di Denpasar Bali (1992-1993); Education Course di McGill University Montreal (1994); Management Course (1997); Training Metode Pengajaran (2004). Juga menjadi Senior Research di Virginia USA (2005-2006) dan pada tahun 2007 menjadi tenaga pengajar di London UK atas Undangan IIS.

Karya ilmiah yang dipublikasikan antara lain: *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Krisis Hukum Islam di Barat*; *English For Students of Islam*; *An Anthology of Islamic Studies*; *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*; *Metodologi*

Penelitian Syariah; Filsafat Hukum Islam; Metodologi Penelitian Hukum Islam, dan lain sebagainya.



Watni Marpaung, lahir di Tanjungbalai, Asahan, Sumatera Utara, 15 Mei 1982. Menyelesaikan jenjang pendidikan S-I Fakultas Syariah IAIN-SU Medan, Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM) tahun 2006 dengan judul skripsi “*Penerapan Qiyas Dalam Menetapkan Hukuman Hudud: Studi Komparatif antara Imam Baidhawi dan al-Sarakhsi*”. S-2 PPS IAIN SU pada tahun 2008, Prodi Hukum Islam dengan judul tesis “*Metode Istinbat Hukum Kompilasi Hukum Islam*”. Menyelesaikan Studi S-3 PPS UIN SU Tahun 2015 dengan judul disertasi “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*”.

Pada masa perkuliahan strata satu (S-1), aktif dalam berbagai kegiatan kampus dan dalam berbagai bidang kajian dan pengembangan bahasa di Fakultas Syariah, Ketua English Studi Club (ESC-Fak-Syari’ah), Pemred Bulletin Intellectual, Peserta Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI-SU (2004-2005). Aktif mengikuti diskusi fikih, tasawuf dan tauhid, dan Baths Al-Masa’il di dalam dan di luar kampus. Beberapa amanah yang diberikan sedang diemban Direktur Falak Center IAIN SU, Ketua Divisi Litbang Forum Kajian Islam dan Masyarakat (FKIM), Sekretaris Umum Lembaga Pengkajian Dan Penelitian Ilmu Sosial Hukum dan Agama (LPPI SHA), Wasekum Majelis Kitab Kuning Masjid UNI-VA, Pengurus Pojok Kitab Kuning IAIN SU, Tim Editor Tafsir Al-Quran Ulama Tiga Serangkai, Badan Pengawas BMT Al-I’TISHAM Tanjungbalai, Wasekum IPQAH Kota Medan,



Divisi Taman Bacaan Lembaga Baca Tulis Sumatera Utara (eLBeTe-SU), Divisi Ta'lif wa al-Nasr Jam'iyatul Qurra' Wal Huffaz Sumatera Utara (JQH-Sumut), Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) SU, Pengurus Wilayah Al-jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SU.

Mulai tahun 2009 sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU. Di antara karya ilmiah telah diterbitkan yakni: *Memimpikan Indonesia Baru; Pergumulan Syari'at Islam di Indonesia Wacana dan Aksi; Mutiara Subuh Ramadhan; Menelusuri Khilafiyah dalam Tradisi Salaf dan Khalaf; Umat Bertanya Ulama Menjawab: Respons Terhadap Berbagai Problematika Hukum Islam; Bunga Rampai Pengukuhan Guru Besar UIN SU; Menjaga Tradisi Mengawal Modernitas Apresiasi Terhadap Pemikiran Prof. Dr. H. Lahmuddin Nasution, M.Ag.; Metodologi Penelitian Hukum Islam; Mutiara Kota Kerang; Islam Menggugat; 40 Mutiara Ramadhan; Ilmu Falak Teori dan Praktik; Ilmu Falak di Indonesia; Bunga Rampai Kebangsaan; Thamrin Munthe Si Anak Pena; Hukum Perwakafan di Indonesia; Hukum Wasiat di Indonesia, Fikih Keindonesiaan*, dan kontributor berbagai buku ilmiah dan jurnal dan *Harian WASPADA*.



SAMPLE